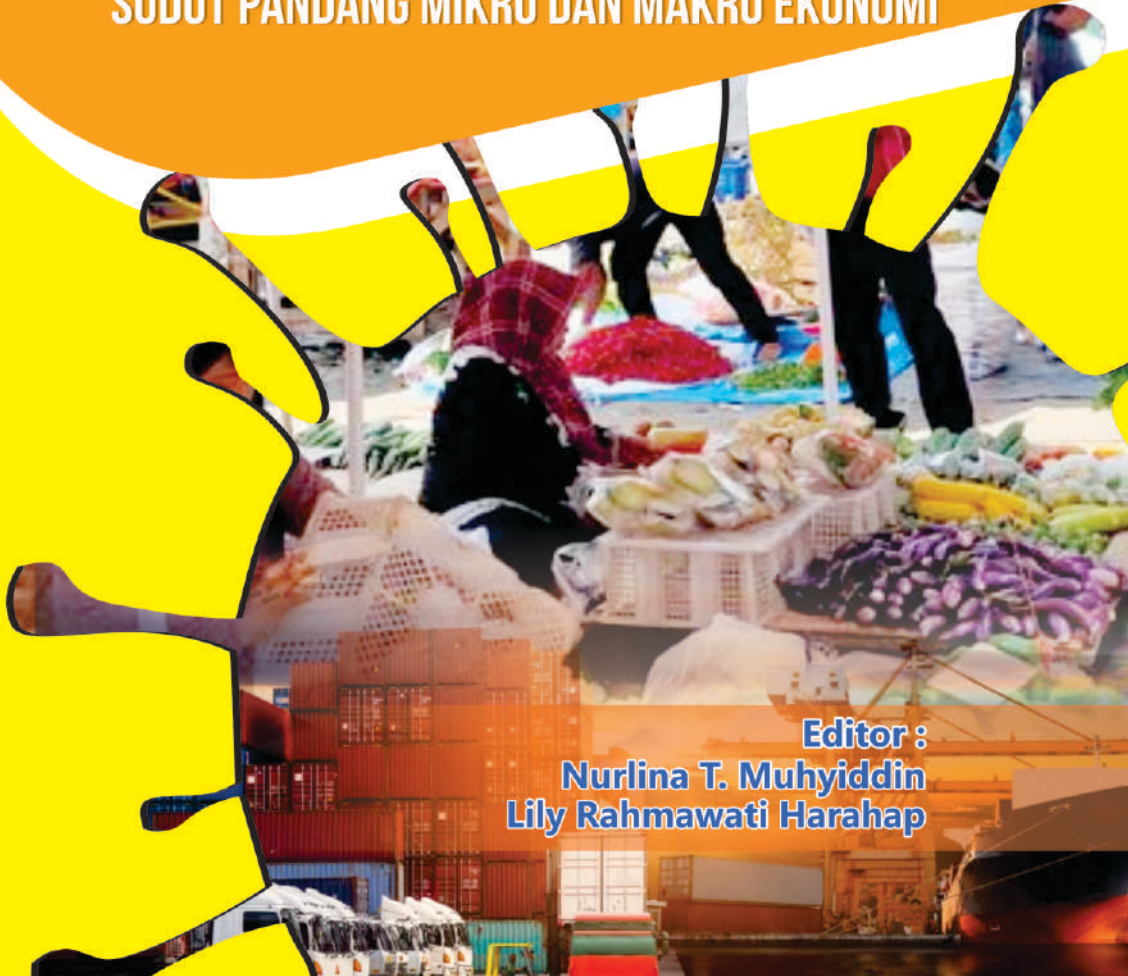


Nurlina T. Muhyiddin | Kgs. M. Sobri | Lily Rahmawati Harahap
Aning Kesuma Putri | Dian Novriadhy | Oktaf Juairiyah
Wenni Tania Defriyanti | Dessy Adriani | Maryadi
Neneng Miskiyah | Sari Lestari Zainal Ridho

DAMPAK dan ANALISA PANDEMI COVID-19 SUDUT PANDANG MIKRO DAN MAKRO EKONOMI



Editor :
Nurlina T. Muhyiddin
Lily Rahmawati Harahap

**Nurlina T. Muhyiddin | Kgs. M. Sobri | Lily Rahmawati Harahap
Aning Kesuma Putri | Dian Novriadhy | Oktaf Juairiyah
Wenni Tania Defriyanti | Dessy Adriani | Maryadi
Neneng Miskiyah | Sari Lestari Zainal Ridho**

DAMPAK dan ANALISA PANDEMI COVID-19 SUDUT PANDANG MIKRO DAN MAKRO EKONOMI

**Editor :
Nurlina T. Muhyiddin
Lily Rahmawati Harahap**

DAMPAK
dan
ANALISA
PANDEMI COVID-19
SUDUT PANDANG MIKRO DAN MAKRO EKONOMI

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dampak dan Analisa Pandemi Covid-19: Sudut Pandang Mikro dan Makro
Ekonomi--Cet 1- Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta 2021 -- xx + 124 --hlm-
15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-623-6074-16-9

1. Ekonomi

2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral
dan melawan hukum.

**DAMPAK DAN ANALISA PANDEMI COVID-19:
SUDUT PANDANG MIKRO DAN MAKRO EKONOMI**

Penulis: Nurlina T. Muhyiddin, Kgs. M. Sobri, Aning Kesuma Putri,
Dian Novriadhy, Oktaf Juairiyah, Wenni Tania Defriyanti,
Sari Lestari Zainal Ridho, Dessy Adriani, Maryadi,
Neneng Miskiyah, Lily Rahmawati Harahap

Setting Layout: Agus S

Desain Cover: Ach. Mahfud

Cetakan Pertama: Mei 2021

Penerbit : Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh Penerbit IDEA Press Yogyakarta
Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email: ideapres.now@gmail.com/ idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY

Copyright ©2021 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Rasa syukur dipersembahkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan hidayah yang tiada hentinya kepada tim penulis, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah Islam sebagai pedoman dalam menempuh kehidupan di dunia yang fana untuk menuju kehidupan akhirat yang hakiki.

Buku **Dampak dan Analisa Pandemi Covid-19: Sudut Pandang Mikro dan Makro Ekonomi**, mengedepankan tentang permasalahan yang timbul serta solusi yang diberikan pada masa terjadinya pandemi Covid-19 yang menerpa seluruh dunia di awal tahun 2020. Terjadinya pandemi Covid-19 yang tidak pernah diduga oleh manusia, mengingatkan bahwa pengetahuan manusia sangatlah sedikit.

Buku ini dibagi atas 6 (enam) bab, dimana masing-masing bab menguraikan permasalahan serta solusi dari sudut pandang objek yang berbeda, yaitu:

Bab I: Penilaian Awal Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian di Sumatera Selatan.

Kajian yang bertujuan memberikan penilaian awal dampak Covid-19 terhadap perekonomian di Sumatera Selatan dengan tahapan:

1) Karakterisasi Covid-19, 2) Karakterisasi perekonomian



Sumatera Selatan, 3) Analisis hubungan karakteristik Covid-19 dengan karakteristik perekonomian Sumatera Selatan, serta 4) Simulasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian Sumatera Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa minimalisasi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dapat dilakukan salah satunya dengan pemulihan sektor akomodasi dan makan-minum yang perputaran ekonominya bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Bab II : Potensi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi SDM di Sumatera Selatan.

Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan pembangunan manusia yang seharusnya terjadi dalam 3 (tiga) hal mendasar berupa 1) Usia yang panjang, 2) Pengetahuan dan 3) Kehidupan yang layak harus dipengaruhi oleh sakit dan kematian, dan berpotensi menimbulkan disrupsi dalam sektor publik maupun non publik. Kebijakan pemerintah dengan memastikan ketersediaan sembilan bahan kebutuhan pokok, pemberian insentif ekonomi, menyalurkan bantuan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang kehilangan pendapatan merupakan cara mencegah perluasan kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

Bab III : Pandemi Covid-19 dan Pasar Kerja Pertanian

Tidak terduganya kejadian pandemi Covid-19 ternyata memberikan hal yang anomali bagi sektor pertanian. Selain mampu bertahan, pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja non pertanian yang terpaksa berhenti maupun diberhentikan. Tetapi kekuatiran terjadinya krisis pangan akibat krisis Covid-19 tidak dapat dihindari. Selain diperlukan konsep 4-H (*Heads, Hand, Heart, Health*) dalam rangka membangun SDM pertanian sejahtera, juga kebijakan pemerintah dan kemampuan SDM pertanian untuk beradaptasi perilaku.

Bab IV : Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat: Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Meluasnya penyebaran Covid-19 telah menekan pertumbuhan ekonomi global termasuk perekonomian Indonesia. Peraturan untuk melakukan semua aktifitas dari rumah telah merubah pola dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Di sisi lain, transformasi ekonomi digital memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi secara ekonomi. Salah satunya adalah perubahan perilaku masyarakat melakukan pengeluaran konsumsinya, baik caranya maupun produknya.

Bab V : *Tradeoff* Waktu Kerja dan Waktu Luang Pada Masa Pandemi Covid-19

Perilaku kehidupan ekonomi pekerja mengalami perubahan dengan terjadinya pandemi Covid-19. Bekerja secara *online*, *offline* maupun kombinasi antara keduanya juga terjadi pada sektor pendidikan yang mencakup dosen ilmu sosial dan dosen ilmu sains perguruan tinggi swasta di kota Palembang. Dengan menggunakan model *Firsch Elasticity* untuk mengetahui tingkat utilitas dan *tradeoff* antara waktu kerja dan waktu luang diperoleh hasil: (1) *Firsch Elasticity* intensive margin kedua kelompok dosen ini berpengaruh signifikan terhadap utilitas, sedangkan koefisien elastisitas jam kerja *online* bersifat inelastis dengan persentase yang berbeda, (2) *Tradeoff* antara waktu kerja terhadap pendapatan: a. bagi dosen ilmu sosial jam kerja *online* dan *offline* berpengaruh signifikan, yang berarti lebih banyak menggunakan waktu kerja dibandingkan waktu luang, b) bagi dosen ilmu sains, mengajar dengan sistem *online* maupun *offline* tidak berpengaruh signifikan.

Bab VI : Kekuatan Filantropi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19

Kejadian luar biasa yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 merupakan hal yang di luar dugaan manusia. Dampak yang ditimbulkan baik negatif maupun positif tidak pernah terpikirkan sebagai kebiasaan baru yang harus dijalankan. Peraturan jaga jarak secara fisik dan sosial serta kebijakan karantina berdampak pada lumpuhnya perekonomian yang



berakhir pada meningkatnya kemiskinan. Filantropi sosial dan filantropi Islam dengan semua skenarionya, dianggap mampu membantu mengatasi permasalahan akibat pandemi Covid-19 ini. Kegiatan kedermawanan yang tidak membatasi pemberian baik dalam bentuk materi maupun non materi, masyarakat yang berkelebihan maupun yang berkekurangan serta tidak adanya batasan waktu, menjadikan kegiatan ini memiliki potensi sangat besar sebagai salah satu instrumen untuk mengembalikan keadaan khususnya di bidang ekonomi agar menjadi lebih baik. Tim penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki pada buku ini. Dengan niat untuk berbagi ilmu yang sedikit, tim penulis berharap mudah-mudahan buku ini mendapat tempat bagi para pembaca, khususnya yang bersinggungan langsung dengan topik yang dibahas.

Keberanian mengetengahkan buku ini tidak terlepas dari kewajiban tim penulis sebagai pendidik dan pengajar pada berbagai bidang ilmu yang dihubungkan dengan kejadian luar biasa pandemi Covid-19 saat ini. Telah banyak buku yang menawarkan bacaan dengan topik yang mirip maupun serupa dengan buku yang dihadirkan ini. Para penulis tetap berharap dengan membaca buku yang baru akan ada suatu ilmu yang baru.

Akhirul kalam, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini pada penerbitan selanjutnya. Tidak ada gading yang tak retak, namun keretakan tidak menyurutkan keinginan untuk terus berkarya.

Palembang, Juni 2021

Tim Penulis:

1. Nurlina T. Muhyiddin, Kgs. M. Sobri, Aning Kesuma Putri
2. Dian Novriadhy, Oktaf Juairiyah, Wenni Tania Defriyanti
3. Sari Lestari Zainal Ridho
4. Dessy Adriani, Maryadi
5. Neneng Miskiyah
6. Lily Rahmawati Harahap

Dipersembahkan Untuk:
Orang Tua, Suami/Isteri, Anak-Anak dan Cucu-Cucu
Almamater





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	xi
Daftar Gambar	xv
Daftar Tabel.....	xviii
BAB I PENILAIAN AWAL DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DI SUMATERA SELATAN	1
Abstrak.....	1
Abstract.....	2
1.1 Pendahuluan.....	2
1.2 Covid-19 dan Perekonomian Sumatera Selatan.....	3
1.2.1 Karakteristik Covid-19	3
1.2.2 Karakteristik Perekonomian Sumatera Selatan	6
1.3 Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Sumatera Selatan.....	10
1.3.1 Permintaan Barang dan Penyediaan Suku Cadang/Mesin Produksi Impor.....	10
1.3.2 Kesehatan Penduduk.....	11
1.3.3 Kunjungan Wisatawan	13
1.4 Mitigasi Dampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan	15



1.5	Penutup	16
	DAFTAR PUSTAKA	17
BAB II	POTENSI DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI SDM DI SUMATERA SELATAN	19
	Abstrak.....	19
	Abstract.....	19
2.1	Pendahuluan.....	20
2.2	Perkembangan Pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan	21
2.2.1	ODP (Orang Dalam Pemantauan)	21
2.2.2	PDP, Kasus Konfirmasi (Positif), Meninggal dan Sembuh	22
2.3	Potensi Dampak Pandemi Covid-19	25
2.4	Penutup	28
	DAFTAR PUSTAKA	29
BAB III	PANDEMI COVID-19 DAN PASAR KERJA PERTANIAN.....	31
	Abstrak.....	31
	Abstract.....	32
3.1	Pasar Kerja Pertanian: Sebuah Gambaran Umum ..	33
3.2	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Kerja Pertanian di Indonesia	38
3.3	Membangun Kembali Pasar Kerja Pertanian di Masa Pandemi Covid-19	43
3.4	Penutup	50
	DAFTAR PUSTAKA	51

BAB IV PERUBAHAN POLA KONSUMSI MASYARAKAT: SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19.....	55
Abstrak.....	55
Abstract.....	56
4.1 Pendahuluan.....	57
4.2 Pola Konsumsi Masyarakat Terhadap Social Distancing	58
4.3 Perubahan Perilaku Konsumen Dalam Masa Covid-19	60
4.4 Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat	64
4.4.1 Perubahan Pendapatan Masyarakat	65
4.4.2 Peningkatan dan Penurunan Pengeluaran Masyarakat Selama Pandemi Covid-19	66
4.5 Penutup	70
DAFTAR PUSTAKA	71
BAB V TRADE OFF WAKTU KERJA DAN WAKTU LUANG PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	73
Abstrak.....	73
Abstract.....	74
5.1 Pendahuluan.....	74
5.2 Tradeoff Waktu Kerja dan Waktu Luang	75
5.3 Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pendidikan	76
5.4 Perubahan Jam Kerja Akibat Pandemi Covid-19	78
5.5 Kajian Deskriptif	79
5.5.1 Deskripsi Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Sains	79
5.5.2 Pendapatan Sebelum dan Semasa Covid-19	81
5.5.3 Jam Kerja Online, Offline, dan Pendapatan Saat Covid-19	83
5.5.4 Pendapatan dan Waktu Luang Sebelum dan Saat Covid-19	87
5.5.5 Konsumsi Pangan dan Non Pangan Sebelum dan Saat Covid-19	89



5.6	Utilitas dan Tradeoff Waktu Kerja dan Waktu Luang Saat Covid-19.....	90
5.6.1	Utilitas.....	90
5.6.2	Tradeoff Waktu Kerja dan Waktu Luang.....	92
5.7	Motivasi Bekerja dan Fasilitas Kampus.....	93
5.8	Antisipasi Masa Depan.....	94
5.9	Kesimpulan dan Saran.....	95
	DAFTAR PUSTAKA.....	96
BAB VI	KEKUATAN FILANTROPI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASA PANDEMI COVID-19.....	99
	Abstrak.....	99
	Abstract.....	100
6.1	Pendahuluan.....	100
6.2	Gambaran Global Di Masa Pandemi Covid-19.....	101
6.3	Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.....	103
6.4	Filantropi.....	106
6.5	Filantropi Sosial.....	109
6.6	Filantropi Islam.....	110
6.6.1	Zakat.....	110
6.6.2	Infak.....	112
6.6.3	Sedekah.....	113
6.6.4	Wakaf.....	115
6.7	Filantropi Dan Pandemi Covid-19.....	117
6.8	Penutup.....	118
	DAFTAR PUSTAKA.....	119
	BIODATA PENULIS.....	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Konsep Penilaian Awal Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan	5
Gambar 1.2. Kerangka Konsep Dalam Identifikasi Dampak Penyakit Terhadap Makro Ekonomi	6
Gambar 1.3. Proporsi Lapangan Usaha Dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Selatan 2019	8
Gambar 1.4. Serapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan 2019	8
Gambar 1.5. Komparasi Pertumbuhan Lapangan Usaha Dengan Serapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan 2019.....	9
Gambar 1.6. Jumlah Penduduk Dengan Penyakit Kronis Dari Kelompok Rumah Tangga Dengan Tingkat Kesejahteraan 40% Terbawah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015.....	12
Gambar 2.1 Perkembangan ODP Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan, April 2020.....	22
Gambar 2.2. Perkembangan Covid-19 Untuk Kasus PDP, Konfirmasi, Meninggal dan Sembuh Provinsi Sumatera Selatan, April 2020.....	23



Gambar 2.3. Kasus Positif Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota, April 2020	24
Gambar 2.4. Persentase Kasus Meninggal dan Sembuh Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan, April 2020	25
Gambar 2.5. Potensi Dampak Pandemi	26
Gambar 3.1. Perbandingan Struktur Kontribusi Produk Domestik Bruto Dengan Kesempatan Kerja, 2018	35
Gambar 3.2. Perbandingan Upah Sektoral, 2016-2018.....	37
Gambar 3.3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	39
Gambar 3.4. Kondisi Pasar Kerja Pertanian Saat Ini dan Gambaran Capaian Masa Depan.....	44
Gambar 3.5. Pilar Untuk Membangun Kembali Pasar Kerja Pertanian Pasca Pandemi Covid-19.....	45
Gambar 4.1. Kasus Baru dan Total Kasus Covid-19 Juni 2020	58
Gambar 4.2. Perubahan Pola Konsumsi dan Segmentasi Konsumen Masa Pandemi Covid-19.....	64
Gambar 4.3. Persentase Responden Terdampak Covid-19..	65
Gambar 4.4. Persentase Peningkatan Pengeluaran	67
Gambar 4.5. Persentase Penurunan Pengeluaran.....	73
Gambar 5.1. Anggaran Pendidikan Sebelum dan Semasa Covid-19	77
Gambar 5.2. Jumlah Jam Kerja yang Hilang di Beberapa Negara	79
Gambar 5.3. Jam Kerja Online dan Pendapatan Saat Pandemi Covid-19	84
Gambar 5.4. Jam Kerja Offline dan Pendapatan Sebelum Covid-19	85
Gambar 5.5. Jam Kerja Offline dan Pendapatan Saat Covid-19	86

Gambar 5.6. Jam Waktu Luang dan Pendapatan Sebelum Covid-19	88
Gambar 5.7. Jam Waktu Luang dan Pendapatan Saat Covid-19	88
Gambar 6.1. Jumlah Kasus Covid-19 Di Indonesia 2 Maret-3 Juli 2020	103
Gambar 6.2. Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Tahun 2017-2020 (5)	104
Gambar 6.3. Skema Filantropi Sosial.....	109
Gambar 6.4. Skema Filantropi Zakat.....	112
Gambar 6.5. Skema Filantropi Infak.....	113
Gambar 6.6. Skema Filantropi Sedekah.....	115
Gambar 6.7. Skema Filantropi Wakaf.....	117



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Covid-19 di Tiongkok, Indonesia dan Sumatera Selatan Berdasarkan Kelompok Umur (Dalam Persentase)	4
Tabel 1.2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Sumatera Selatan Yang Memiliki Penyakit Kronis Dari Kelompok Rumah Tangga Dengan Tingkat Kesejahteraan 40% Terbawah Tahun 2017.....	11
Tabel 1.3. Sebaran Penduduk Mengeluh Sakit dan Terganggu Sakit di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kelompok Umur	12
Tabel 3.1. Perbandingan Struktur Produk Domestik Bruto Dengan Kesempatan Kerja, 2016-2018	34
Tabel 3.2. Tingkat Pengangguran di Wilayah Pedesaan, 2016-2018	36
Tabel 3.3. Tenaga Kerja Informal dan Formal Sektor Pertanian, 2016-2018	37
Tabel 4.1. Kelompok yang Mengalami Penurunan Pendapatan	66
Tabel 5.1. Kondisi Makro Indonesia 2020	78
Tabel 5.2. Deskripsi Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Sains.....	80
Tabel 5.3. Aset Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Sains Sebelum dan Semasa Covid-19	81

Tabel 5.4. Pendapatan Perbulan Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Sains	83
Tabel 5.5. Rata-Rata Jam Mengajar Sistem Online dan Offline Saat Pandemi Covid-19	87
Tabel 5.6. Konsumsi Pangan Sebelum dan Saat Covid-19 (%)	89
Tabel 5.7. Konsumsi Non Pangan Sebelum dan Saat Covid-19 (%)	90
Tabel 5.8. Hasil Estimasi Tradeoff Jam Kerja dan Waktu Luang Saat Pandemi Covid-19	93
Tabel 5.9. Motivasi Bekerja dengan Adanya Fasilitas Kampus	94



Bab 1

PENILAIAN AWAL DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN DI SUMATERA SELATAN

Dian Novriadhy, Oktaf Juairiyah, Wenni Tania Defriyanti

Abstrak

Penanganan wabah Coronavirus disease 2019 (Covid-19) melalui pembatasan mobilitasi manusia memberikan dampak terhadap perekonomian. Kajian ini bertujuan memberikan penilaian awal dampak Covid -19 terhadap perekonomian di Sumatera Selatan. dengan tahapan: 1) Karakterisasi Covid -19, 2) Karakterisasi perekonomian Sumatera Selatan, 3) Analisis hubungan karakteristik Covid-19 dengan karakteristik perekonomian Sumatera Selatan, dan 4) Simulasi dampak Covid -19 terhadap perekonomian Sumatera Selatan. Data bersumber dari artikel ilmiah dan laporan teknis yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah/organisasi. Hasil kajian menunjukkan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor yang langsung terdampak namun efeknya dapat dikurangi dengan mempertahankan konsumsi dalam negeri, ketergantungan ekspor-impor yang tinggi memberikan peluang bagi pelaku usaha dalam negeri untuk memperkuat basis industri dalam negeri. Di sisi kesehatan penduduk, perubahan pelayanan dalam penanganan penyakit kronis merupakan salah satu kunci untuk mengurangi dampak Covid-19.

Kata Kunci: dampak Covid-19, perekonomian Sumatera Selatan, analisis hubungan, simulasi



Abstract

To handle the Coronavirus disease 2019 (Covid-19) outbreak through restrictions on human mobilization impacts the economy. This study aims to provide an initial assessment of the impact of Covid-19 on the economy in South Sumatra. With the following stages: 1) Characterization of Covid-19, 2) Characterization of the economy of South Sumatra, 3) Analysis of the relationship between Covid-19 characteristics and economic characteristics of South Sumatra, and 4) Simulation of the impact of Covid-19 on the economy of South Sumatra. The data are sourced from scientific articles and technical reports issued by government institutions and organizations. The study results show that the field of business in providing accommodation and food and drink is a sector that is directly affected. Still, can reduce the effect by maintaining domestic consumption, the high dependence on imports and exports provides opportunities for domestic business actors to strengthen the domestic industrial base. On the health side of the population, changing services in managing chronic diseases is one of the keys to reducing the impact of Covid-19.

Keywords: *impact of Covid-19, South Sumatra economy, relationship analysis, simulation*

1.1 Pendahuluan

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) merupakan wabah virus yang secara internasional diakui kemunculannya dari Wuhan, Tiongkok tanggal 31 Desember 2019. Pembaharuan data oleh WHO tertanggal 3 Maret 2020, Covid-19 telah menginfeksi setidaknya 110.029 orang di 105 negara dan wilayah internasional dimana 3.817 pasien diantaranya meninggal dunia (WHO, 2020). Melihat kecepatan penyebaran dan relatif tingginya fatalitas Covid-19 di masa awal kemunculannya, pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang kesehatan melakukan berbagai upaya untuk mengobati dan mencegah perluasan penyebaran Covid-19.

Langkah antisipatif penyebaran Covid-19 yang telah dilakukan oleh berbagai negara (pemeriksaan temperatur, isolasi pasien, karantina mandiri, isolasi kota) mendapatkan sorotan dari

WHO yang secara umum menjelaskan bahwa membatasi pergerakan manusia pada kondisi tertentu akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan sosial ekonomi. Hal ini terjadi hampir di seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia termasuk provinsi Sumatera Selatan. Hal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 adalah pengendalian mobilitas manusia. Dampak ekonomi dari pengendalian mobilitas di Sumatera Selatan berupa: (a) menurunnya permintaan barang dari negara tujuan ekspor Sumatera Selatan, (b) terhambatnya penyediaan suku cadang/mesin produksi dari negara luar yang dibutuhkan oleh industri di Provinsi Sumatera Selatan, (c) menurunnya produktivitas (WHO, 2020).

1.2 Covid-19 dan Perekonomian Sumatera Selatan

Munculnya Covid-19 yang merebak di seluruh dunia, memberi dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Sebagai salah satu provinsi terbesar kedua di pulau Sumatera, kontribusi provinsi Sumatera Selatan di bidang perekonomian patut diperhitungkan, baik terkait dengan bidang industri, bidang kesehatan dan bidang pariwisata.

1.2.1 Karakteristik Covid-19

Covid-19 secara umum dapat menginfeksi manusia dalam segala umur. Diperkirakan 86,6%-89,8% dari keseluruhan penderita berada dalam rentang umur 30-79 tahun. Laki-laki berpotensi lebih besar terinfeksi Covid-19 dibandingkan perempuan (Rasio kasus L/P = 1,06). Distribusi pasien Covid-19 berdasarkan tingkat keparahan terbagi menjadi 80,9% Ringan, 13,8% Parah dan 4,7% Kritis (Feng *et al.*, 2020). Dalam penelitian Tian *et al.* (2020) ditemukan 17,6% pasien dikategorikan menderita Parah, 73,3% Ringan, 4,2% tidak mengalami Pneumonia dan 5% pasien tidak menunjukkan gejala/keluhan kesehatan.

Penyebaran Covid-19 lebih menyerupai penyakit influenza dibandingkan SARS dan MERS (Lin *et al.*, 2020). Masa inkubasi dan penyembuhan dari pasien terinfeksi Covid-19 berhubungan dengan



faktor usia dan daya tahan tubuh. Diperkirakan masa inkubasi tersingkat dalam kisaran 5 hari (Rothan & Byrareddy, 2020). Secara umum, tingkat kematian pasien juga berhubungan dengan riwayat penyakit sebelumnya seperti kardiovaskular, diabetes, pernafasan kronis, hipertensi dan kanker.

Kasus Covid-19 di Indonesia secara resmi diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus dan meningkat menjadi menjadi 69 kasus dengan 4 kasus kematian pada 13 Maret 2020. Di Sumatera Selatan kasus pertama Covid-19 dilaporkan pada tanggal 24 Maret 2020 sebanyak 2 kasus.

Tabel 1.1
Covid-19 di Tiongkok, Indonesia dan Sumatera Selatan
Berdasarkan Kelompok Umur (Dalam Persentase)

Kelompok Umur	Kasus Covid-19					
	Tiongkok ¹		Indonesia ²		Sumatera Selatan ³	
	orang	(%)	orang	(%)	orang	(%)
0-9	416	0,9	2	2,9	2	2,2
10-19	549	1,2	2	2,9	1	1,1
20-29	3.619	8,1	8	11,6	15	16,1
30-39	7.600	17,0	13	18,8	34	36,6
40-49	8.571	19,2	13	18,8	16	17,2
50-59	10.008	22,4	20	29,0	14	15,1
60-69	8.583	19,2	5	7,2	8	8,6
70-79	3.918	8,8	3	4,3	3	3,2
80+	1.408	3,2	3	4,3	0	0
Total	44.672	100	69	100,0	93	100

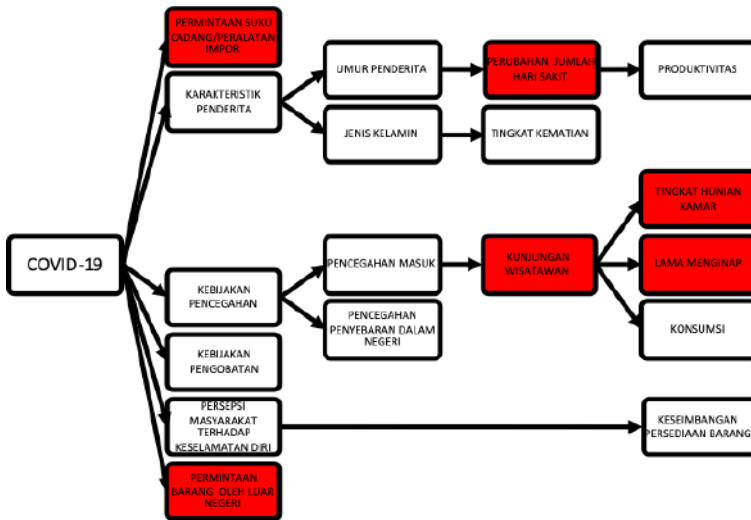
Sumber: 1 Feng *et al.* (2020); data per 11 Februari 2020

2 Kementerian Kesehatan (data per 13 Maret 2020), diolah penulis;

3 Satgas Covid-19 Sumsel (data per 23 April 2020), diolah penulis

Distribusi umur pasien Covid-19 di Indonesia memiliki kesamaan dengan pola di Tiongkok yaitu jumlah terbesar berada di kelompok umur 50-59 tahun, sedangkan di Sumatera Selatan memiliki pola yang berbeda yaitu kelompok terbesar penderita berada di rentang usia 30–39 tahun. Jumlah pasien laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan dengan rasio 1,27. Uji korelasi

dengan tingkat keyakinan $\alpha = 0,05$ diketahui setidaknya pola umur pasien di Indonesia memiliki korelasi bermakna sebesar 82% dengan pola umur di Tiongkok. Data yang tersedia saat ini belum dapat untuk memastikan tingkat kematian dalam kelompok umur pasien di Indonesia dan Sumatera Selatan akan menyerupai dengan pola di Tiongkok (Tabel 1.1).

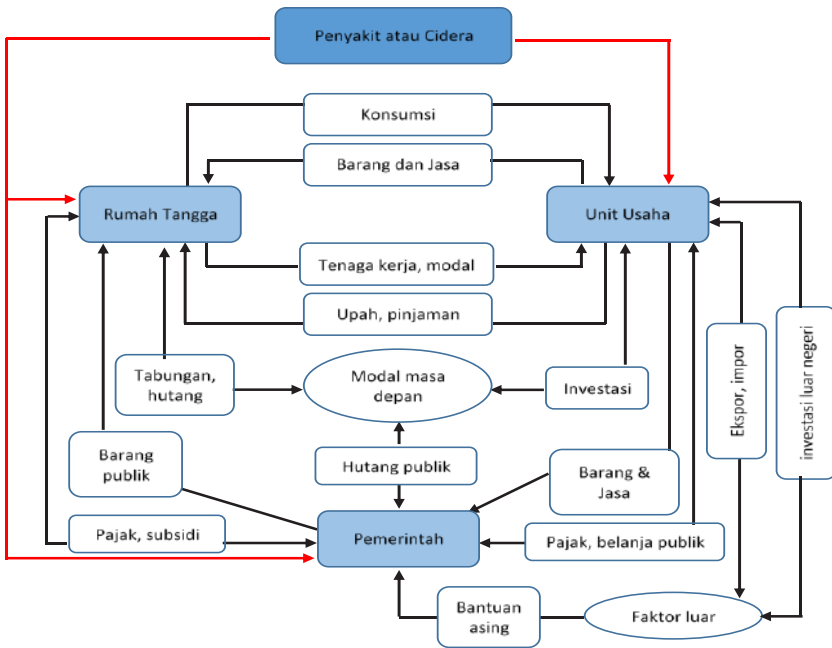


Gambar 1.1 Kerangka Konsep Penilaian Awal Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan

Dampak kesehatan yang buruk (*ill-health*) terhadap perekonomian secara umum dapat dibedakan dalam tingkatan mikroekonomi (individu dan rumah tangga) dan makroekonomi (wilayah, negara). Kesehatan yang buruk tidak hanya berbentuk kondisi sakit secara nyata namun juga mencakup keluhan sakit. Dalam tingkatan mikroekonomi, kesehatan yang buruk dapat mereduksi jumlah jam kerja yang berujung kepada menurunnya pendapatan dan tambahan pengeluaran biaya kesehatan (*out of pocket health expenditure*) dan kesempatan untuk berusaha. Di sisi makroekonomi, kesehatan yang buruk dapat menurunkan jumlah dan produktivitas tenaga kerja, menurunkan kemampuan belanja pengembangan sumber daya manusia maupun kemampuan belanja pembangunan infrastruktur non bidang kesehatan (WHO, 2009).

1.2.2 Karakteristik Perekonomian Sumatera Selatan

Secara umum perkembangan makroekonomi suatu negara/wilayah tergambarkan dalam perubahan Produk Domestik Bruto/PDB (*Gross Domestic Product/GDP*) (Syed & Shaikh, 2013). PDB merupakan indikator terpenting dalam menilai kinerja makroekonomi meskipun kurang sesuai untuk digunakan dalam analisis jangka panjang dikarenakan pertumbuhan makroekonomi tidak serta merta disebabkan oleh pertumbuhan nyata namun juga dipengaruhi oleh perubahan harga (OECD, 2020). Pun demikian PRB tetap digunakan oleh ekonom untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dikarenakan data tersebut selalu tersedia dan diperbaharui setiap tahunnya (Callen, 2020).



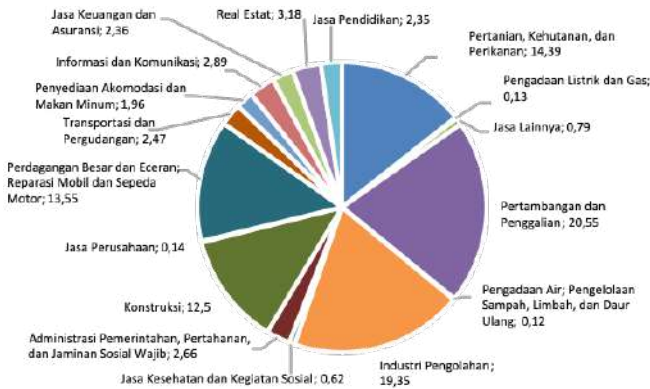
Gambar 1.2 Kerangka Konsep Dalam Identifikasi Dampak Penyakit Terhadap Makro Ekonomi (Sumber: WHO, 2009)

Kajian ini menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Selatan 2019 sebagai pijakan analisis. PDRB terbentuk dari 17 lapangan usaha namun dalam kajian ini hanya dipilih tiga lapangan usaha untuk diikutsertakan dalam

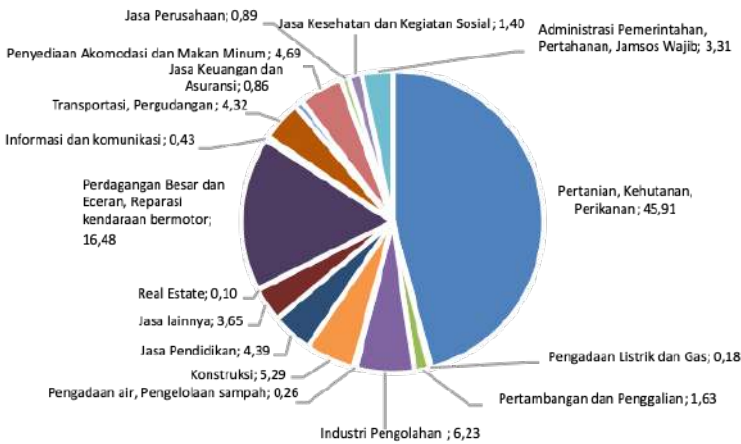
analisis. Pemilihan lapangan usaha didasari atas besaran nilai pertumbuhan nilai dan serapan tenaga kerja. Tiga negara yaitu 1) Tiongkok, 2) Malaysia dan 3) Singapura digunakan sebagai dasar dalam analisis pergerakan wisatawan dan aliran barang (ekspor-impor). Asumsi-asumsi yang digunakan dalam kajian ini diantaranya:

- Pola kelompok umur yang terinfeksi Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan serupa dengan pola kelompok umur yang terjadi di Tiongkok;
- Pola kematian pasien terinfeksi Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan serupa dengan pola kematian yang terjadi di Tiongkok;
- Pertambahan/pengurangan serapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan linier dengan pertumbuhan lapangan usaha
- Perubahan pendapatan bersifat proporsional dengan jumlah hari/jam kerja

Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2015-2019. Urutan lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar selama periode 2015-2019 tidak mengalami perubahan yaitu 1) Pertambangan dan penggalian, 2) Industri pengolahan, 3) Pertanian, kehutanan dan perikanan, 4) Perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan bermotor, dan 5) Konstruksi (BPS Sumatera Selatan, 2020a). Namun demikian, urutan dalam kontribusi terhadap PDRB-AHDK tidak mencerminkan urutan serapan tenaga kerja (Gambar 1.3). Data 2019 (Gambar 1.4) menunjukkan bahwa lima teratas lapangan usaha berdasarkan penyerapan tenaga kerja ditempati oleh 1) Pertanian, kehutanan dan perikanan, 2) Perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan bermotor, 3) Industri pengolahan, 4) Konstruksi, dan 5) Jasa pendidikan (BPS, 2020).



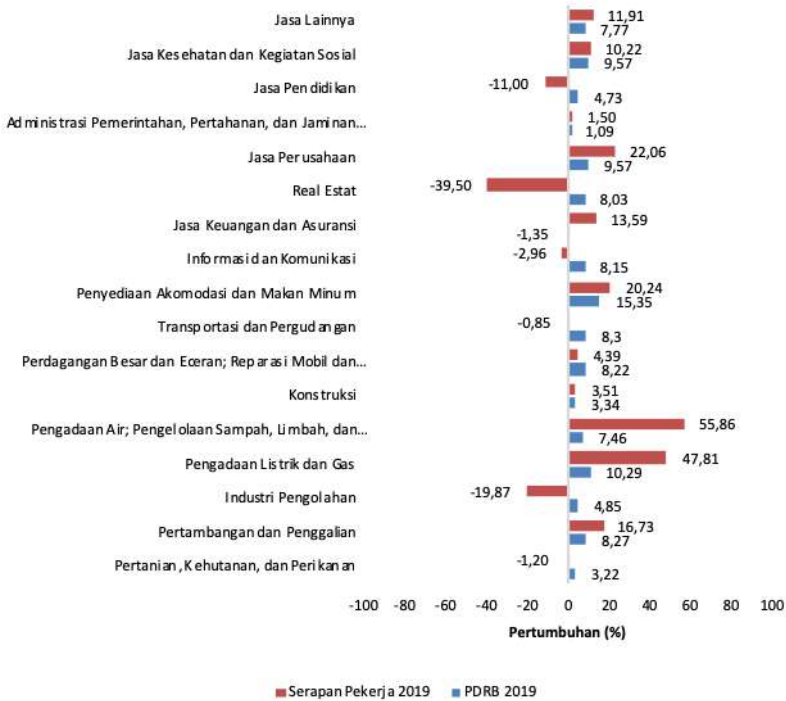
Gambar 1.3 Proporsi Lapangan Usaha Dalam Pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Selatan 2019 (Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2020)



Gambar 1.4 Serapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan 2019 (Sumber: BPS, 2020)

Pertumbuhan lapangan usaha diketahui tidak serta merta berhubungan secara linier dengan serapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan (Gambar 1.5). Lapangan usaha Real Estate diketahui memiliki pertumbuhan positif (8,03%) namun serapan tenaga kerja mengalami penurunan (-39,50%). Di sisi lain, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki pertumbuhan negatif (-1,35%) namun mengalami penambahan serapan tenaga kerja

(13,59%). Penyebab tidak linier hubungan antara pertumbuhan lapangan usaha dengan serapan tenaga kerja dimungkinkan karena adanya alih teknologi dalam menjalankan usaha semisal padat karya menjadi padat modal atau sebaliknya dari pola sentral menjadi perluasan jejaring/agensi.



Gambar 1.5 Komparasi Pertumbuhan Lapangan Usaha Dengan Serapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan 2019

Secara umum pada tahun 2019 lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar (15,35%) dengan pertumbuhan serapan tenaga kerja sebesar 20,24% (peringkat keempat). Ditinjau dari besaran upah, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas memberikan imbal balik terbesar (Rp. 4.560.523,-/bulan) sedangkan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menempati posisi ketiga terbawah dalam hal upah (Rp. 1.873.860,-/bulan) diikuti oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Rp. 1.705.211,-/bulan) dan Jasa lainnya (Rp. 1.318.860,-/bulan) (BPS, 2020). Merujuk Gambar 5 diketahui tiga lapangan



usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar di 2019 adalah 1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 2) Pengadaan Listrik dan Gas dan 3) Jasa Perusahaan. Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki nilai pertumbuhan yang sama dengan Jasa Perusahaan namun tidak diikutsertakan dalam analisis karena berpotensi bias.

1.3 Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Sumatera Selatan

Kajian bersifat deskriptif menggunakan pendekatan sistem (*systematic approach*) yang dilakukan dilakukan dengan tahapan: (a) Karakterisasi Covid-19; (b) Karakterisasi perekonomian (mikro dan makro ekonomi) Provinsi Sumatera Selatan; (c) Analisis hubungan karakteristik Covid-19 dengan karakteristik perekonomian Provinsi Sumatera Selatan; dan (d) Simulasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Karakterisasi Covid-19 ditampilkan dalam indikator : umur pasien, penyakit penyerta pasien dan jenis kelamin pasien. Sedangkan karakteristik perekonomian Provinsi Sumatera Selatan digambarkan dalam indikator: pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) dan serapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha. Data dianalisis melalui pendekatan Input-Proses-Output (IPO) dan diinterpretasikan melalui penilaian komparatif.

1.3.1 Permintaan Barang dan Penyediaan Suku Cadang/Mesin Produksi Impor

Tiongkok dan Malaysia merupakan negara tujuan ekspor strategis bagi Provinsi Sumatera Selatan dimana masing-masing menyerap komoditas sebesar 32,73% dan 10,54% dari keseluruhan nilai ekspor 2019 sedangkan ekspor ke Singapura relatif kecil. Di sisi lain, Tiongkok, Malaysia dan Singapura menyediakan 55,80% (masing-masing sebesar 39,72%, 12,64% dan 3,44%) dari keseluruhan kebutuhan impor Provinsi Sumatera Selatan 2019. Dari perbandingan neraca ekspor-impor tersebut dapat diasumsikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketergantungan yang relatif tinggi.

1.3.2 Kesehatan Penduduk

Tabel 1.2 menampilkan Sembilan jenis penyakit kronis terbanyak yang diderita oleh penduduk Sumatera Selatan dengan tingkat kesejahteraan 40% terbawah. Membandingkan profil penyakit penyerta Covid-19 dengan fatalitas relatif tinggi maka praktis hanya rematik saja yang merupakan bukan faktor risiko tinggi kematian Covid-19 di Sumatera Selatan. Dengan demikian setidaknya terdapat lebih dari 60.000 penduduk yang memiliki risiko tinggi mengalami kematian apabila terkena Covid-19. Menurut usia, penduduk berusia 14 tahun ke bawah yang menderita penyakit kronis sebanyak 1.860 orang (2,16%), usia 15 – 59 tahun sejumlah 38.296 orang (44,54%) dan usia 60 tahun ke atas sebanyak 45.824 orang (53,30%) (Gambar 1.6).

Di sisi lain publikasi BPS menunjukkan proporsi penduduk Sumatera Selatan yang memiliki keluhan sakit secara total maupun berdasarkan perdesaan/perkotaan selama 2017-2019 menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 20-24 tahun merupakan kelompok umur yang memiliki proporsi terkecil perihal mengeluh sakit atau terganggu aktivitasnya dikarenakan sakit sedangkan penduduk 60 tahun atau lebih merupakan kelompok umur yang memiliki proporsi terbesar dalam kaitan mengeluh sakit atau terganggu oleh sakit (Tabel 1.3). Artinya sebelum pandemi Covid-19 kelompok umur 60 tahun atau lebih sudah dalam posisi rentan menderita sakit dan perlu menjadi perhatian lebih bagi pemangku kepentingan untuk menyiapkan proteksi yang sesuai bagi setiap kelompok umur.

Tabel 1.2

Jumlah dan Proporsi Penduduk Sumatera Selatan yang Memiliki Penyakit Kronis Dari Kelompok Rumah Tangga dengan Tingkat Kesejahteraan 40% Terbawah Tahun 2017

No.	Jenis Penyakit	Jumlah	Proporsi (%)
1	rematik	34.640	35,65
2	hipertensi	23.377	24,06
3	asma	11.684	12,03
4	gagal ginjal, flek paru-paru	11.372	11,70
5	stroke	6.198	6,38



6	diabetes	3.573	3,68
7	gangguan jantung	3.066	3,16
8	tuberculosis	1.769	1,82
9	kanker/tumor	1.485	1,53
Total		97.164	100,00

Sumber: TNP2K, diolah



Gambar 1.6 Jumlah Penduduk dengan Penyakit Kronis dari Kelompok Rumah Tangga dengann Tingkat Kesejahteraan 40% Terbawah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

Sumber: TNP2K

Tabel 1.3
Sebaran Penduduk Mengeluh Sakit dan Terganggu Sakit di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur (tahun)	Mengeluh sakit (%)				Terganggu oleh sakit (%)			
	2017	2018	2019	Rerata	2017	2018	2019	Rerata
60+	48.91	51.28	51.08	50.42	26.72	25.99	26.2	26.30
55-59	40.04	43.4	43.08	42.17	20.15	19.11	19.96	19.74
50-54	35.87	37.95	39.31	37.71	17.23	16.15	17.25	16.88
45-49	31.13	33.79	34.17	33.03	14.08	13.63	14.21	13.97
40-44	27.57	29.19	29.38	28.71	12.35	11.33	12.12	11.93
35-39	24.18	25.54	24.86	24.86	10.55	10.13	10.13	10.27
30-34	22.22	23.22	22.68	22.71	9.65	8.87	9.33	9.28

25-29	19.3	21.07	23.12	21.16	8.19	7.78	9.18	8.38
20-24	17.62	19.25	19.98	18.95	7.42	7.03	7.97	7.47
15-19	18.16	19.85	21.62	19.88	8.71	8.39	9.72	8.94
10-14	21.75	23.01	26.06	23.61	11.75	11.02	13.74	12.17
5-9	30.43	33.86	38.06	34.12	17.92	18.16	21.89	19.32
0-4	39.57	44.33	47.87	43.92	21.99	22.5	25.99	23.49

Berdasarkan wilayah sebaran (dari Gambar 1.6 di atas) maka Kabupaten/Kota yang berada di posisi ke arah pantai timur Pulau Sumatera memiliki jumlah penderita penyakit kronis terbanyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang berada di posisi lainnya. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut apakah ada kaitan antara penyakit kronis yang di derita dengan karakteristik wilayah tersebut yang memiliki kawasan pasang surut dan bergambut. Namun, penelitian Novriadhy (2020) di Muara Enim menunjukkan ada potensi dampak tidak langsung antara kualitas air yang diminum dengan stroke dan rematik.

Hal lain yang perlu dicermati dari Gambar 1.6 adalah tiga kabupaten yang memiliki jumlah penderita penyakit kronis terbanyak juga merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan demikian kondisi tersebut memberikan kesulitan tersendiri dalam hal pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19.

1.3.3 Kunjungan Wisatawan

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang mengunjungi Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2019 tercatat 15.846 orang, meningkat sebesar 14,31% dibandingkan dengan tahun 2018. Proporsi wisman Malaysia mencapai 55,64% (8.816 orang), wisman Singapura dalam kisaran 11,03% (1.748 orang) dan wisman Tiongkok sebesar 3,40% (548 orang). Setiap wisman diyakini memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Sumatera Selatan, namun penambahan jumlahnya dapat dianggap relatif tidak dominan mempengaruhi pertumbuhan dikarenakan tidak diikuti dengan kenaikan atau setidaknya jumlah



hari LMA yang sama dengan tahun 2018. Rerata lama menginap wisman (LMA) di tahun 2019 yang mencapai 3,82 hari diketahui menurun dibandingkan tahun sebelumnya 4,25 hari. Penurunan rerata LMA dapat dipahami dikarenakan pada tahun 2018 dilaksanakan Asian Games XVIII. Di sisi lain, rerata lama menginap wisatawan domestik (LMD) sebaliknya mengalami peningkatan dari 1,64 hari menjadi 1,98 hari (BPS Sumatera Selatan, 2018;2019).

Berdasarkan angka absolut di periode 2018-2019, jumlah wisman Malaysia meningkat 999 orang, wisman Singapura menurun 866 orang dan wisman Tiongkok menurun 10 orang. Selisih agregat jumlah wisman dari ketiga negara tersebut sebesar 123 orang. Namun demikian, proporsi wisman dari ketiga negara tersebut di 2019 mencakup 70,06% dari total wisman. Dengan demikian penurunan wisman dari ketiga negara tersebut akan berdampak cukup berarti terhadap pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berasal dari faktor luar tetapi secara keseluruhan efeknya diduga kecil. Hal ini didasari bahwa jumlah hari okupansi kamar per tahun dari wisman hanya sekitar 1,57% dari keseluruhan 631.133 hari okupansi per tahun. Pun demikian, efek penurunan jumlah wisman diperkirakan mempengaruhi lapangan usaha Transportasi dan Industri pengolahan namun pembahasannya diluar lingkup kajian ini.

Berdasarkan sub-kategori penyusunnya, pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum lebih cenderung didorong oleh sub-kategori Makan Minum dibandingkan Penyediaan Akomodasi (15,53% vs 14,03%) (BPS Sumatera Selatan, 2020a). Hal ini juga tergambarkan dari tingkat penghunian kamar (TPK) 2019 yang lebih kecil dari 2018 (52,79% vs 59,30%) (BPS Sumatera Selatan, 2018;2019). Oleh karena itu secara sederhana dapat diasumsikan pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Sumatera Selatan di dorong oleh faktor penyediaan Akomodasi wisatawan domestik dan konsumsi Makan Minum dalam negeri. Pada triwulan I tahun 2020 diketahui lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 2,35%

lebih kecil dibandingkan pertumbuhan triwulan IV tahun 2019 (2,43%) namun lebih besar apabila dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 (2,06%) (BPS Sumatera Selatan, 2020b). Artinya Covid-19 secara *y-to-y* belum berdampak negatif terhadap lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Sumatera Selatan dikarenakan kasus Covid-19 baru mulai merebak di pertengahan Maret 2020 dan diperkirakan berdampak secara langsung setelah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.

1.4. Mitigasi Dampak Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan

Mengacu kepada wabah virus sebelumnya, Avian Flu (H5N1) 2003 diketahui tidak berdampak signifikan terhadap permintaan pariwisata Indonesia meskipun secara nyata terdapat 72 kasus positif dengan kematian pasien sebanyak 55 orang (Kuo et al., 2008). Persepsi bahaya SARS dan Avian Flu (H5N1) juga diketahui tidak mempengaruhi minat wisatawan berusia lanjut untuk melakukan perjalanan wisata (Lee & Chen, 2011). Dampak wabah virus terhadap pariwisata pada akhirnya dipengaruhi oleh tingkat mortalitas yang terjadi (McAleer et al., 2010). Meskipun terlalu dini untuk menilai tingkat mortalitas Covid-19 tetapi diperkirakan relatif lebih kecil dibandingkan SARS dan MERS yang mencapai 9,6% dan 34% (worldometer, 2020). Apabila respon calon wisatawan ke terhadap pandemi Covid-19 serupa dengan respon terhadap Avian Flu dan SARS maka dapat diharapkan jumlah wisatawan ke Sumatera Selatan akan dapat segera pulih seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19. Menerapkan protokol kesehatan secara massif di fasilitas penyediaan akomodasi dan makan minum diduga akan meningkatkan rasa aman bagi para calon wisatawan baik dari mancanegara maupun domestik yang diharapkan akan mempercepat pemulihan ekonomi di sektor lapangan usaha ini. Langkah pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alih-alih *lockdown* merupakan langkah yang tepat meskipun langkah tersebut dapat diperdebatkan keefektifannya. Secara empirik, penerapan PSBB transisi yang membolehkan aparaturnegeri sipil untuk melakukan perjalanan dinas juga akan



memberikan dampak terhadap tingkat hunian hotel dan rasa aman di masyarakat untuk melakukan aktivitas usaha ataupun perjalanan bisnis.

Pandemi Covid-19 juga memberikan peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk memasok kebutuhan barang yang selama ini bergantung dari impor dan di sisi lain juga memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mendorong dunia usaha dalam negeri untuk mencoba menggunakan komponen produk dalam negeri. Artinya pemerintah perlu memfasilitasi terjadinya pemenuhan supply-demand dari sesama pelaku usaha lokal. Apabila langkah ini berhasil maka selain menghemat devisa juga berdampak terhadap pertumbuhan serapan tenaga kerja. Hanya saja perlu dilakukan upaya yang dapat mempertahankan daya beli masyarakat untuk menyerap produksi yang dihasilkan. Dengan kata lain, mensubstitusi pasar ekspor dengan pasar domestik. Insentif bantuan tunai bagi penduduk yang terkena dampak pandemi Covid-19 sebagaimana dilakukan oleh pemerintah adalah sebuah keharusan.

Mencermati sisi kesehatan penduduk, pemangku kepentingan secara luas (pemerintah, lembaga nirlaba, masyarakat, dan lain sebagainya) selain perlu memastikan penerapan protokol kesehatan diterapkan dengan benar juga perlu memastikan ketersediaan alat pelindung diri dan rasio jumlah tenaga kesehatan yang ada terhadap jumlah penduduk yang memiliki risiko tinggi menderita Covid-19. Pengendalian penyakit kronis bawaan yang diketahui meningkatkan fatalitas Covid-19 perlu dilakukan dengan lebih komprehensif. Perubahan pelayanan kesehatan dengan pengantaran obat yang dibutuhkan, alih-alih penderita yang mengambalnya dengan cara mendatangi fasilitas kesehatan dirasakan akan lebih bermanfaat dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

1.5. Penutup

Covid-19 secara langsung berdampak terhadap perekonomian diakibatkan terganggunya aliran barang dan jasa. Efek negatif Covid-19 terhadap perekonomian provinsi Sumatera Selatan dapat diminimalisir apabila terdapat kesiapan dari seluruh pemangku

kepentingan untuk menerapkan protokol kesehatan. Populasi provinsi Sumatera Selatan yang masuk kategori rentan relatif tinggi sehingga diperlukan penyesuaian pelayanan kesehatan. Pemulihan perkonomian sebaiknya dilakukan melalui sektor akomodasi dan makan-minum sehingga perputaran ekonomi dapat langsung menjangkau masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik.
- BPS Sumatera Selatan. (2018). *Kumpulan Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2018*. BPS Sumatera Selatan.
- BPS Sumatera Selatan. (2019). *Kumpulan Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2019*. BPS Sumatera Selatan.
- BPS Sumatera Selatan. (2020a). *Distribusi Persentase PDRB ADHB per Sub Kategori Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2015-2019*. <https://sumsel.bps.go.id/>
- BPS Sumatera Selatan. (2020b). Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I-2020. In *Berita Resmi Statistik*. BPS Sumatera Selatan. <https://sumsel.bps.go.id/>
- Callen, T. (2020). *Gross Domestic Product: An Economy's All*. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/gdp.htm>
- Feng, Z., Li, Q., Zhang, Y., Wu, Z., Dong, X., Ma, H., Yin, D., Lyu, K., Wang, D., Zhou, L., Ren, R., Li, C., Wang, Y., Ni, D., Zhao, J., Li, B., Wang, R., Niu, Y., Wang, X., ... McGoogan, J. M. (2020). The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19). *China CDC Weekly*, 2(8).
- Kuo, H.-I., Chen, C.-C., Tseng, W.-C., Ju, L.-F., & Huang, B.-W. (2008). Assessing impacts of SARS and Avian Flu on international tourism demand to Asia. *Tourism Management*, 29(5), 917–928. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.10.006>
- Lee, C.-C., & Chen, C.-J. (2011). The reaction of elderly Asian tourists to avian influenza and SARS. *Tourism Management*, 32(6), 1421–1422. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.12.009>



- Lin, Q., Zhao, S., Gao, D., Lou, Y., Yang, S., Musa, S. S., Wang, M. H., Cai, Y., Wang, W., Yang, L., & He, D. (2020). A conceptual model for the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in Wuhan, China with individual reaction and governmental action. *International Journal of Infectious Diseases*, 93(February), 211–216. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.058>
- McAleer, M., Huang, B.-W., Kuo, H.-I., Chen, C.-C., & Chang, C.-L. (2010). An econometric analysis of SARS and Avian Flu on international tourist arrivals to Asia. *Environmental Modelling & Software*, 25(1), 100–106. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2009.07.015>
- Novriady, D. (2020). Kualitas Air Bersih dan Potensi Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 19(1), 35–44. <https://doi.org/10.22435/jek.v19i1.2360>
- OECD. (2020). *Gross domestic product (GDP) (indicator)*. <https://doi.org/10.1787/dc2f7aec-en>
- Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. *Journal of Autoimmunity*, 102433. <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433>
- Syed, A. A. S. G., & Shaikh, F. M. (2013). Effects of Macroeconomic Variables on Gross Domestic Product (GDP) in Pakistan. *Procedia Economics and Finance*, 5, 703–711. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(13\)00082-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00082-8)
- Tian, S., Hu, N., Lou, J., Chen, K., Kang, X., Xiang, Z., Chen, H., Wang, D., Liu, N., Liu, D., Chen, G., Zhang, Y., Li, D., Li, J., Lian, H., Niu, S., Zhang, L., & Zhang, J. (2020). Characteristics of COVID-19 infection in Beijing. *Journal of Infection*. <https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.02.018>
- WHO. (2009). *WHO guide to identifying the economic consequences of disease and injury*.
- WHO. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19) outbreak*. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- worldometer. (2020). *Coronavirus (COVID-19) Mortality Rate*. <https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/#comparison>



Bab 2

POTENSI DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI SDM DI SUMATERA SELATAN

Sari Lestari Zainal Ridho

Abstrak

Penyebaran Covid-19 merupakan pandemi yang berbiaya dan berpotensi memiliki dampak langsung maupun tidak langsung bagi sumber daya manusia. Hal ini disebabkan pembangunan manusia yang seharusnya terjadi dalam tiga hal mendasar berupa usia yang panjang, pengetahuan dan kehidupan yang layak dipengaruhi oleh sakit dan kematian yang terjadi akibat pandemi Covid-19 tersebut. Sakit dan kematian tersebut berpotensi menimbulkan disrupsi dalam sektor publik maupun non publik memunculkan keadaan berkurangnya upah/pendapatan yang diperoleh sehingga berujung pada peningkatan jumlah kemiskinan.

Kata kunci: pandemi, SDM, upah, kemiskinan

Abstract

The spread of Covid-19 is a costly pandemic and can have direct or indirect impacts on human resources. It is due to human development, which should occur in three basic terms, long life, knowledge, and valuable life, which is affected by the illness and death that occurred due to the Covid-19 pandemic. These illnesses and deaths can potentially disrupt the public and non-public sectors,



creating a state of reduced wages/income earned, leading to an increase in poverty.

Keywords: *pandemic, human resources, wages, poverty*

2.1 Pendahuluan

Wabah *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) di berbagai belahan dunia dapat mengganggu proses pembangunan termasuk pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pandemi Covid-19 tidak saja menyebabkan adanya harga yang harus dibayar masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan yang berpengaruh terhadap perpanjangan usia, pengetahuan dan kehidupan layak yang ingin dicapai (McGilivray, 1991; Blancard & Hoarau, 2012; Karagiannis & Karagiannis, 2019; Campoli, 2019).

Kemunculan pandemi Covid-19 menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Di Provinsi Sumatera Selatan, penyebaran Covid-19 menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Jumlah kasus positif pada tanggal 1 April 2020 sebanyak 5 orang, namun di penghujung bulan meningkat menjadi 150 orang (<https://dinkes.sumselprov.go.id/2020/04/update-covid-19-sumsel-12-april-2020/>)

Covid-19 menimbulkan biaya dan potensi dampak bagi SDM melalui resiko sakit dan kematian. Beban biaya ini tidak saja ditanggung individu tetapi juga ditanggung negara. Sedangkan bagi SDM akan mempengaruhi pada tiga hal yakni lamanya masa hidup seseorang, pengetahuan yang dimiliki dan kecukupan kebutuhan hidup layak. Ketiga hal ini akan mengakibatkan naiknya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang harus dikeluarkan selama perawatan sampai biaya kematian. Biaya tidak langsung adalah waktu produktif yang berkurang bahkan hilang karena sakit dan kematian yang dialami, dan juga melibatkan waktu produktif dari orang yang harus merawat keluarganya yang sakit.

Biaya yang harus dikeluarkan berpotensi menimbulkan pengaruh langsung terhadap pendanaan sektor kesehatan dan berpotensi pada pengurangan pendanaan pada sektor lainnya, seperti pengurangan insentif yang biasanya diberikan pada kondisi normal. Hal ini akan mengurangi pendapatan individu/masyarakat. Akibat lebih lanjut, berpotensi pada perubahan perilaku berkonsumsi masyarakat. Wujud dari perubahan perilaku masyarakat tercermin dari perubahan perilaku berkonsumsi yang turun drastis selama Covid-19. Jika tidak ditangani bersama dengan baik antara masyarakat dan pemerintah, akan memicu timbulnya kluster kemiskinan baru.

2.2 Perkembangan Pandemi Covid-19 di Sumatera Selatan

Situasi perkembangan pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan selama bulan April 2020 dilihat dari (a) Orang Dalam Pemantauan (ODP), (b) Pasien Dalam Pengawasan (PDP), (c) Kasus positif, (d) Kasus sembuh, serta (e) Kematian. Data menunjukkan jumlah ODP cukup tinggi dengan tren yang meningkat, sedangkan jumlah PDP, kasus positif, sembuh dan meninggal juga meningkat meski dengan jumlah yang berbeda-beda.

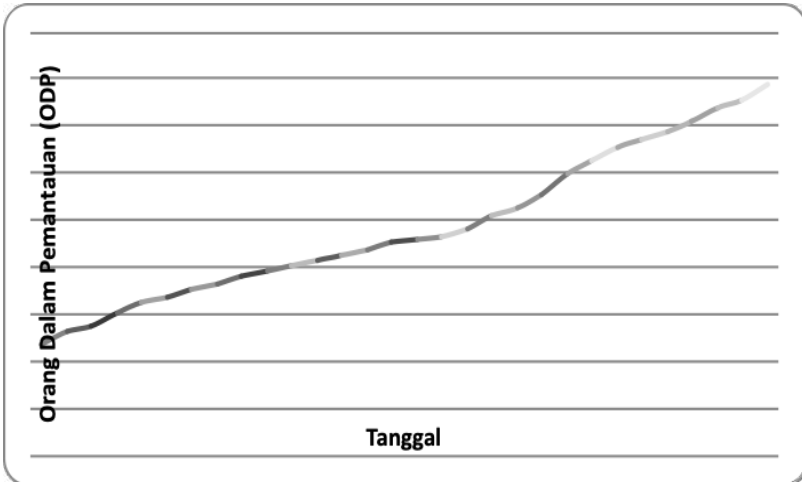
2.2.1 ODP (Orang Dalam Pemantauan)

Menurut definisi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020) yang dimaksud dengan ODP adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam, batuk atau pilek, memiliki riwayat perjalanan ke negara yang memiliki transmisi lokal Covid-19, tinggal di wilayah dengan transmisi lokal di Indonesia dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, namun memiliki riwayat kontak dengan orang positif Covid-19. *a memiliki salah satu dari di*

Gambar 2.1 menunjukkan situasi perkembangan jumlah ODP yang cukup tinggi di Sumatera Selatan selama bulan April 2020. Diawali dengan jumlah 1182 orang pada tanggal 1 April 2020 kemudian dalam kurun waktu 10 hari jumlah tersebut telah mencapai 2020 orang. Dengan kata lain mengalami peningkatan hampir 100%. Pada akhir bulan April 2020, jumlah ODP di Sumatera Selatan telah



mencapai angka 3930 orang. Tren yang terus meningkat selama bulan April menunjukkan adanya kenaikan rata-rata sebanyak 95 ODP selama bulan tersebut.



**Gambar 2.1 Perkembangan ODP Covid-19
Provinsi Sumatera Selatan, April 2020**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2020

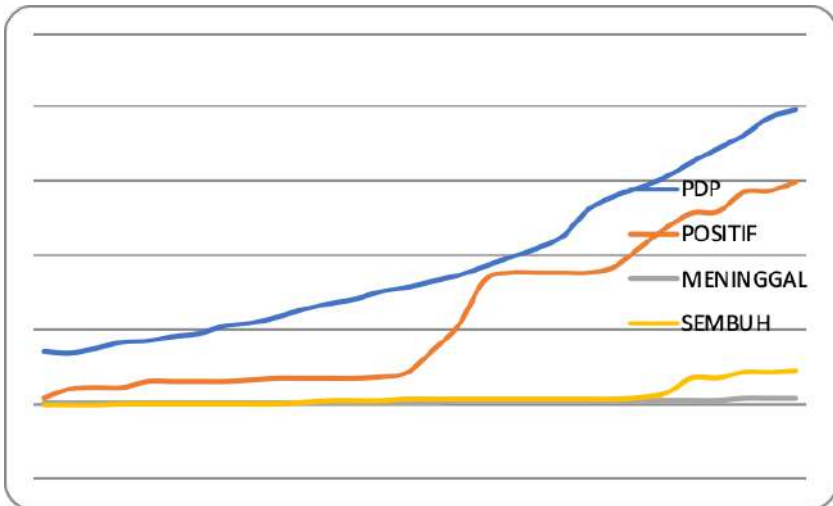
2.2.2 PDP, Kasus Konfirmasi (Positif), Meninggal dan Sembuh

Menurut definisi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020), PDP adalah:

- a) Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.

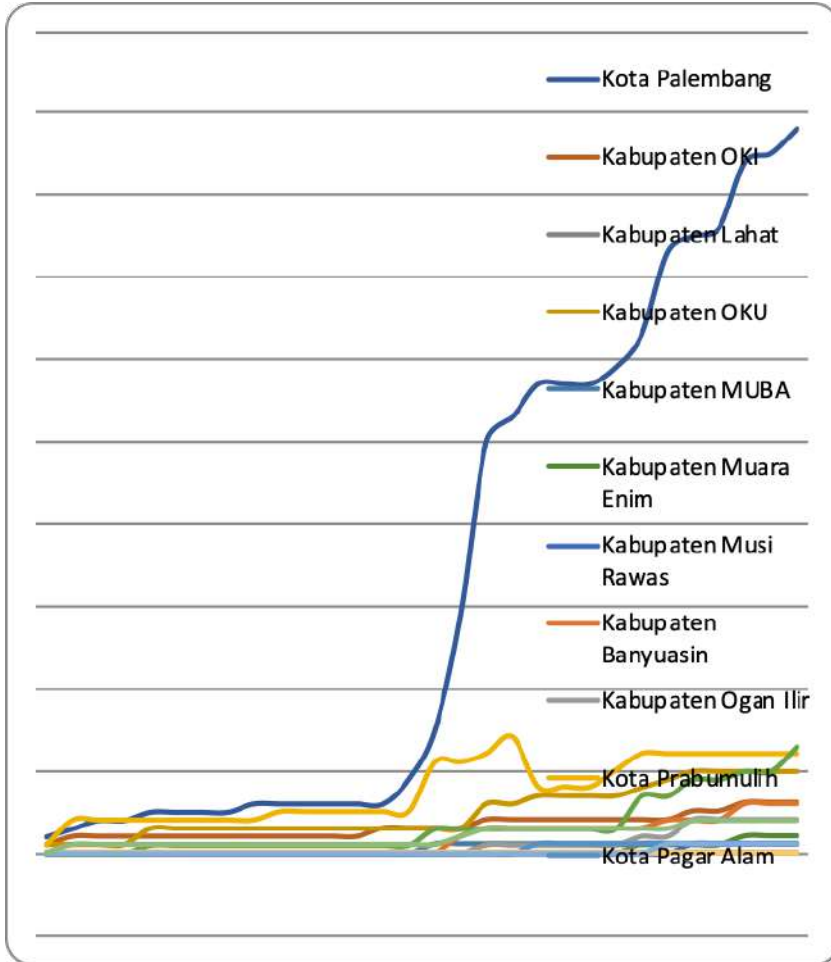
- b) Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
- c) Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Gambar 2.2 memberikan informasi tren yang cenderung meningkat dari perkembangan bagi semua kasus: kasus PDP, kasus konfirmasi (positif), meninggal dan sembuh meskipun dengan jumlah yang berbeda-beda.



Gambar 2.2 Perkembangan Covid-19 untuk Kasus PDP, Konfirmasi, Meninggal dan Sembuh Provinsi Sumatera Selatan, April 2020
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2020

Kasus PDP menunjukkan adanya kenaikan dengan peningkatan yang konstan, dengan rata-rata peningkatan jumlah PDP perhari sebanyak 6 orang, walau sempat melonjak lebih/hampir 2 sampai 3 kali lipat pada akhir April 2020.



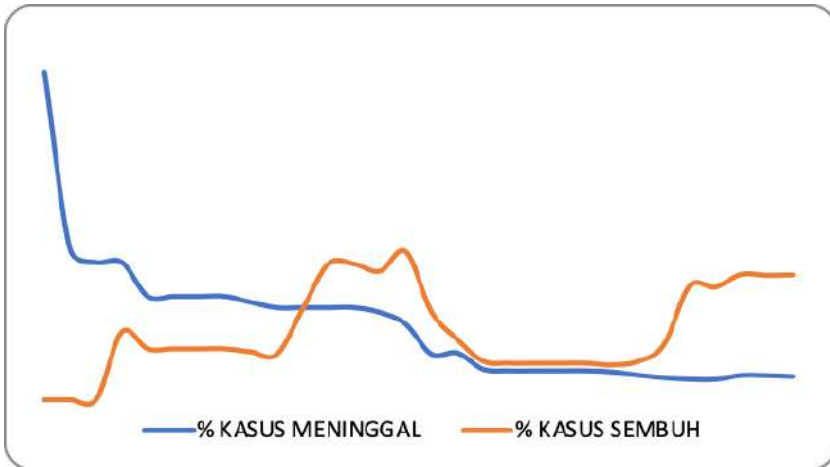
Gambar 2.3 Kasus Positif Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota, April 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2020

Kasus konfirmasi (positif) adalah pasien yang terinfeksi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan menunjukkan hasil tes positif melalui pemeriksaan PCR/polymerase chain reaction. Gambar 2.3 menunjukkan tren yang meningkat meskipun dengan laju yang fluktuatif. Sebelum tanggal 15 April gambar menunjukkan situasi yang melandai, namun kemudian meningkat tajam sampai dengan tanggal 18 April, dan mencapai puncak pada tanggal 23-26 April.

Meskipun laju pertumbuhannya turun naik dan sempat mereda, namun jumlah kasus positif tidak dapat diremehkan, karena perubahan dari tanggal 1 April hingga 30 April 2020, menunjukkan peningkatan sebesar 3000%, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kota Palembang.

Kasus kematian menunjukkan jumlah yang lebih sedikit dan ditunjukkan dengan grafik yang melandai, meskipun terjadi kecenderungan meningkat (lihat Gambar 2.4). Di sisi lain jumlah kesembuhan terus meningkat lebih banyak daripada jumlah kematian. Kondisi ini seharusnya dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat. Namun demikian, rasa khawatir masih terjadi yang disebabkan terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kasus positif dan kasus yang sembuh. Selama bulan April 2020 rata-rata kasus positif adalah sebesar 62 kasus, rata-rata meninggal 2 kasus, dan sembuh 5 kasus.



Gambar 2.4. Persentase Kasus Meninggal dan Sembuh Covid-19 Provinsi Sumatera Selatan, April 2020

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, 2020

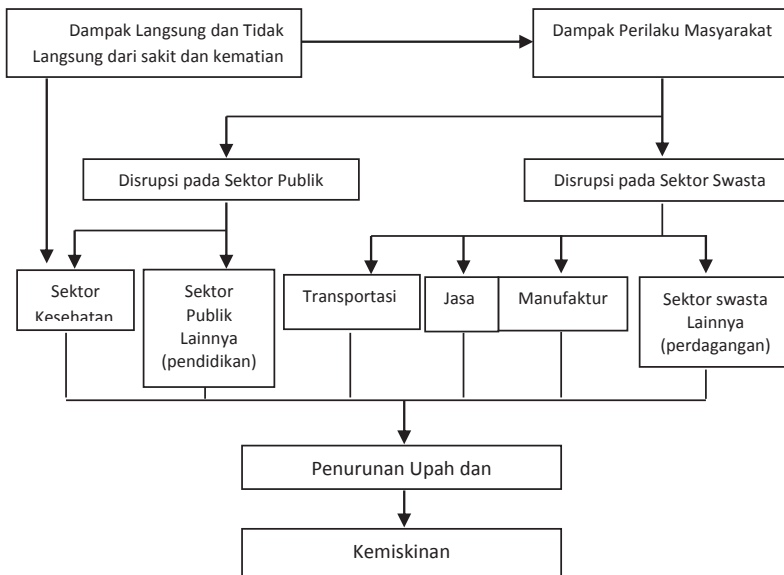
Kekhawatiran ini merupakan kondisi psikologis yang timbul sebagai akibat adanya sakit dan kematian karena pandemi Covid-19. Menurut Dewi & Ridho (2013) kekhawatiran ini dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat dalam konsumsi barang dan jasa di sektor publik dan sektor swasta.

2.3 Potensi Dampak Pandemi Covid-19

Resiko sakit dan kematian bagi ODP dan PDP dan juga bagi orang-orang yang belum terdeteksi, memungkinkan individu tidak memiliki usia yang panjang. Jika yang terkena pandemi ini penanggung jawab ekonomi keluarga, memungkinkan tidak terpenuhinya standar kehidupan yang seharusnya dijalani anggota keluarga secara layak.

Biaya yang muncul atau harus dibayar akibat terjadinya Covid-19 meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya dan potensi dampak pandemi ditampilkan pada Gambar 2.5. Diawali dari biaya yang ditimbulkan oleh wabah, kemudian dengan potensi dampak langsung dan tidak langsung, dan dilanjutkan dengan permasalahan yang menjadi akhir dari dampak.



Gambar 2.5. Potensi Dampak Pandemi

Sumber: IBRD, The World Bank, 2014.

Kekhawatiran dampak perubahan perilaku masyarakat berpotensi menimbulkan disrupsi baik di sektor publik maupun di

sektor swasta. Seperti menurunnya aktivitas perdagangan di pusat perbelanjaan, menurunnya jumlah perjalanan melalui jalur darat, laut dan udara, mengurangi pemakaian transportasi umum, mengurangi penggunaan jasa dan mengurangi transaksi perdagangan.

Kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak menetapkan penutupan penerbangan dari luar negara, menambah kekhawatiran baru bahwa penyebaran virus akan susah diatasi dengan segera. Melalui kebijakan ini, sebenarnya pemerintah ingin mengamankan kegiatan ekonomi agar tetap eksis (tidak 'lumpuh'). Padahal negara lain telah menutup berbagai penerbangan baik masuk ataupun keluar Negara. Berbeda dengan kebijakan di atas yang membuka peluang adanya interaksi antar manusia, pemerintah dalam bidang pendidikan menetapkan kebijakan '*social distancing*' dengan cara melakukan proses belajar mengajar dari rumah. Kebijakan ini dengan sendirinya mengurangi pilihan penggunaan jasa transportasi, dan jasa perdagangan yang berada di sekitar fasilitas pendidikan. Dampak lebih lanjut adalah pengurangan perputaran uang, berkurangnya pendapatan masyarakat dan diprediksi akan menimbulkan peningkatan jumlah penduduk miskin baru sebagai dampak dari Covid-19 (Agustin, 2020).

Selanjutnya, untuk mengatasi disrupsi baik di sektor publik maupun di sektor swasta yang berimbas pada potensi peningkatan jumlah kemiskinan, pemerintah (pusat dan daerah) telah mengambil kebijakan diantaranya adalah memastikan ketersediaan sembilan bahan kebutuhan pokok dan memberi insentif ekonomi, serta meminta kepala daerah melakukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Ketersediaan sembilan bahan pokok, dapat dilakukan melalui dua hal:

- a) Disediakan langsung oleh pemerintah

Hal ini sebagaimana telah dengan sigap ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti dalam memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan penyaluran bantuan. Hanya saja



perlu dilanjutkan dengan kebijakan pengawasan untuk menghindari permasalahan permasalahan yang seringkali terjadi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat, seperti rumitnya birokrasi, tidak sampainya bantuan atau penyaluran yang kurang tepat sasaran.

- b) Disediakan sendiri oleh masyarakat dengan bantuan pemerintah

Pelaksanaan kebijakan ini adalah melalui program membantu masyarakat untuk berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri dalam menyediakan kebutuhan pokoknya, melalui penciptaan lapangan pekerjaan pengganti ditengah pandemi ini, di mana banyak pekerja terutama sektor informal yang kehilangan pekerjaannya.

Pemberian insentif ekonomi bagi penduduk yang kehilangan pekerjaan/pendapatan selama pandemi Covid-19 dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mencegah munculnya masyarakat miskin baru yang sejatinya tak terhindarkan selama Covid-19 juga dilakukan oleh banyak negara, termasuk Pakistan, yakni pemberian pekerjaan-pekerjaan perbaikan lingkungan, sebagai upaya memperbaiki kondisi fisik lingkungan yang bisa menimbulkan bahaya bencana alam. Pemberian insentif berupa pekerjaan tentu dengan tetap mengindahkan kaidah-kaidah pencegahan penyebaran virus (Khan, 2020). Pemberian insentif ekonomi merupakan salah satu cara mencegah munculnya kemiskinan baru

2.4 Penutup

Pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia telah mengganggu proses pembangunan termasuk pembangunan sumber daya manusia (SDM), mendisrupsi sektor publik maupun sektor swasta. Program dari setiap negara terfokus pada berbagai langkah untuk mengatasi pandemi ini. Kejadian ini tidak hanya menyebabkan adanya harga yang harus dibayar masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan yang berpengaruh

terhadap perpanjangan usia, pengetahuan dan kehidupan layak yang ingin dicapai. Selain itu juga memicu perubahan perilaku konsumen dan melemahkan penerimaan pendapatan, yang berujung pada perluasan kemiskinan.

Kebijakan pemerintah mencegah perluasan kemiskinan adalah menyalurkan bantuan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kehilangan pendapatan dengan pembayaran upah didanai oleh pemerintah. Kebijakan ini memerlukan pengawasan birokrasi yang ketat agar bantuan tepat sasaran, dan oleh karena itu penguatan pengawasan birokrasi menjadi keniscayaan. Birokrasi merupakan garda terdepan dalam pemberantasan pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, F.M. (2020). Warga Miskin Palembang Diprediksi Meningkat, Pemkot Wacanakan Hal ini: Program peningkatan kesejahteraan. <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/feny-agustin/warga-miskin-palembang-diprediksi-meningkat-pemkot-wacanakan-hal-ini/full>, diakses pada 04/05/2020
- Blancard, S. & Hoarau, J-F. (2013). A New Sustainable Human Development Indicator for Small Island Developing States: A Reappraisal from Data Development Analysis. *Economic Modelling*, Vol. 30: 623-635.
- Dewi, F. & Ridho, S.L.Z. (2013). *Perilaku Konsumen*. Citrabooks Indonesia. Palembang.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. (2020). Data Perkembangan Corona Virus Desease-19 Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- Evans, D. & M. Over. (2020). *The Economic Impact of Covid-19 in Low-and Middle- Income Countries, Center & Global Development*, <https://www.cgdev.org/blog/economic-impact-covid-19-low-and-middle-income-countries>, diakses pada tanggal 22/04/2020.



- Khan, R.A. (2020). COVID-19: Pakistan's green stimulus' scheme is a win-win for the environment and the unemployed. www.weforum.org/agenda/2020/04/green-stimulus-pakistan-trees-coronavirus-covidn10-environment-climate-change, diakses pada tanggal 03/05/2020.
- Karagiannis, R. & Karagiannis, G. (2019). Constructing Composite Indicators with Shannon Entropy: The Case of Human Development Index. *Socio-Economic Planning Sciences*, <https://doi.org/10.1016/j.seps.2019.03.007>, diakses pada tanggal 03/05/2020.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta
- McGilivray, M. (1991). The Human Development Index: Yet Another Redundant Composite Development Indicator? *World Development*, Vol. 19, Issue 10: 1461-1468.
- The International Bank for Development. (2014). *The Economic Impact of the 2014 Ebola Epidemic: Short- and Medium- Term Estimates for West Africa*. The International Bank for Development / The World Bank. Washington DC.
- Wu, C., & Buyya, R. (2015). Cost Modelling: Term and Definitions. *Cloud Data Centers and Cost Modelling*, 579-609, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801413-4.00014-3>, diakses pada tanggal 28/04/2020.



Bab 3

PANDEMI COVID-19 DAN PASAR KERJA PERTANIAN

Dessy Adriani dan Maryadi

Abstrak

Sebelum persoalan Covid-19 muncul ke permukaan sektor pertanian telah menghadapi segudang persoalan, produktifitas tenaga kerja yang rendah, *underemployment*, kapasitas produksi sektor pertanian sudah mencapai kondisi marjinal dimana penambahan input tenaga kerja justru akan menimbulkan inefisiensi. Persoalan Covid-19 sejatinya akan membuat keadaan bertambah buruk. Tetapi sungguh yang terjadi adalah sebuah anomali. Sampai saat ini, sektor pertanian justru adalah salah satu sektor yang masih mampu bertahan. Kemampaun sektor pertanian untuk menyerap tenaga kerja yang terpaksa berhenti atau diberhentikan dari sektor non pertanian, sungguh patut mendapat apresiasi. Namun, di atas apresiasi tersebut, catatan penting tetap harus diperhatikan. Ada dua pertimbangan ekstra yang membuat urgensi sektor pertanian lebih tinggi. Pertama, perdagangan internasional, termasuk sektor pertanian, sedang terganggu. Ini membuat sistem produksi pertanian dalam negeri menjadi krusial. Kita harus menghindari krisis Covid-19 berubah menjadi krisis pangan. Urgensi yang kedua adalah kemiskinan yang intensitasnya tinggi di pedesaan. Mempertahankan aktivitas ekonomi di pedesaan menjadi relevan agar peningkatan angka kemiskinan tahun ini dapat



diredam. Covid-19 akan berdampak luas pada hasil pasar kerja kerja. Di luar kekhawatiran mendesak tentang kesehatan pekerja dan keluarga mereka, virus dan guncangan ekonomi selanjutnya akan berdampak pada dunia kerja di dua dimensi utama: 1) Jumlah pekerjaan (baik pengangguran dan setengah pengangguran), dan 2) Kualitas pekerjaan (mis. Upah dan akses ke perlindungan sosial). Diperlukan konsep 4 H (*Heads, Hand, Heart, Health*) untuk membangun SDM pertanian sejahtera. Secara eksternal diperlukan serangkaian kebijakan pemerintah dan secara internal, SDM pertanian diminta untuk melakukan adaptasi perilaku.

Kata kunci: pandemi Covid-19, pasar kerja pertanian, kemiskinan

Abstract

Before the Covid-19 issue surfaced, the agricultural sector had faced a myriad of problems, low labor productivity, underemployment, the production capacity of the farming sector had reached a marginal condition where additional labor input would cause inefficiency. The Covid-19 issue will make things worse. But really, what happened was an anomaly. Until now, the agricultural sector is one of the sectors that has been able to survive. The ability of the farming sector to absorb workers who are forced to quit or are dismissed from the non-agricultural sector deserves appreciation. However, above this appreciation, must pay significant notes attention. Two extra considerations the urgency of the agricultural sector higher. First, international trade, including the agricultural industry, is being disrupted. It makes the domestic agricultural production system crucial. We must avoid the Covid-19 crisis turning into a food crisis. The second urgency is poverty which is high in rural areas. Maintaining economic activity in rural areas is relevant to reduce the increase in the poverty rate this year. Covid-19 will have a broad impact on labor market outcomes. Beyond urgent concerns about the health of workers and their families, the virus and subsequent economic shocks will impact the world of work in three main dimensions: 1) Number of jobs (both unemployed and underemployed), and 2) Quality of work e.g.wages and access to

social protection). It takes the 4 H concept (Heads, Hand, Heart, Health) to build a prosperous agricultural, human resource. Externally, a series of government policies are needed, and internally, agricultural, human resources are asked to adapt behavior.

Keywords: Covid-19 pandemic, agricultural labor market, Poverty

3.1 Pasar Kerja Pertanian: Sebuah Gambaran Umum

Pertanian adalah sektor yang mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja di Indonesia yang pada tahun 2017 menyerap 31,86 persen dan pada tahun 2018 menurun menjadi 30,46 persen. Meskipun proporsinya menurun, sektor pertanian masih menjadi andalan bagi tenaga kerja untuk bekerja. Salah satu penyebab menurunnya angkatan kerja di sektor pertanian karena adanya transformasi ekonomi yang menyebabkan tenaga kerja di sektor pertanian beralih ke sektor lain.

Pembangunan di negara berkembang termasuk Indonesia seringkali secara tidak langsung mengorbankan pedesaan, sektor pertanian, dan ekonomi masyarakat secara umum. Dengan kata lain, proses pembangunan justru melahirkan persoalan disparitas dan ketidakadilan yang membebani sektor pertanian dan pedesaan. Tabel 3.1 selanjutnya menyajikan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 kontribusi sektor pertanian semakin lama semakin kecil dan dominasi sektor non pertanian semakin meningkat. Di sisi lain penyerapan tenaga kerja sektor pertanian masih cukup tinggi dibandingkan dengan sektor industri, tetapi masih di bawah sektor jasa. Untuk sektor pertanian, terjadi adanya ketidakseimbangan antara besarnya input tenaga kerja yang dapat diserap (30% - 32%) dengan output yang dihasilkan (16% - 17%). Sektor jasa berkontribusi 43%-44% dan sektor industri 39%-40%.



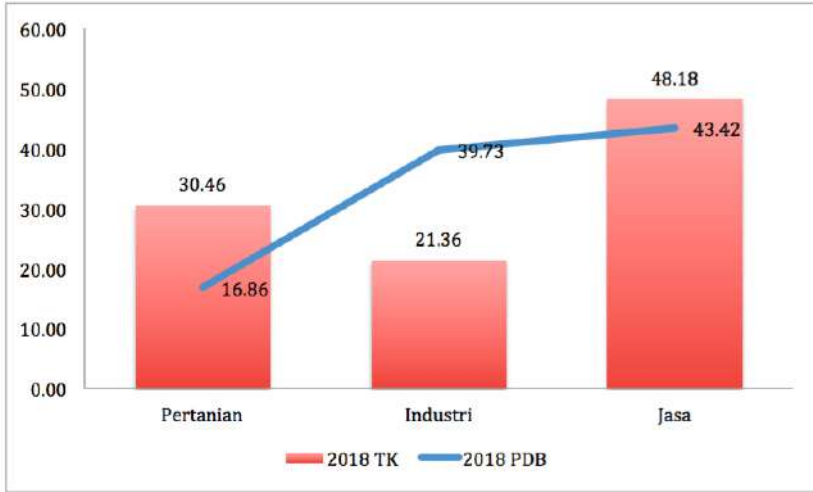
Tabel 3.1
Perbandingan Struktur Produk Domestik Bruto
dengan Kesempatan Kerja, 2016-2018

Kontribusi Sektor (%)	2016		2017		2018	
	PDB	TK	PDB	TK	PDB	TK
Pertanian	17.05	31.74	17.01	31.86	16.86	30.46
Industri	39.30	21.64	39.38	21.09	39.73	21.36
Jasa	43.65	46.62	43.61	47.04	43.42	48.18
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Statistik Indonesia. BPS. 2016-2018, Diolah.

Dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB hanya 16 % - 17%, penyerapan tenaga kerja tetap dijejali dengan tenaga kerja dalam jumlah cukup besar. Kelebihan tenaga kerja sektor pertanian juga merupakan beban bagi sektor pertanian, artinya produksi dan pendapatan sektor pertanian harus dibagi dengan jumlah orang yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan rendahnya produktifitas tenaga kerja pertanian, yang apabila tidak diantisipasi akan dapat menyebabkan pemiskinan dan eksploitasi sumberdaya manusia di sektor pertanian.

Gambar 3.1 menunjukkan ukuran yang paling nyata dari lemahnya pemaknaan dan praksis pembangunan yang telah berlangsung selama ini, yang hanya berfokus pada pembangunan kapitalistis, yang mendorong lahirnya pengangguran dan kemiskinan terutama di pertanian (pedesaan). Pembangunan kapitalis ditunjukkan oleh tingginya kontribusi sektor jasa dan industri dalam perekonomian, tetapi jumlah serapan tenaga kerja yang lebih sedikit. Dengan PDB 39,73 %, sektor industri hanya mampu menyerap tenaga kerja 21,36 %. Hal ini menunjukkan sektor industri lebih banyak menggunakan mesin (*capital intensive*) daripada tenaga kerja (*labor intensive*). Pada sektor jasa, dengan PDB 43,42% mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak yaitu sebesar 48,18%.



Gambar 3.1 Perbandingan Struktur Kontribusi Produk Domestik Bruto dengan Kesempatan Kerja Tahun 2018 (%)
Sumber : Statistik Indonesia. BPS. 2018, Diolah

Keteringgalan PDB sektor pertanian terhadap industri telah menjadi keniscayaan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini diindikasikan oleh masih banyaknya penduduk miskin sebesar 16,36 juta orang. Jumlah penduduk miskin ini hampir mencapai 13,10 persen dari total jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2018¹. Peningkatan penduduk miskin dikhawatirkan akan meningkatkan pengangguran akibat ketidaktersediaan kesempatan kerja. Menurut Cooper , 2005 dalam Siregar, H. (2006), fenomena ini disebut dengan *Fenomena Growth-Unemployment Puzzle* yang akan terjadi akibat angka pengangguran di Indonesia tidak diikuti dengan tersedianya kesempatan kerja yang memadai.

Tabel 3.2 menunjukkan jenis pengangguran di wilayah pedesaan dan perkotaan. Di wilayah pedesaan persentase setengah pengangguran lebih tinggi dibanding dengan wilayah perkotaan, sedangkan persentase tingkat pengangguran terbuka lebih kecil. Fenomena ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih bertindak sebagai katup pengaman dalam penyerapan tenaga kerja.

¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/angka-penduduk-miskin-terpangkas>



Tabel 3.2
Tingkat Pengangguran di Wilayah Pedesaan, 2016-2018

Tingkat Pengangguran (%)	2016	2017	2018
Pedesaan			
Tingkat Setengah Pengangguran	11.70	10.28	10.52
Tingkat Pengangguran Terbuka	4.93	4.51	4.01
Perkotaan			
Tingkat Setengah Pengangguran	5.08	4.91	4.28
Tingkat Pengangguran Terbuka	6.6	6.79	6.45

Sumber : Statistik Indonesia. BPS. 2016-2018. Diolah.

Seperti banyak tulisan lainnya yang menjelaskan mengenai terhambatnya transformasi struktural tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian, tidak hanya disebabkan karena sedikitnya lapangan kerja yang disediakan oleh sektor non pertanian tetapi disebabkan juga oleh tidak terpenuhinya kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan oleh sektor non pertanian (Adriani, 2012; Himpuni *et al.*, 2014). Rendahnya kualifikasi pekerja pertanian ini menyebabkan pekerja sektor pertanian lebih banyak diserap di sektor informal daripada sektor formal (Tabel 3.3). Kondisi ini berdampak pada tingkat upah yang diterima (Gambar 3.2).

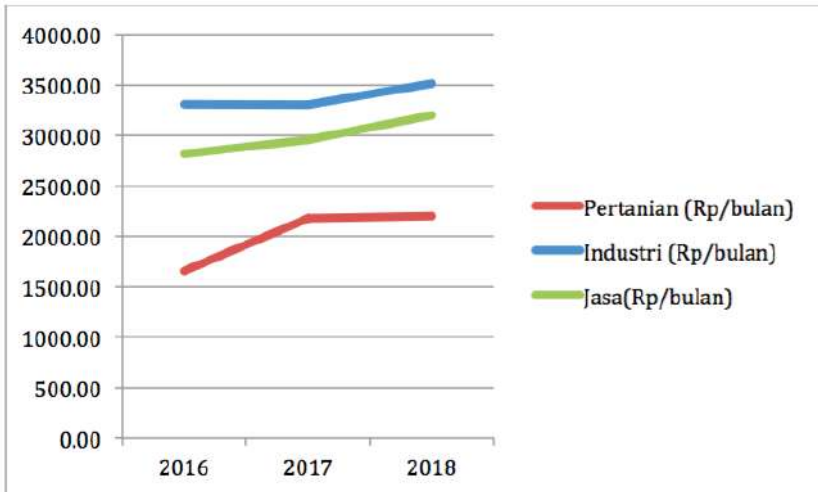
Dari sisi penawaran sebagian besar penduduk usia kerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan dan produktivitas yang relatif rendah. Hal ini tidak terlepas dari tingkat investasi pada sektor *human capital* yang tidak mampu memberikan hasil optimal. Rendahnya produktivitas tenaga kerja tidak lain disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan, karena jangkauan untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang baik, untuk memenuhi *basic needs* saja relatif sulit dilakukan.

Tabel 3.3
Tenaga Kerja Informal dan Formal Sektor Pertanian, 2016-2018

Kategori	Sektor Pertanian (%)		
	2016	2017	2018
Pekerja Informal	88.59	88.50	88.27
Pekerja Formal	11.41	11.50	11.73

Sumber : Statistik Indonesia. BPS. 2016-2018. Diolah

Dari sisi permintaan, kondisi ketenagakerjaan juga tidak memberikan gambaran yang menggembirakan. Kapasitas produksi sektor pertanian, misalnya, sudah mencapai kondisi marjinal dimana penambahan input tenaga kerja justru akan menimbulkan inefisiensi. Pada sektor modern, permintaan tenaga kerja yang jumlahnya lebih terbatas justru menuntut kemampuan dan kualifikasi yang relatif tinggi yang mana hampir tidak dapat dipenuhi oleh sebagian besar pencari kerja.



Gambar 3.2. Perbandingan Upah Sektoral, 2016-2018.

Sumber : Statistik Indonesia. BPS. 2016-2018, Diolah.

Pasar kerja pertanian di Indonesia masih memperlihatkan adanya berbagai persoalan baik pada sisi *supply* maupun pada sisi

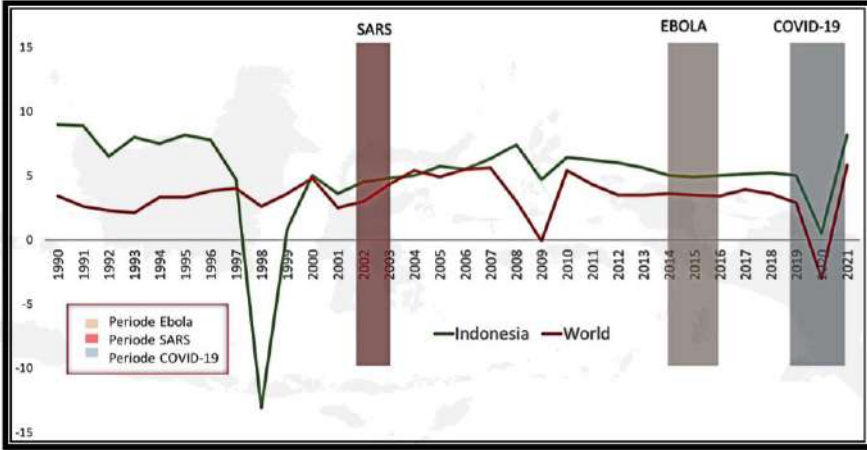


demand (Adriani, 2012; 2014). Penanggulangan persoalan kelebihan angkatan kerja di sektor pertanian tidak akan terselesaikan tanpa mengikutsertakan sektor non pertanian dalam analisis pemecahan masalah. Penanggulangan tersebut akan berhasil jika dibarengi dengan kebijakan pemerintah dan dukungan perubahan faktor eksternal lainnya. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilaksanakan untuk mendukung perbaikan di pasar tenaga kerja.

3.2 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Kerja Pertanian di Indonesia

Pandemi Covid-19, yang telah menginfeksi hampir 170.000 orang di 148 negara, mengakibatkan lebih dari 6.500 kematian. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa 40-70 persen populasi dunia dapat terinfeksi. Widyasanti (2020) menulis bahwa dampak Pandemi Covid-19 terhadap dunia jauh lebih buruk daripada Pandemi Virus SARs dan EBOLA yang pernah menjangkiti dunia di tahun-tahun sebelumnya seperti disajikan pada Gambar 3. 3.

Sejak wabah Covid-19 terus menyebar pada awal tahun 2020 di Indonesia, maka penting untuk melihat sejauh mana dampak yang ada dan yang mungkin terjadi pada sektor pertanian dan pasar kerja di sektor pertanian baik dari perspektif penawaran dan permintaan tenaga kerja. IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan “ambruk” di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan mencapai sekitar 0.5%, sementara SDGs Center memproyeksikan antara 1,0–1,8%. Pertumbuhan ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama beberapa tahun terakhir yang berada di kisaran 5%.



Gambar 3.3 Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Widyasanti. 2020. *The new Economy in The Aftermath Covid-19*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Disampaikan pada Acara FGD COVID-19 Aftermath Persatuan Insinyur Indonesia, 6 Mei 2020

Dalam beberapa analisis *outlook* ekonomi yang dilakukan, diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa turun lebih besar dari nasional menjadi antara -2,1% (skenario pesimis) dan 0,6% (skenario optimis). Sebagai dampak dari ini semua, beberapa program pembangunan seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM di Indonesia akan mengalami guncangan yang serius. Pengangguran diprediksi akan meningkat dari 8% di tahun 2019 menjadi 12% dalam skenario terparah ².

Dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dapat dilihat dari sisi pekerja, pengusaha dan usaha mandiri. Ngadi (2020) menyampaikan dampak Pandemi Covid-19 bagi:

- a) Bagi Pekerja, terjadinya gelombang PHK (15,6%) dan penurunan pendapatan (40%). Sebanyak 7% dari jumlah pekerja tersebut mengalami penurunan pendapatan hingga 50%.

² *SDGs Center Policy Brief* No.2/2020. Perspektif 2030. Strategi Ekonomi Sektor Pertanian di Tengah Pandemi Covid-19.



- b) Bagi Pengusaha, menyebabkan terhentinya kegiatan usahanya hingga 39,4%, dan 57,1% usaha mengalami penurunan produksi. Kemampuan bertahan di kalangan dunia usaha juga mengalami keterbatasan:
- Sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari tiga bulan. Artinya pada bulan Agustus usaha mereka akan berhenti;
 - Sebanyak 24% pengusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan;
 - 11% mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan; dan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan.
- c) Bagi usaha mandiri, 40% usaha terhenti, 52% mengalami penurunan produksi 35% tanpa pendapatan (35%); dan (c) dan 50% pendapatan menurun.

Lebih lanjut Ngadi (2020) menyatakan dampak Covid-19 juga berdampak pada pekerja bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau pekerja “serabutan” yang bekerja jika ada permintaan bekerja, dimana 55% tidak ada pekerjaan, dan 38% order berkurang. Dilihat dari pendapatan, sebanyak 58% pekerja bebas tidak memiliki pendapatan dan 28% dari pekerja bebas ini pendapatannya berkurang sampai 30%.

Analisis banyak kalangan menunjukkan krisis akibat pandemi Covid-19 telah berubah menjadi guncangan pasar ekonomi dan tenaga kerja, yang berdampak tidak hanya pada pasokan (produksi barang dan jasa) tetapi juga permintaan (konsumsi dan investasi). Gangguan pada produksi, kini telah menyebar ke rantai pasokan produksi di sektor pertanian (PH, L., Suwoso, 2020; Hanoatubun, S. (2020; Fahrika ., A. Ika dan J. Roy. 2020).

Bagi pelaku sektor pertanian yang terpapar virus dengan risiko rendah, perlu diberikan perhatian karena mereka adalah sektor penopang ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi isu penting selama masa pandemi, karena bertahan di tengah pandemi, bukan hanya sebatas bertahan hidup ditengah pandemi tapi juga masalah asupan gizi masyarakat. Di sinilah peran sektor pertanian dalam menjamin ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat di tengah pandemi. Kita tentu tidak ingin mengulang dampak krisis

moneter 1997/98 terhadap generasi milenial. Krisis moneter 1997/98 meninggalkan generasi yang mengalami stunting dan *malnutrition* yang cukup parah di kalangan anak-anak dan mempunyai dampak yang permanen (Yuliana, 2007; Irawan, P.B., dan Romdiati H. 2000). Oleh karenanya, jika diasumsikan situasi krisis moneter 1997/1998 diasumsikan sama dengan situasi ekonomi sama, maka kesalahan penanganan ketahanan pangan akan berdampak sama.

Kemampuan sektor pertanian dalam mendukung proses penanganan pandemic Covid-19 juga didukung oleh beberapa hasil riset. Hasil permodelan ekonomi menyatakan bahwa sektor manufaktur dan industri akan terkena imbas yang cukup parah dari Covid-19 ini, sedangkan sektor pertanian merupakan sektor yang terkena dampak paling kecil, seperti diungkap oleh Nursaiti (2020); Widuastutik *et al.*, (2020). Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan pada sektor pertanian relatif minimal, walaupun masih ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (*supply chain*) dan terpuruknya permintaan.

Hasil penelitian di atas juga didukung oleh hasil proyeksi dari the *Economist Intelligence Unit* (2020) untuk perekonomian Indonesia menyatakan bahwa pertumbuhan sektor pertanian akan mengalami penurunan sebanyak 0,9%, dari 4,1% menjadi 3,2%. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa pusat produksi pertanian bukanlah merupakan wilayah padat penduduk, sektor pertanian dan tenaga kerja pertanian secara alamiah tidak akan separah sektor lain ketika terjadi krisis Covid-19. Hal ini juga disebabkan sifat pertanian tanaman pangan yang elastisitas permintaannya rendah. Ketika ekonomi mengalami periode *booming*, permintaannya tidak akan meningkat pesat, demikian pula ketika terjadi resesi, permintaannya tidak akan menurun drastis.

Peran sektor pertanian sebagai sektor penyangga ekonomi (*buffer sector*) di masa krisis 1997/98 akan terulang kembali pada periode ini, di saat:

- a) Ketika semua bisnis menghadapi tantangan serius yang menyebabkan penurunan pendapatan secara signifikan;
- b) Ketika penutupan wilayah dan langkah-langkah karantina menyebabkan banyak pekerja tidak dapat melakukan



- pekerjaan mereka, terutama untuk pekerja informal dan pekerja sambilan;
- c) Ketika konsumen di banyak negara mengurangi atau bahkan berhenti melakukan pembelian barang dan jasa mengingat adanya ketidakpastian lingkungan;
 - d) Ketika perusahaan cenderung menunda investasi, pembelian barang, dan perekrutan pekerja;
 - e) Ketika mempertahankan operasi bisnis akan sangat sulit bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Maka, saat itulah sektor pertanian akan kembali hadir menjadi katup pengaman dan sebagai penyelamat dalam situasi krisis tersebut.

Ada dua pertimbangan yang perlu digunakan untuk membuat urgensi sektor pertanian lebih tinggi. Urgensi pertama, perdagangan internasional termasuk sektor pertanian sedang terganggu. Bahkan beberapa negara melakukan restriksi ekspor produk pertanian, seperti yang dilaporkan oleh WTO (Panjaitan *et al.*, 2020; *World Trade Organization*, 2018). Situasi ini membuat sistem produksi pertanian dalam negeri menjadi krusial. Karena itu harus dihindari krisis Covid-19 berubah menjadi krisis pangan. Urgensi kedua adalah kemiskinan yang intensitasnya tinggi di pedesaan. Mempertahankan aktivitas ekonomi di pedesaan menjadi relevan agar peningkatan angka kemiskinan tahun ini dapat diredam. Semua ini berdampak pada relevansi dan urgensi sektor pertanian untuk mendapat perhatian lebih dalam penanganan krisis.

Krisis pandemi Covid-19 membuka kesempatan untuk merevitalisasi sektor pertanian. Selain sebagai bagian penting dari sistem penyediaan pangan, di saat krisis ternyata sektor pertanian yang padat karya bisa menjadi jejaring pengaman sosial (*sosial safety net*) alamiah bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Sektor pertanian, yang dalam kondisi normal, merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, maka ketika masa pandemi Covid-19 diharapkan memiliki peran yang sama bahkan bisa lebih besar. Namun dari sisi kesehatan, bencana pandemi Covid-19 memerlukan adanya desain perlindungan medis terhadap kelompok yang rentan terhadap

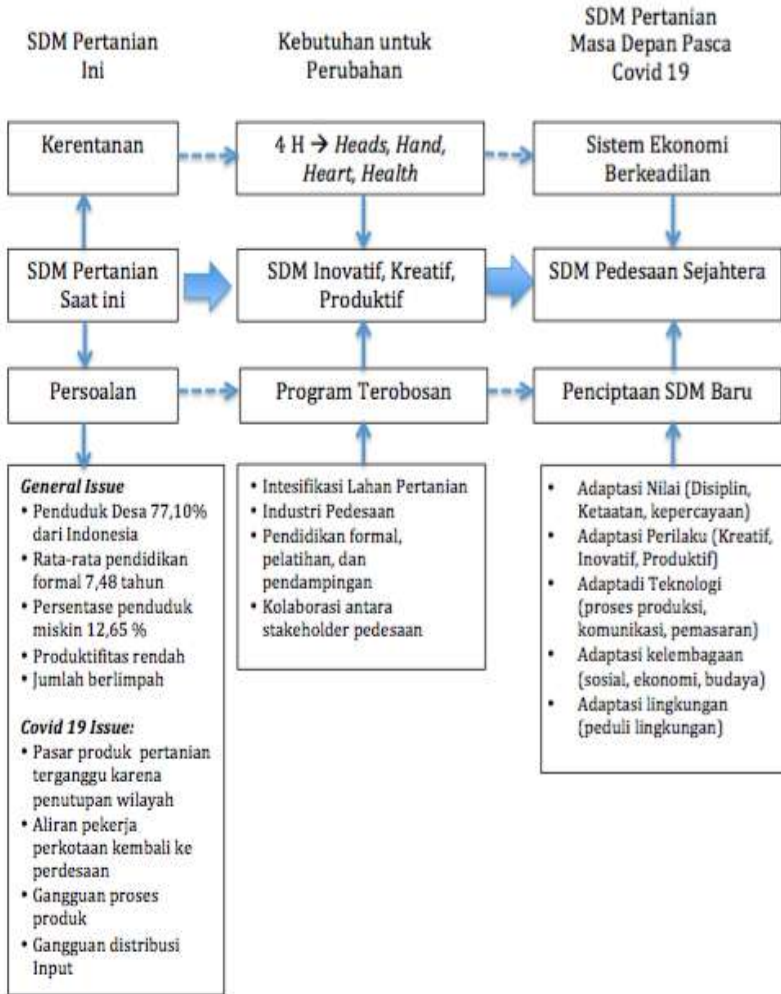
penyakit termasuk petani, dan langkah-langkah ekonomi juga diperlukan untuk melindungi mata pencaharian mereka di pasar tenaga kerja untuk mencegah pengangguran.

3.3 Membangun Kembali Pasar Kerja Pertanian di Masa Pandemi Covid-19

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, terjadi perbaikan kebijakan sektor pertanian. Adriani (2012) dan Saragih, Juli.P. (2016) menyatakan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum, penurunan suku bunga, peningkatan anggaran pendidikan, peningkatan produksi pertanian, penurunan subsidi memberikan dampak positif terhadap kinerja pasar kerja dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian bahkan dibarengi dengan perbaikan mutu modal manusia pertanian. Dengan demikian kebijakan yang dinyatakan di atas (kebijakan fiskal) jauh lebih efektif di pasar kerja daripada kebijakan moneter (penurunan suku bunga).

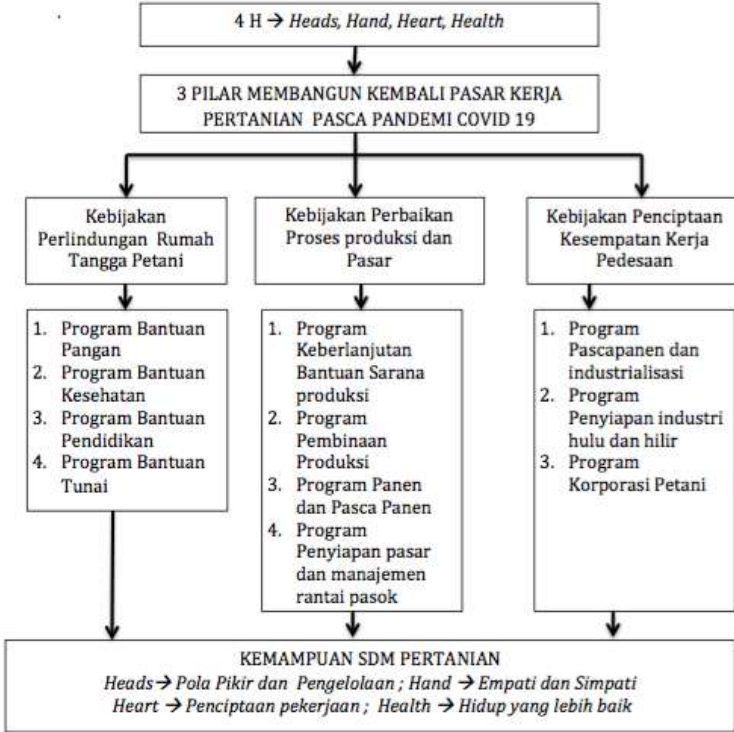
Dengan wilayah kepulauan dan didominasi oleh lautan, maka dampak kebijakan akan berbeda di setiap wilayahnya. Hal inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Persoalan produktifitas dan upah rendah, persoalan lapangan kerja yang makin menurun, persoalan ketidaksiapan sektor industri dan jasa menampung tenaga kerja pertanian masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Pandemi Covid-19 menambah persoalan di pasar kerja pertanian.

Gambar 3.4 menyajikan keterkaitan antara kondisi SDM pertanian saat ini dan kebutuhan untuk perubahan yang dibutuhkan untuk penyiapan SDM pertanian pasca pandemi Covid-19. SDM pertanian saat ini menghadapi kondisi kerentanan yang muncul akibat adanya persoalan di sektor pertanian: (1) 77,10% dari penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, (2) rata-rata pendidikan formal rendah, tidak tamat SMP (7,48 tahun), (3) 12,65 % merupakan penduduk miskin, (4) produktifitas rendah. Selain itu beberapa isu yang muncul pada sektor pertanian: (1) Pasar produk pertanian terganggu karena penutupan wilayah, (2) Aliran pekerja perkotaan kembali ke perdesaan, (3) Gangguan proses produk, dan (4) Gangguan distribusi Input dan Output.



Gambar 3.4 Kondisi Pasar Kerja Pertanian Saat Ini dan Gambaran Capaian Masa Depan: *A New Journal*

Kondisi kerentanan tersebut tentu memerlukan kebijakan untuk perubahan. Merujuk pada *National 4-H Council* (2018), pekerja masa depan dihadapkan pada pemenuhan kualikasi 4-H yaitu: a) *Heads*, untuk berpikir lebih jernih (buah pemikiran), b) *Hand*, untuk penciptaan pekerjaan, c) *Heart* untuk empati dan simpati, dan d) *Health* untuk hidup yang lebih baik bagi dirinya, kelompoknya, komunitasnya, negaranya, dan dunianya (Gambar 3.5).



Gambar 3.5 Pilar untuk Membangun Kembali Pasar Kerja Pertanian Pasca Pandemi Covid 19

Terkait dengan Pandemi Covid 19, konsep yang disampaikan oleh *National 4-H Council* (2018) menjadi penting digunakan untuk kebutuhan perubahan pekerja. Pekerja masa depan dibangun dengan tujuan menjadi SDM inovatif, kreatif, produktif. Hal yang sama juga berlaku jika ingin membangun SDM pertanian masa depan. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan program terobosan antara lain: intensifikasi lahan pertanian, industri pedesaan, pendidikan formal, pelatihan, dan pendampingan, serta kolaborasi antara *stakeholder* pedesaan.

Kebutuhan untuk SDM inovatif, kreatif, produktif akan menjadikan SDM pertanian yang sejahtera. Tetapi tentu saja, hal ini tidak cukup dilakukan dengan dorongan eksternal kebijakan pemerintah. Petani sendiri secara internal harus melakukan



serangkaian adaptasi. Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, yang meliputi: 1) Adaptasi nilai berupa disiplin, ketaatan, kepercayaan, 2) Adaptasi perilaku berupa kreatif, inovatif, produktif, 3) Adaptasi teknologi berupa proses produksi, komunikasi, pemasaran, 4) Adaptasi kelembagaan berupa sosial, ekonomi, budaya, serta 5) Adaptasi lingkungan berupa peduli lingkungan. Selain 5 nilai adaptasi di atas, terdapat adaptasi sosial yang merupakan dasar dari interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial seperti tindakan sosial, kontak sosial, dan komunikasi sosial. Selain itu bentuk-bentuk interaksi sosial antara lain kerjasama, persaingan, konflik, serta asimilasi (Oktaviani *et al.*, 2015).

Hampir semua sektor pertanian di dunia mengalami dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Oleh karenanya pada tanggal 21 April 2020, Menteri Pertanian negara-negara G-20 merilis pernyataan bersama yang mendukung langkah-langkah untuk memastikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan mobilitas pekerja di pertanian dan di seluruh rantai pasokan makanan. Pernyataan bersama itu juga mengindikasikan bahwa negara-negara G-20 akan mengadopsi langkah-langkah yang ditargetkan, proporsional, transparan, dan sementara, dan bahwa mereka tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu untuk perdagangan atau gangguan pada rantai pasokan pangan global. Pernyataan itu juga mengindikasikan bahwa G-20 akan menjaga segala tindakan pembatasan yang tidak dapat dibenarkan yang dapat menyebabkan volatilitas harga pangan yang berlebihan di pasar internasional dan mengancam ketahanan pangan dan nutrisi sebagian besar populasi dunia, terutama mereka yang paling rentan seperti disajikan pada Lampiran 1.

Di Indonesia, Covid-19 menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan ekonomi dan politik untuk memperlambat penyebaran virus corona. Aktifitas ekonomi melambat diiringi dengan munculnya keresahan sosial ekonomi politik. Krisis pandemi yang berlarut-larut dengan cepat menjadi beban bagi:

- a) Rantai pasokan makanan perlu dijaga agar tidak terjadi krisis pangan seperti tahun 2007-2008

- b) Jaringan interaksi yang kompleks yang melibatkan petani, input pertanian, pabrik pengolahan, pengiriman dan pengecer. Contoh, bila industri pengiriman barang mengalami perlambatan maka akan mengganggu rantai pasokan makanan.

Dalam konteks kebijakan ekonomi dan politik untuk memperlambat penyebaran virus corona tersebut, proses *supply chain management* menjadi penting. Adanya pembatasan perdagangan tidak hanya akan merugikan produsen dan konsumen, tetapi juga membuat kepanikan di pasar. Untuk komoditas bernilai tinggi yang membutuhkan pekerja (sebagai gantinya mesin) untuk produksi, negara harus mencapai keseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga kegiatan produksi dan kebutuhan melindungi para pekerja. Negara memang bertugas untuk memerangi pandemi Covid-19, tetapi negara juga harus melakukan segala upaya untuk mempertahankannya rantai pasokan makanan agar tetap bergerak.

Kebijakan mengantisipasi persoalan yang muncul akibat pandemi Covid-19 di pasar kerja merupakan kebijakan yang menyentuh aspek mikro dan aspek makro. Aspek mikro meliputi aspek petani, harga, ketersediaan, dan akses layanan. Sedangkan aspek makro meliputi kelembagaan dan organisasi. Penyusunan kebijakan yang dilakukan diharapkan menjadi jalan keluar persoalan pasar kerja pertanian, tidak hanya dari pandemi Covid-19 tetapi juga serentet persoalannya lainnya. Langkah-langkah proaktif berskala besar dan terintegrasi di semua bidang kebijakan diperlukan untuk memantau efek langsung dan tidak langsung.

Mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang menimbulkan dampak negatif hampir pada semua sektor maka kebijakan yang disusun harus fokus pada dua tujuan langsung yaitu langkah-langkah dalam perlindungan kesehatan dan dukungan ekonomi pada sisi permintaan dan penawaran petani. Berdasarkan tujuan tersebut terdapat 3 (tiga) pilar untuk membangun kembali pasar kerja pertanian pasca pandemi Covid-19 (lihat Gambar 3.5) yaitu:

1. Kebijakan perlindungan rumah tangga petani



- a) Meningkatkan akses petani ke layanan kesehatan yang dibiayai secara kolektif untuk semua termasuk petani dan keluarga mereka yang tidak diasuransikan.
 - b) Kebijakan untuk memastikan keamanan penghasilan bagi mereka yang sakit, dikarantina atau dirawat oleh anak-anak, orang tua atau anggota keluarga lainnya.
 - c) Kebijakan fiskal, terutama langkah-langkah perlindungan sosial, seperti tunjangan pengangguran, keringanan pajak untuk mereka yang berpenghasilan rendah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),
 - d) Kebijakan moneter meliputi pengurangan suku bunga, relaksasi suku bunga cadangan, ketentuan likuiditas yang ditargetkan,
 - e) Pinjaman yang ditargetkan dan dukungan keuangan bagi sektor-sektor tertentu untuk melindungi UMKM,
 - f) Dari sisi pemberi kerja adalah perlu untuk memberikan Bagi petani pemilik perlu melakukan Perlindungan sosial melalui skema yang ada dan / atau pembayaran ad-hoc untuk pekerja, termasuk pekerja informal, kasual, musiman dan migran, dan wiraswasta (mis. Melalui akses ke tunjangan pengangguran, bantuan sosial, dan program pekerjaan publik)
2. Kebijakan perbaikan proses produksi dan pasar
- a) Kebijakan Pertama, petani harus dilindungi dari risiko kesehatan Covid-19. Langkah-langkah perlindungan kesehatan di lokasi lahan pertanian harus diperkenalkan dan diperkuat. Tentu usaha ini membutuhkan dukungan dan investasi publik skala besar mengingat petani mendominasi sekitar 50 % pekerja pertanian.
 - b) Upaya kebijakan kedua, tepat waktu, berskala besar, dan terkoordinasi harus dilakukan untuk menyediakan lapangan kerja dan dukungan pendapatan dan untuk merangsang ekonomi dan permintaan tenaga

kerja. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi petani terhadap kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan secara langsung, tetapi mereka juga membantu mencegah rantai guncangan pasokan produk pertanian

- c) Kebijakan untuk petani kecil dalam meningkatkan produktivitas dan memasarkan makanan yang mereka hasilkan juga melalui saluran *e-commerce*.
 - d) Pemerintah melalui kementerian terkait harus membawa pusat- pusat pasar lebih dekat ke produsen petani kecil untuk mengurangi kebutuhan mobilitas. Pusat-pusat pasar harus memiliki kapasitas luas. Bank makanan dapat memainkan peran penting mengingat pengetahuan mereka, serta petani terlibat dalam pengaturan pertanian kontrak.
3. Kebijakan penciptaan kesempatan kerja pedesaan
- a) Merangsang ekonomi dan permintaan tenaga kerja melalui kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi terutama di sektor pertanian.
 - b) Negara, jika memungkinkan, harus membuat sistem resi gudang kepada petani untuk menggunakan resi untuk mendapatkan pembayaran mereka.
 - c) Negara harus mempercepat pengembangan *e-commerce* untuk petani kecil.
 - d) Petani kecil harus memiliki akses ke keuangan, sehingga mereka dapat terus berproduksi.
 - Petani membutuhkan bantuan tunai dan program jaring pengaman yang dapat meningkatkan produktivitas mereka.
 - Bank harus menaikkan biaya atas pinjaman petani dan memperpanjang tenggat waktu pembayaran.
 - Injeksi modal di sektor pertanian dapat membantu agribisnis kecil dan menengah untuk



melanjutkan operasi

- Memperbaiki penyimpanan dapat membantu mengurangi kehilangan panen pasca panen di sepanjang rantai pasokan.
- e) Segala kendala terhadap perdagangan domestik, termasuk rintangan birokrasi, harus dihilangkan untuk menghubungkan petani kecil dengan pasar.
- f) Pemerintah harus memenuhi kebutuhan energi dasar petani kecil dan rumah tangga pedesaan.
- g) Selama keadaan darurat, pemerintah dapat membeli produk pertanian dari petani kecil untuk membangun cadangan darurat strategis terutama untuk komoditas yang tidak mudah rusak untuk meningkatkan pasokan makanan.
- h) Profesional kesehatan di tempat dapat memastikan pekerja tidak sakit. Jika memungkinkan, pekerja harus diuji untuk *coronavirus*.
- i) Para petani dan gudang harus mengurangi pengunjung langsung. Toko-toko harus mengurangi jam kerjanya, memutar staf dan menggandakan pengirimannya jasa. Gudang dan pabrik pengolahan harus direkayasa ulang untuk memungkinkan pekerja mempraktikkan jarak sosial. Ahli kesehatan harus mengukur suhu karyawan dan memastikan mereka mengenakan masker, sarung tangan, dan gigi pelindung lainnya.

3.4 Penutup

Bencana seperti epidemi dapat terjadi secara tak terduga dan mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu lebih dari yang lain termasuk SDM Pertanian. Oleh karena itu, perlindungan medis harus ditingkatkan untuk kelompok-kelompok SDM pertanian terhadap penyakit dan langkah-langkah ekonomi juga diperlukan untuk melindungi mata pencaharian mereka di pasar tenaga kerja untuk mencegah pengangguran yang berasal dari ketidaksetaraan.

Covid-19 akan berdampak luas pada hasil pasar kerja. Di luar kekhawatiran mendesak tentang kesehatan pekerja dan keluarga mereka, virus dan guncangan ekonomi selanjutnya akan berdampak pada dunia kerja di tiga dimensi utama: 1) Jumlah pekerjaan (baik pengangguran dan setengah pengangguran), dan 2) Kualitas pekerjaan (mis. Upah dan akses ke perlindungan sosial). Diperlukan konsep 4 H (*Heads, Hand, Heart, Health*) untuk membangun SDM pertanian sejahtera. Secara eksternal diperlukan serangkain kebijakan pemerintah dan secara internal, SDM pertanian diminta untuk melakukan adaptasi perilaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Dessy. 2012. Kinerja Pasar Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi dikaitkan dengan Mutu Modal Manusia di Indonesia. Disertasi Doktor Program Ilmu-Ilmu Pertanian. Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Palembang. Tidak Dipublikasikan.
- Adriani, Dessy. 2013. Penyelesaian Pengangguran Melalui Identifikasi Perilaku Permintaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Dan Non Pertanian dalam Perspektif Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol 12 (1): 1-20.
- Adriani, Dessy. 2015. Rasionalitas Sosial Ekonomi dalam Penyelesaian Pengangguran Terselubung Petani Padi Sawah Tadah Hujan, *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 20 (1): 43-58.
- Coibion, Oliver ., Gorodnichenko, Yuriy., Weber, Michael., dan F. Miller. 2020. Labor Markets During the Covid-19 Crisis: A Preliminary View. Chicago Booth Paper No. 20-06. Center for Research in Finance The University of Chicago, Booth School of Business. <http://ssrn.com/abstract=3574736>. Diakses tanggal 17 Juli 2020.
- Widuastutik *et al.*, 2020. Prediksi berbasis Skenario terhadap Situasi Ekonomi dan Pangan di Indonesia akibat COVID-19: Pendekatan CGE. webinar *The 13th IPB Strategic Talk* yang diselenggarakan oleh Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS). IPB University. Bogor.
- Economist Intelligence Unit*. 2020. Indonesia's privatisation agenda.



- <http://country.eiu.com/Indonesia/ArticleList/Analysis>. Diakses tanggal 15 Juli 2020
- Fahrika ., A. Ika dan J. Roy. 2020. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh. *Jurnal INOVASI*, Vol 16 (2): 206-213.
- 4-H National Council. 2019. 4-H National Council Annual Report 2018. <https://4-h.org/wp-content/uploads/2020/04/National-4-H-Council-FY18B-Annual-Report.pdf>. Diakses tanggal 23 Agustus 2020.
- Hanoatubun, S. 2020. Dampak Covid – 19 terhadap Prekonomian Indonesia. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol 2(1): 146-153.
- Himpuni, O., Rustiadi, E. And Setiahadi, S. 2014. Perubahan Struktural Tenaga Kerja Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Non Pertanian Di Provinsi Lampung. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol 4(1): 70-74. Doi: 10.29244/Jpsl.4.1.70.
- Lee, Ayoung and J. Cho. 2016. The impact of epidemics on labor market: identifying victims of the Middle East Respiratory Syndrome in the Korean labor market. *International Journal for Equity in Health* (2016) 15:196 DOI 10.1186/s12939-016-0483-9
- ILO. 2020. COVID-19 and the world of work: Impact and policy responses. Monitor 1st Edition. ILO. Geneva, Swiss.
- Irawan, P.B., dan Romdiati H. 2000. Dampak Krisis Ekonomi dan Kemiskinan dan Beberapa Implikasinya untuk Strategi Pembangunan. *Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII*. LIPI. Jakarta.
- Ngadi. 2020. Survei Dampak Darurat Virus Corona terhadap Tenaga Kerja Indonesia. <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadap-tenaga-kerja-indonesia/22030>. Diakses tanggal 2 Agustus 2020.
- Nursaiti. 2020. Dampak Sektor Pertanian Indonesia Di Masa Pandemi Wabah Covid-19. <HTTP://BEM.UNP.AC.ID/NEWS/LXYZ0WPQDHBM2LSIW3JH/DAMPAK-SEKTOR-PERTANIAN-INDONESIA-DI-MASA-PANDEMI-WABAH-COVID-19>. Diakses tanggal 28 Januari 2021.
- Malihah, Elly, N. Alia, Mirna, dan Y. Oktaviani. 2015. Pengaruh Adaptasi Sosial Terhadap Integrasi Masyarakat Di Kelurahan Cikutra (Studi

- Deskriptif di Komplek Delima Cikutra dan Gang Sukarapih). *Jurnal Sosietas*, Vol. 5 (2): 1-7 2015.
- Saragih, Juli.P. 2016. Tantangan Kebijakan Pengembangan Sektor Pertanian Di Masa Datang Challenges Of Agricultural Development Policy In The Future. *Kajian*, Vol 21 (2): 105-123
- Panjaitan, Dian V., Ingot, S. Raja, Mardiansyah, Arie., dan Leo M. Christoffel. 2020. Analisis Dampak Export Restriction Komoditi Pertanian Terhadap Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol 8 (1): 1-16.
- PH, L., Suwoso, R., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, Vol 1(1): 37-48.
- Yuliana. 2007. Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Status Gizi Balita di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 65 (13): 287-299.
- World Trade Organization*. 2018. Impact Of Export Prohibitions Or Restrictions On Foodstuffs Purchased For Non-Commercial Humanitarian Purposes By The World Food Programme (WFP). *World Trade Organization*.



Lampiran 1. Hasil Pertemuan Menteri Pertanian Negara G-20.

G20 Extraordinary Agriculture Ministers Meeting

Ministerial Statement on COVID-19

Virtual Meeting – April 21, 2020



We, the G20 Agriculture Ministers, are deeply saddened by the devastating human losses and suffering caused by the spread of COVID-19. We commit to cooperating closely and taking concrete actions to safeguard global food security and nutrition.

We reaffirm the importance of working to ensure the continued flow of food, products, and inputs essential for agricultural and food production across borders in line with our Leaders' Statement on COVID-19 of March 26, 2020. We acknowledge the challenges of minimizing the risk of COVID-19 while keeping food supply chains functioning. We will continue to work to ensure the health, safety, welfare, and mobility of workers in agriculture and throughout the food supply chain.

We will guard against any unjustified restrictive measures that could lead to excessive food price volatility in international markets and threaten the food security and nutrition of large proportions of the world population, especially the most vulnerable living in environments of low food security. We agree that emergency measures in the context of the COVID-19 pandemic must be targeted, proportionate, transparent, and temporary, and that they do not create unnecessary barriers to trade or disruption to global food supply chains, and are consistent with World Trade Organization (WTO) rules. We recognise the importance of transparency and commend the Trade and Investment Ministers' commitment to notify the WTO of any trade-related measures taken, including those related to agriculture and essential foodstuffs. We reaffirm our agreement not to impose export restrictions or extraordinary taxes on food and agricultural products purchased for non-commercial humanitarian purposes by the World Food Programme (WFP) and other humanitarian agencies.

We emphasize the work of the G20 Agricultural Market Information System (AMIS) and take note of AMIS' assessment that at present global food supplies are adequate and food markets remain well balanced. As members, we commit and call on other members to continue providing timely and reliable information on global food market fundamentals to help markets, countries, and consumers make informed choices. Where appropriate, we will coordinate policy responses, supported by the AMIS Global Food Market Information Group and the AMIS Rapid Response Forum. We call for continued support for AMIS, including through voluntary financial contributions.

We will work together to help ensure that sufficient, safe, affordable, and nutritious food continues to be available and accessible to all people, including the poorest, the most vulnerable, and displaced people in a timely, safe, and organized manner, consistent with national requirements. Acknowledging the critical role of the private sector in food systems, we call for enhanced cooperation between the public and private sectors to help mobilize rapid and innovative responses to impacts of this pandemic on the agriculture and food sectors.

Under the current challenging circumstances, we stress the importance of avoiding food losses and waste caused by disruptions throughout food supply chains, which could exacerbate food insecurity and nutrition risks and economic loss. We stress the need to strengthen the sustainability and resilience of food systems globally, including to future shocks from disease and pest outbreaks, and to the global challenges that drive these shocks. In line with the One Health approach, we call for strengthened mechanisms for monitoring, early warning, preparedness, prevention, detection, response, and control of zoonotic diseases, and developing science-based international guidelines on stricter safety and hygienic measures for zoonosis control.

We deeply thank farmers and workers, and small, medium and large scale agri-food businesses for their continuous efforts to ensure our food supply. We will intensify our efforts, in line with WTO rules and the 2030 Agenda for Sustainable Development, to support them to sustain their activities and livelihoods during the crisis and to assist their recovery afterwards. Our efforts will support rural communities, especially small-scale farmers and family farms, to be more economically prosperous, resilient and sustainable, and to have improved food security and nutrition, giving special attention to the needs of developing and low-income countries.

We will continue our cooperation with relevant international organizations and within their mandates work to: reinforce international cooperation; identify additional actions to alleviate the impacts of COVID-19 on food security and nutrition; share best practices and lessons learned, such as addressing barriers to supply chains; promote evidence and science-based information and combat misinformation; provide capacity building and technical assistance; and promote research, responsible investments, innovations and reforms that will improve the sustainability and resilience of agriculture and food systems. This work could build on the Food and Agriculture Organization's (FAO's) evolving response to COVID-19, the International Fund for Agricultural Development's (IFAD's) evolving efforts to support a strong recovery from the effects of COVID-19, policy monitoring and analysis by the OECD, and other relevant initiatives, such as the preparation for the 2021 UN Food Systems Summit.

We will continue our close cooperation and as necessary update our response to the COVID-19 pandemic and our broader G20 agriculture and food agenda. We stand ready to reconvene as required.

Sumber: https://g20.org/en/media/Documents/G20_Agriculture%20Ministers%20Meeting_Statement_EN.pdf



Bab 4

PERUBAHAN POLA KONSUMSI MASYARAKAT: SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Neneng Miskiyah

Abstrak

Semakin meluasnya penyebaran Covid-19 ke berbagai negara di belahan dunia telah menekan pertumbuhan ekonomi global, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini juga berimbas pada ekonomi rumah tangga. Pembatasan sosial (*social distancing*), yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa resiko besar kepada penyebaran Covid-19 memberikan pengaruh perubahan pola perilaku konsumen. Himbauan untuk tetap dirumah, bekerja dari rumah, dan sekolah dari rumah telah merubah pola dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Transformasi ekonomi digital memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi secara ekonomi. Meningkatnya belanja *online* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi pilihan yang paling aman di saat pandemi Covid-19 ini. Dampak lain yang ditimbulkan oleh Covid-19 ini bertambahnya jumlah pekerja yang di PHK, atau dirumahkan akibat melambatnya bisnis yang dijalankan. Permasalahan yang timbul dari kondisi ini adalah menurunnya pendapatan yang diterima oleh pekerja bahkan tidak menerima pendapatan sama sekali akibatnya berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan



ketahanan dunia usaha yaitu Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat mendukung dunia usaha untuk terus beroperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: pola konsumsi, *social distancing*, perilaku konsumen

Abstract

The increasing spread of Covid-19 to various countries worldwide has suppressed global economic growth, including Indonesia's economic growth. It also has an impact on the household economy. Social distancing, namely reducing the mobility of people from one place to another, maintaining distance, and reducing crowds of people who pose a significant risk to the spread of Covid-19, affect changing consumer behavior patterns. Appeals to stay at home, Work From Home (WFH), and study from home have changed the lifestyle and lifestyle of Indonesians. The transformation of the digital economy provides equal opportunities for everyone to participate economically. Increasing online shopping to meet daily needs is the safest choice in this time of the Covid-19 pandemic. Covid-19 increases workers who have been laid off due to the slowdown in businesses. The problem that arises from this condition is the decline in income received by workers and even not receiving payment at all. As a result, it affects consumption expenditure. One of the government's steps to increase the resilience of the business world is Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). This government policy is expected to support the business world to continue to operate in meeting the needs of the community.

Keywords: *consumption pattern, social distancing, consumer behavior*

4.1 Pendahuluan

Pola konsumsi masyarakat merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Sebagai indikator kesejahteraan, tingkat konsumsi akan menentukan kualitas pembangunan manusia yang terekam dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Besarnya nilai nominal yang dibelanjakan baik dalam bentuk konsumsi pangan maupun non pangan secara langsung dapat mencerminkan kemampuan ekonomi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga itu sendiri. Ketika tingkat pendapatan meningkat maka kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya menjadi semakin besar dan peningkatan kehidupan juga menjadi berubah.

Proporsi pengeluaran masyarakat dengan pendapatan tinggi terhadap kebutuhan konsumsi non pangan biasanya lebih besar dibandingkan dengan masyarakat dengan pendapatan rendah. Teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes (Branson, 1989) bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan pada besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Keynes menyatakan bahwa ada pengeluaran konsumsi minimum (konsumsi otomatis) yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan pengeluaran konsumsi akan meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan.

Merebaknya kasus *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) di Indonesia awal bulan Maret 2020 telah membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat. Pengaruh dari pandemi ini dirasakan oleh semua orang, baik perannya sebagai produsen maupun konsumen. Dari sisi produsen, banyak perusahaan yang mengubah strategi agar produk atau jasa yang ditawarkan tetap diminati oleh konsumen. Dari sisi konsumen tetap menjaga pola konsumsi agar tidak menurun.

Fokus permasalahan konsumsi rumah tangga disebabkan komponen ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia sebesar 56,62 persen (BPS, 2019). Angka konsumsi rumah tangga pada kuartal IV tahun 2019 yang tumbuh hanya 4,97 persen, lebih rendah dibanding periode sebelumnya sebesar 5,08 persen.

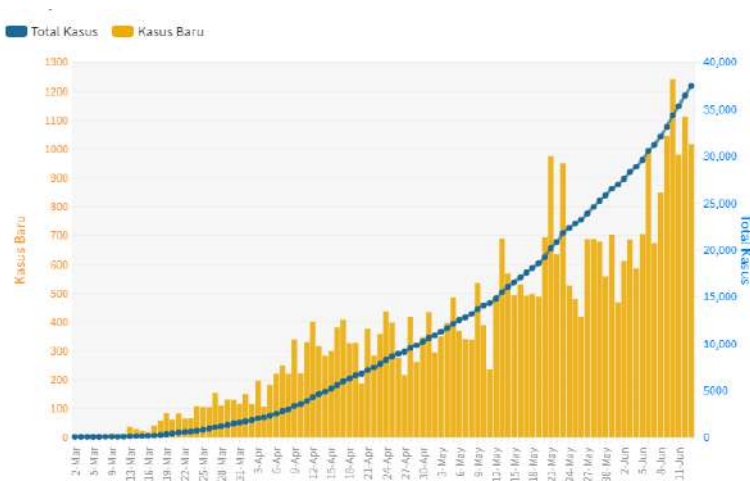


Melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga menunjukkan turunnya daya beli masyarakat yang justru harus terus didorong.

4.2 Pola Konsumsi Masyarakat Terhadap *Social Distancing*

Penyebaran Covid-19 di Indonesia terus meluas. Langkah yang dilakukan pemerintah saat ini adalah pembatasan sosial (*social distancing*), yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa resiko besar kepada penyebaran Covid-19. Walaupun pemberlakuan pembatasan sosial sudah dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Daerah, namun jumlah kasus baru terkonfirmasi Covid-19 terus bertambah (Gambar 4.1).

Penambahan kasus ini menggambarkan bahwa kedisiplinan dan kepatuhan untuk melaksanakan protokol kesehatan masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Ketidakepatuhan tersebut terdiri dari tiga bentuk yaitu *pertama*, masih ada orang yang terkonfirmasi positif yang belum melakukan isolasi mandiri dengan baik. *Kedua*, ada kelompok rentan tertular Covid-19 yang tidak menjaga jarak, dan *ketiga*, tidak memakai masker dan tidak mencuci tangan pakai sabun.



Gambar 4.1 Kasus Baru dan Total Kasus Covid-19 Juni 2020
Sumber: Kemenkes RI, Juru Bicara Penanganan Covid-19

Selama diberlakukannya pembatasan sosial terjadi pergeseran konsumsi masyarakat yaitu adanya kenaikan belanja secara daring dan jasa logistic. Adanya peraturan *social distancing* yang menimbulkan pengurangan pergerakan, akan menyebabkan terjadinya pengurangan pengeluaran konsumen (Baker, et.al; 2020). Semakin sedikit orang melakukan pergerakan maka semakin sedikit pula pengeluaran untuk konsumsi dan transportasi. Namun dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat memperoleh kemudahan dalam berkonsumsi. Teknologi digital merupakan salah satu faktor peralihan pola konsumsi. Pembelian dan sistem pembayaran secara daring (online) menyebabkan konsumen tetap berada di rumah.

Berkaitan dengan hal di atas, ada tiga tren baru dari konsumen (Hong, 2020), yaitu: (a) Konsumen beralih melakukan pembelian dengan *low contact* (online), (b) Kelompok konsumen *introvert* akan semakin menikmati gaya hidup *cocooning* yaitu orang yang menikmati hidup dalam kesendirian dan menjauhi interaksi dengan orang lain secara langsung, (c) Kepedulian terhadap kesehatan akan semakin tinggi. Selain tren baru dari konsumen, Grab Indonesia melakukan survei terhadap perubahan kebiasaan masyarakat Indonesia pada Maret 2020 (saat pandemi) dan Oktober 2019 (sebelum terjadi pandemi), yang menghasilkan informasi: (a) Masyarakat lebih sering berbelanja *online*, (b) Pemesanan makanan sehat meningkat 7,4%, (c) Pemesanan Grabmart meningkat 22%, (d) pPemesanan makan siang meningkat, dan (e) Peanggan jadi lebih suka berbagi

Social distancing lambat laun merubah pola perilaku konsumen, dimana konsumen akan menata ulang prioritas pengeluaran berdasarkan kebutuhan terpenting untuk bertahan hidup. Produk-produk makanan, *healthcare*, dan informasi menempati urutan teratas dari prioritas konsumen. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat hampir di seluruh negara di dunia, seperti yang dirilis oleh Australian Bureau of Statistic (2020) mencatat terjadinya penurunan konsumsi rumah tangga sebesar 1,1% pada kuartal Maret dan 0,2% sepanjang tahun.



4.3 Perubahan Perilaku Konsumen Dalam Masa Covid-19

Masuknya era revolusi 4.0 telah mengubah tatanan dunia bisnis dan pola konsumsi masyarakat. Teknologi digital telah mendorong penduduk untuk mengubah perilaku pola konsumsi dari konvensional menjadi pola konsumsi daring, baik konsumsi makanan maupun non makanan. Transformasi ekonomi digital memberi kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi secara ekonomi.

Penggunaan teknologi digital pada saat ini semakin meningkat yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dengan memberlakukan *social distancing*, yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen memiliki arti sebagai proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan.

Beberapa perubahan perilaku konsumen selama masa pandemi ini (Stanciu, 2020) yaitu: *pertama*, konsumen cenderung mengabaikan harga dan lebih memperhatikan nilai dan manfaat. Pada masa pandemi Covid-19, kebutuhan akan masker dan *handsanitizer* meningkat tajam karena memiliki nilai dan manfaat yang tinggi, sehingga masyarakat mengabaikan harga untuk mengkonsumsinya. *Kedua*, konsumen tidak melakukan pengeluaran untuk produk komplementer. *Ketiga*, konsumen mengurangi konsumsi baru, dan berupaya melakukan transaksi tanpa bertatap muka. Di awal terjadinya pandemi Covid-19 konsumen mengalami *panic buying* yaitu melakukan pembelian barang secara berlebihan, menimbun makanan dan barang-barang penting lainnya.

Dalam masa pandemi Covid-19, Vargas (2020) menemukan enam tahap perilaku konsumen yaitu:

1. Pembelian proaktif produk kesehatan. Meningkatnya pembelian produk kesehatan yang sebelumnya kurang diminati oleh masyarakat, seperti masker, *hand sanitizer*, disinfektan, dan produk kesehatan lainnya sebagai bentuk untuk menjaga kesejahteraan atau kesehatan.

2. Mengelola kesehatan secara reaktif, dengan memprioritaskan produk penahanan infeksi, misal masker wajah
3. Meningkatnya pembelian produk bahan makanan dibandingkan dengan produk non makanan. Pola konsumsi masyarakat selama pandemi ditunjukkan melalui tren global memasak dan makan dirumah. Kondisi ini menyebabkan tingkat belanja makanan baik bahan mentah atau makanan siap konsumsi menjadi lebih tinggi.
4. Persiapan hidup yang di karantina. Peningkatan belanja *online*, penurunan kunjungan ke toko
5. Keterbatasan dalam memiliki barang karena persediaan yang terbatas
6. Hidup normal baru. Meningkatkan kesadaran kesehatan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Perubahan pola perilaku konsumen ini, tidak hanya mempengaruhi ekonomi dan sosial saja, akan tetapi faktor psikologis juga turut terpengaruh. Menurut Gityandraputra (2020) klasifikasi konsumen pada masa pandemi ini dilihat dari kacamata psikologis terbagi menjadi 4 kategori yaitu:

1. *Slam-on-the-brakes*

Termasuk dalam kategori ini adalah masyarakat yang paling terpengaruh dengan adanya pandemic Covid-19. Kelompok kategori ini, dengan tingkat ekonomi di level manapun termasuk level ekonomi di bawah rata-rata, tetap memiliki kecemasan yang tinggi. Kelompok ini biasanya akan mengurangi, menunda, atau menghindari pembelian yang berlebihan. Konsumsi yang dilakukan adalah pembelian kebutuhan pokok.

2. *Pained-but-patient*

Kategori ini adalah mereka yang memiliki kecemasan terhadap situasi ini tetapi tetap positif pada situasi jangka panjang. *Pained-but-patient* merupakan kategori konsumen yang paling besar dan tersebar di seluruh wilayah. Ketika



mengonsumsi kebutuhan pokok, akan mulai melakukan penghematan, tetapi pembelian untuk barang-barang yang bermerek masih tetap dilakukan terutama untuk barang-barang yang sudah biasa digunakan. Masyarakat yang berada pada kategori ini tetap akan menghindari pembelian untuk kebutuhan tersier.

3. *Comfortably well-off*

Konsumen yang berada pada kategori ini biasanya tidak terlalu terpengaruh terhadap kondisi yang terjadi. Mereka yang berada dalam kelompok ini memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata dan tetap melakukan pola belanja seperti biasanya. Walaupun demikian mereka tetap melakukan seleksi dalam memilih atau membandingkan produk yang akan dikonsumsi. Pengeluaran konsumsi untuk kebutuhan primer tetap sama, dan pembelian produk yang menjadi favorit terus dilakukan. Umumnya, konsumen yang berada pada kategori ini akan tetap mengonsumsi kebutuhan tersier selama dapat memberikan kualitas yang baik dan memberikan nilai tambah bagi mereka.

4. *Live-for-today*

Segmen ini biasanya banyak diisi oleh masyarakat usia muda dan tinggal di kota-kota besar atau urban. Dalam mengonsumsi produk, biasanya mereka lebih memilih produk yang dapat memberikan pengalaman terbaik dibanding barang-barang yang umum. Mereka tidak terlalu peduli pada harga, tetapi di masa pandemi ini akan ada penundaan pada pembelian dalam jumlah yang besar. Untuk kebutuhan primer dan sekunder, masyarakat yang berada dalam kategori ini biasanya tetap memilih produk yang sudah biasa digunakan. Akan tetapi untuk kebutuhan tersier, lebih memilih harga yang terbaik, atau bahkan menunda pembelian sampai masa pandemi ini berakhir.

Keempat kategori di atas menjelaskan perubahan perilaku konsumen akibat pandemi Covid-19 yang merubah segmentasi konsumen (Gambar 4.2).

	Essentials	Treats	Postponables	Expendables
Slam-on-The Brakes	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: ukuran lebih kecil dengan biaya lebih sedikit • Iklan: “Karena kami peduli kamu” 	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: ukuran menyusut • Iklan: “Karena Anda pantas mendapatkannya” 	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: rencana pembayaran • Iklan: “Anda boleh menundanya sekarang, tetapi Anda akan membutuhkannya suatu hari nanti 	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: lakukan sendiri sebagai alternatif • Iklan: “Suatu hari Anda akan mendapatkan yang asli
Pained-But-Patient	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: opsi dengan harga lebih rendah dan paket bernilai • Iklan: “Tidak bisa lebih baik dari ini” 	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: paket lebih kecil • Iklan: “Alternatif merek mewah yang terjangkau” 	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: nilai tambah ke unit/ produk lama • Iklan: “Jadikan merek Anda lebih baik” 	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: peningkatan merek utama • Iklan: “Ada disini dan lebih baik, kami menunggu Anda”
Comfortably-well-off	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan iklan kesadaran • Iklan: “Ini yang Anda inginkan” 	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: kualitas luar biasa • Iklan: “Merek yang layak Anda dapatkan saat Anda sukses” 	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: beli sekarang dan hemat • Iklan: “Merek yang tidak boleh Anda lewatkan” 	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: status kaya • Iklan: “Merek untuk membuat teman Anda iri”



Live-for-today	<ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan iklan kesadaran • Iklan: “Anda tidak dapat hidup tanpanya” 	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: convenient on payment • Advertise as “Opportunity to seize the moment” 	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: kemudahan pembayaran • Iklan: “Peluang untuk memanfaatkan momen” 	<ul style="list-style-type: none"> • Penawaran: harus memiliki produk • Iklan: “Merek yang Anda inspirasi untuk dibeli saat pendapatan tumbuh”
----------------	---	--	--	--

Gambar 4.2 Perubahan Pola Konsumsi dan Segmentasi Konsumen Masa Pandemi Covid-19

Sumber: <https://www.contentserv.com/en/blog/how-covid-19-pandemic-is-influencing-consumer-behavior/>

Munculnya pola konsumsi baru mengharuskan masyarakat menyesuaikan gaya hidupnya dengan situasi dan kondisi yang sudah berubah akibat pandemi Covid-19. Mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah selama pandemi membuat masyarakat mengubah pola belanja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan aktivitas belanja *online* baik untuk kebutuhan makanan maupun kesehatan.

Pandemi Covid-19 telah merubah pola konsumsi (positif dan negatif) terkait dengan kesehatan manusia dan lingkungan serta ekonomi global. Dengan adanya perlakuan karantina mandiri serta *social distancing* menyebabkan terjadinya diversifikasi produk, khususnya produk makanan. Misal semakin banyak produk makanan yang ditawarkan dalam bentuk frozen (Eftimov, et.al, 2020).

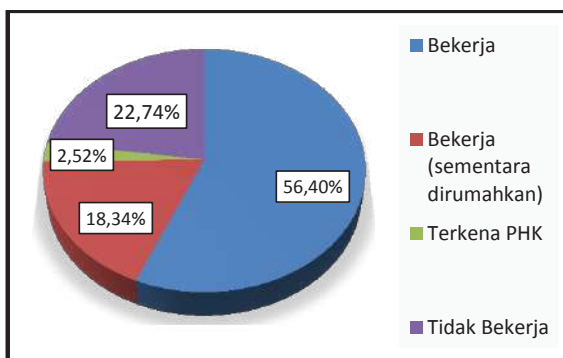
4.4 Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat

Wabah virus corona telah membawa perubahan besar bagi tatanan kehidupan masyarakat. Keharusan untuk mengisolasi diri berdampak pada pendapatan masyarakat. Tidak sedikit pelaku usaha yang menghentikan usahanya baik bersifat sementara dan bahkan secara permanen untuk memutus rantai penularan virus

corona. Kondisi tersebut berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat.

4.4.1 Perubahan Pendapatan Masyarakat

Beberapa sektor usaha mengalami penurunan produksi akibat penurunan penjualan hasil produksi, yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Tidak sedikit usaha yang gulung tikar, atau melakukan efisiensi biaya produksi dengan mengurangi jumlah karyawan maupun pemotongan gaji karyawan, dan mengambil kebijakan pengurangan shift kerja dan merumahkan sebagian karyawannya. Berdasarkan Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 (BPS RI, 2020) terhadap 87.379 responden menunjukkan kondisi karyawan/pekerja yang terdampak Covid-19 (Gambar 4.3) berikut.



Gambar 4.3. Persentase Responden Terdampak Covid-19

Sumber: BPS RI, 2020

Cukup besarnya persentase karyawan yang berada pada status bekerja (sementara dirumahkan) yaitu 18,34%, dan tidak bekerja (22,74%) berakibat pada penurunan pendapatan. Dari 87.379 responden melalui Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 (BPS RI, 2020), diperoleh hasil bahwa persentase responden yang mengalami penurunan pendapatan yaitu sebesar 44,67% (responden laki-laki) dan 38,55% (responden perempuan). Sementara kondisi karyawan yang masih bekerja tetapi mengalami penurunan pendapatan sebesar 35,78%, sedangkan 60,74% mereka yang sementara dirumahkan. Kelompok pendapatan yang paling



terdampak adalah masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal.

Tabel 4.1
Kelompok yang Mengalami Penurunan Pendapatan

Kelompok Pendapatan	Persentase
Berpendapatan rendah	
<= 1,8 juta	70,53
1,8 – 3,0 juta	46,77
3,0 – 4,8 juta	37,19
4,8 – 7,2 juta	31,67
Berpendapatan tinggi	
>7,2 juta	30,34

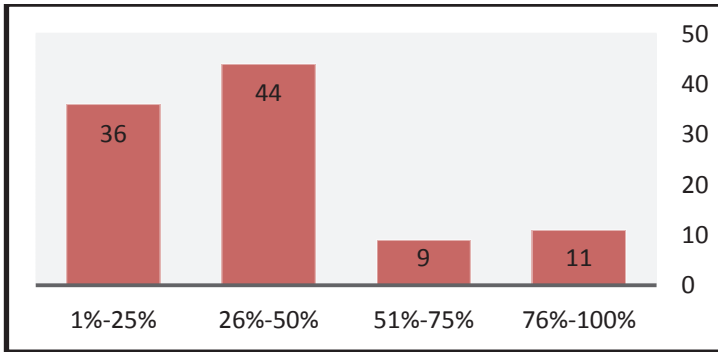
Sumber: BPS RI, 2020

Dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa mereka yang paling terdampak adanya Covid-19 ini adalah pada kelompok pendapatan kurang dari 1,8 juta, karena mengalami penurunan pengeluaran dibandingkan sebelum wabah corona ini sebesar 70,53%. Kondisi ini sangat memprihatinkan, satu sisi dengan adanya virus corona ini, dianjurkan untuk tetap menjaga imunitas dan kesehatan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, minum vitamin, memakai masker, dan sering mencuci tangan/*hand sanitizer*, tetapi pada sisi yang lain, semua kebutuhan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, sementara pendapatan menurun, atau bahkan tidak memperoleh penghasilan sama sekali.

4.4.2 Peningkatan dan Penurunan Pengeluaran Masyarakat Selama Pandemi Covid-19

Alokasi kebutuhan rumah tangga dapat dilihat berdasarkan pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan. Jika terjadi peningkatan pendapatan maka akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan dan ditabung. Oleh karena itu pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 menyebabkan perbedaan pengeluaran dari

kondisi biasa, ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan. Survei sosial demografi dampak Covid-19 yang dilakukan oleh BPS RI, dari 100 responden, ada sebesar 56% yang mengalami peningkatan pengeluaran, 17% mengalami penurunan pengeluaran, dan sisanya 27% pengeluaran tetap.

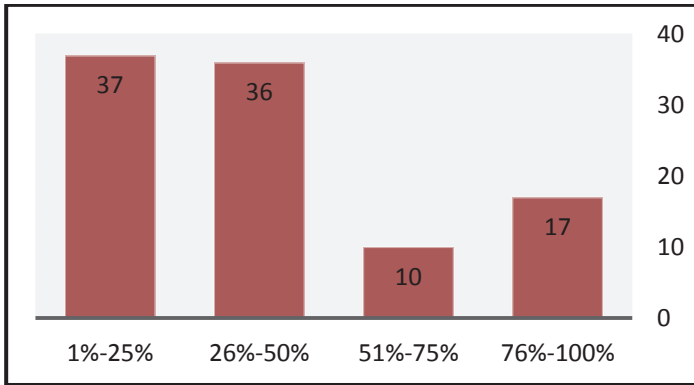


Gambar 4.4 Persentase Peningkatan Pengeluaran
Sumber: BPS RI, 2020

Dari Gambar 4.4 menjelaskan bahwa, persentase tertinggi yaitu 44% (44 orang) responden yang mengalami peningkatan pengeluaran, besarnya antara 26% sampai dengan 50% dibanding sebelum wabah corona tersebut. Namun ada sebesar 11% (11 orang) responden, mengalami peningkatan pengeluaran antara 76% hingga 100%. Pengeluaran untuk makanan merupakan perubahan pengeluaran yang paling dominan. Adanya himbauan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah, dan terus menjaga serta meningkatkan imunitas tubuh menjadi prioritas utama sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga.

Dampak bagi mereka yang terkena PHK, bekerja (sementara dirumahkan), dan yang tidak bekerja lagi, yang berakibat turunnya pendapatan, tentu memberikan warna yang berbeda dalam pengeluaran konsumsi. Walaupun himbauan untuk tetap di rumah berkumpul dengan keluarga, dan diharuskan mengikuti protokol kesehatan, tidak memberikan perubahan dalam pengeluaran, justru kelompok masyarakat ini mengalami penurunan pengeluaran,

karena pendapatan yang menurun atau bahkan tidak ada pendapatan sama sekali.



Gambar 4.5 Persentase Penurunan Pengeluaran
Sumber: BPS RI, 2020

Dari Gambar 4.5 memperlihatkan bahwa ada sebesar 17% (17 orang) responden yang mengalami penurunan pengeluaran antara 76%-100%. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat di dunia. Pengeluaran masyarakat berubah secara drastis oleh Covid-19 ini di seluruh dunia dengan berbagai kategori. Kondisi ini memaksa rumah tangga untuk mengatur ulang pengeluaran. Baker et.al (2020) melakukan penelitian pada masyarakat Amerika Serikat, selama pandemi ini, masyarakat lebih mencermati pendapatan yang mereka terima, termasuk mereka yang terpaksa menjadi pengangguran mampu mengganti dengan pekerjaan jenis baru, dan majikan baru. Pengeluaran rumah tangga secara *online* lebih banyak dilakukan, namun ditemukan bahwa orang yang lebih tua mengalami perubahan perilaku dan mengurangi konsumsi.

Langkah pemerintah dalam menangani dampak Covid-19 dinilai sudah tepat. *Pertama*, meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka menanggulangi wabah corona. *Kedua*, memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang terdampak, antara lain masyarakat yang terpaksa menjadi pengangguran, berhentinya usaha

di sektor informal, penurunan pendapatan. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan dunia usaha, dengan memberikan bantuan usaha UMKM. Selain itu, pemerintah juga telah meluncurkan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta melalui Bank BRI. Stimulus ini diberikan pemerintah dalam bentuk tambahan modal usaha mikro yang belum pernah mengajukan kredit usaha di bank atau lembaga keuangan lainnya. Kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat mendukung dunia usaha untuk terus beroperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun langkah pemerintah ini belum cukup dalam menangani masalah pandemi ini, perlu ada kebijakan lain terutama yang berkaitan dengan perubahan pendapatan dan pola konsumsi masyarakat di masa pandemi Covid-19. Sumber Daya Manusia (SDM) perlu diperkuat, dalam kondisi yang sehat, seseorang dapat berpikir jernih dan jeli untuk melihat peluang bisnis dalam rangka meningkatkan penghasilan, atau bahkan untuk mendapatkan penghasilan yang sebelumnya hilang akibat PHK, atau bisnis yang tidak berjalan normal. Perlu meningkatkan kemampuan SDM dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Pemerintah sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Melalui pelatihan singkat, diharapkan memberikan motivasi dan membuka wawasan untuk melakukan suatu aktivitas/usaha yang pada akhirnya dapat mendatangkan penghasilan.

Dalam kondisi pandemi seperti ini, ruang gerak masyarakat terbatas, sehingga mendorong berkembangnya penjualan secara *online* untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Penjualan secara *online* diprediksi akan terus berlanjut setelah pandemi mereda. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi masyarakat mampu mengubah perilaku masyarakat menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang dipilih. Kemudahan berbelanja yang dapat dilakukan dimana saja, menghemat tenaga dan waktu, serta mudah dilakukan. Sebaliknya, penjualan secara *online* ini justru memunculkan kemungkinan terjadi kecurangan atau kekeliruan yang dapat merugikan konsumen. Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan



Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap perlu ada ketegasan dari Pemerintah atas penerapan Undang-Undang tersebut untuk tetap menjaga dan melindungi konsumen dan pelaku bisnis.

4.5 Penutup

Pola konsumsi masyarakat merupakan informasi untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Sebagai indikator kesejahteraan, tingkat konsumsi akan menentukan kualitas pembangunan manusia yang terekam dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Munculnya pandemi Covid-19 awal bulan Maret 2020 di Indonesia dan pemberlakuan *sosial distancing* mempengaruhi perubahan perilaku konsumen. Himbauan pemerintah untuk tetap di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan melaksanakan aktivitas lainnya dari rumah, merubah cara masyarakat melakukan pengeluaran konsumsinya melalui teknologi digital (berbasis *online*). Layanan belanja secara online dan pengiriman ke rumah pun menjadi permintaan konsumen.

Keharusan untuk mengisolasi diri dari dunia luar dan ketidakpastian kapan akan berakhirnya pandemi ini berdampak pada pendapatan masyarakat. Tidak sedikit usaha mengalami penurunan produksi akibat penurunan penjualan hasil produksi mengakibatkan penurunan pendapatan usaha. Banyak usaha yang gulung tikar, mengurangi jumlah karyawan maupun pemotongan gaji karyawan, dan dirumahkan, akibatnya adanya penurunan pendapatanyang diterima oleh masyarakat yang akan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan dan penurunan pengeluaran masyarakat. Berdasarkan Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 yang dilakukan oleh BPS RI, ditemukan hasil bahwa pengeluaran untuk makanan merupakan perubahan pengeluaran yang paling dominan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakat menurunnya pendapatan akibat dari pelaku usaha yang menutup sementara usahanya bahkan secara permanen, maka langkah

pemerintah antara lain memberikan bantuan kepada masyarakat kecil yang terdampak, dan meningkatkan ketahanan dunia usaha dengan meluncurkan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) melalui Bank BRI dan lembaga keuangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Australian Bureau of Statistics. 2020. *Australian National Accounts: National Income, Expenditure and Product*. Canberra.
- Baker, Scott R, et.al. 2020. How Does Household Spending Respond To An Epidemic? Consumption During The 2020 COVID-19 Pandemic. *NBER Working Paper Series 26949*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2020. *Susenas September 2019*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2020. *Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19*. Jakarta: BPS.
- Branson, Willian H. 1989. *Macroeconomic Theory and Policy* (Third Edition). New York: Harper & Row Publisher.
- Gityandraputra, Dimas. 2020. *Seperti Apa Perubahan Pola Perilaku Konsumsi di Masa Pandemi Ini?*. <https://marketingcraft.getcraft.com/id-researches/perubahan-pola-perilaku-konsumsi-di-masa-pandemi>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2020.
- Hong, Efendi Haslim. 2020. *Perilaku Konsumen Baru Setelah Pandemi COVID-19*. <https://m.atmajaya.ac.id/web/Konten.aspx?gid=highlight&cid=perilaku-konsumen-baru-setelah-pandemi>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2020.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Juru Bicara Penanganan COVID-19: Pertumbuhan Kasus Baru dan Total Kasus COVID-19 Data Per 13 Juni 2020*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Stanciu, Silviu, et.al. 2020. Consumer Behavior in Crisis Situations, Research On the Effects of Covid-19 in Romania. *Annals of Dunarea de Jos University of Gelati Fascicle I. Economics and Applied Informatics*, Vol. XXVI, No. 1, pp. 5-13.



Vargas, Daniel Murillo. 2020. How The Covid-19 Pandemic is Influencing Consumer Behavior. <https://www.contentserv.com/en/blog/how-covid-19-pandemic-is-influencing-consumer-behavior/>. Diakses pada tanggal 16 April 2020.



Bab 5

TRADEOFF WAKTU KERJA DAN WAKTU LUANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Nurlina T Muhyiddin, Kgs. Muhammad Sobri, Aning Kesuma Putri

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku kehidupan ekonomi pekerja dengan bekerja secara *online*, *offline* atau kombinasi antara keduanya. Perubahan pola bekerja terjadi juga pada sektor jasa pendidikan, tak terkecuali pola bekerja dosen ilmu sosial dan ilmu sains di perguruan tinggi swasta (PTS) di kota Palembang. Dengan menggunakan model *Firsch Elasticity* ingin diketahui tingkat utilitas dan *tradeoff* antara waktu kerja dan waktu luang. Hasil penelitian pada masa Covid-19 menunjukkan: (1) *Firsch Elasticity intensive margin* kedua kelompok dosen ini berpengaruh signifikan terhadap utilitas, sedangkan koefisien elastisitas jam kerja *online* bersifat inelastis dengan persentase yang berbeda, (2) *Tradeoff* antara waktu kerja terhadap pendapatan: a. bagi dosen ilmu sosial jam kerja *online* dan *offline* berpengaruh signifikan, yang berarti lebih banyak menggunakan waktu kerja dibandingkan waktu luang, b) bagi dosen ilmu sains, mengajar dengan sistem *online* maupun *offline* tidak berpengaruh signifikan. Untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 yang relatif lama maka pemerintah perlu meningkatkan bantuan dana dan kemampuan *software* dalam rangka meningkatkan motivasi Dosen dan mahasiswa.

Kata Kunci: *tradeoff*, waktu luang, waktu kerja



Abstract

The Covid-19 pandemic has changed workers' economic life by working online, offline, or a mixture of the two. Changes in work patterns also occur in the education service sector, including the work patterns of social science and science lecturers at private universities (PTS) in Palembang. Using the Firsch Elasticity model, we want to know the level of utility and the tradeoff between work and leisure time. The research conclude: (1) Firsch elasticity intensive margin of the two groups of lecturers has a significant effect on utility, while the elasticity coefficient of online working hours is inelastic with different percentages, (2) tradeoff between working time and income: a. for social science lecturers, online and offline working hours have a significant effect, which means that they use more work time than their spare time, b) for science lecturers, teaching using the online and offline system does not have a significant effect. To anticipate the relatively long Covid-19 pandemic, the government needs to increase financial assistance and software capabilities in order to increase the motivation of lecturers and students.

Keywords: *tradeoff, leisure, working time.*

5.1 Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku pekerja dalam kehidupan ekonominya. Data BPS (2020) menunjukkan pada masa pandemi Covid-19 banyak pekerja di PHK (pemutusan hubungan kerja). Namun ada sebagian bidang usaha yang melakukan WFH (*work from home*) atau melakukan *shift* kerja, yang berdampak pada penurunan pendapatan. Hal ini diakui oleh pekerja laki-laki (41,91%) dan pekerja perempuan (38,55%) (BPS, 2020). Pemberlakuan WFH dan *shift* kerja terjadi di semua sektor, termasuk sektor jasa pendidikan di PTS (Perguruan Tinggi Swasta) khususnya bagi para dosen. Salah satu dampak dari pemberlakuan WFH pada dosen PTS adalah berubahnya jumlah waktu kerja dan waktu luang yang berakibat pada perubahan pencapaian utilitas sebelum dan semasa pandemi Covid-19. Perubahan ini menyebabkan terjadinya *tradeoff* (pengorbanan) antara waktu kerja dan waktu luang.

Analisa difokuskan pada dosen PTS berakreditasi B yang berlokasi di Palembang dan dipilih secara *purposive*. Dua PTS dimaksud adalah UMP (Universitas Muhammadiyah Palembang) dan Universitas Tridinanti dan yang dipilih adalah dosen ilmu sosial diwakili dosen Fakultas Ekonomi dan dosen ilmu sains diwakili dosen Fakultas Teknik. Perbedaan kelompok ilmu ini untuk melihat apakah ada perbedaan karaktersitik, sikap dan persepsi dari dua kelompok tersebut yang menyebabkan adanya perbedaan dalam penggunaan waktu kerja dan waktu luang dalam upaya pencapaian utilitas maksimum.

5.2 Tradeoff Waktu Kerja dan Waktu Luang

Tradeoff adalah situasi dimana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih dengan mengorbankan salah satu aspek untuk memperoleh aspek lainnya dengan kualitas yang lebih baik. Pilihan *tradeoff* ini akan berdampak pada peningkatan dan penurunan pendapatan. Bila pendapatan yang diperoleh meningkat bermakna semakin tinggi utilitas yang dapat dicapai dan sebaliknya. Dalam kenyataan, perilaku pekerja untuk mencapai utilitas dipengaruhi faktor *extensive margin* dan *intensive margin* (Kuroda dan Yamamoto, 2003). *Extensive margin* adalah keadaan dimana pekerja akan merespon perubahan upah dengan berpindah kerja. Sedangkan *intensive margin* adalah respon pekerja atas perubahan upah berdasarkan umur, jenis kelamin, jam kerja dan *prepeature* (daerah) (Blundell, et. al 2013; Otamurodov dan Zhong, 2016). Respon pekerja ini menunjukkan sisi penawaran tenaga kerja. Tulisan ini fokus pada pembahasan tentang *intensive margin*.

Fungsi utilitas *Frisch Elasticity intensive margin* (Kuroda dan Yamamoto 2009) dapat dilihat pada persamaan (1) dan konstrain anggaran pada persamaan (2) berikut:

$$U = \sum [\beta^t u(c_t, h_t, x_t)] \quad (1)$$

$$a_{(t+1)} - a_t = r_t a_t + w_t h_t - p_t c_t + y_t \quad (2)$$

β adalah *discount rate* pada periode t ,
 c_t konsumsi,
 h_t jam kerja,
 x_t atribut individu mengandung variabel yang mempengaruhi utiliti,
 a_t aset,
 r_t tingkat bunga nyata,
 w_t tingkat upah nyata,
 p_t harga barang dan
 y_t *non-wage income*.

Untuk sederhananya, diasumsikan fungsi utiliti adalah:

$$U_c(c_t, h_t, x) = \lambda_t P_t \quad (3)$$

$$U_h(c_t, h_t, x_t) = \lambda_t w_t \quad (4)$$

$$\lambda_t = \beta(I + r_t)\lambda_{t+1} \quad (5)$$

$$c_t = c(p_t, w_t, x_t, \lambda_t) \quad (6)$$

$$h_t = h(p_t, w_t, x_t, \lambda_t) \quad (7)$$

$$\lambda_t = \lambda_{t+1} + K_t \quad (8)$$

dimana λ_t adalah *marginal utility of wealth*, dan $K_t = \ln(\beta(1+r_t))$ dan dengan menggunakan persamaan 7, *Frisch elasticity* adalah:

$$n_t = \left. \frac{\partial h_t}{\partial w_t} \right| = h_w = \frac{\partial h(p_t, w_t, x_t, \lambda_t)}{\partial w_t} \quad (9)$$

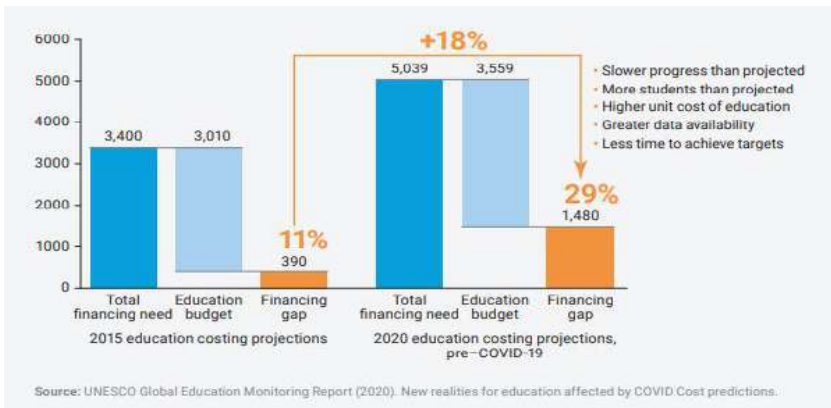
Persamaan (9) mengindikasikan elastisitas upah terhadap jam kerja.

5.3 Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pendidikan

Covid-19 membuat roda perekonomian berubah, kegiatan tidak lagi dilakukan di ruang publik, tetapi di ruang-ruang individual. Di sektor pendidikan, proses belajar-mengajar dilakukan secara sistem *online*. Perubahan perilaku ini berdampak positif maupun negatif. Dampak positif digambarkan dengan

perubahan perilaku dosen yang awalnya tidak familiar dengan IT (*information technology*), sekarang ‘terpaksa’ untuk memahami IT. Sedangkan dampak negatif adalah adanya tambahan biaya untuk melengkapi sarana dan prasarana IT serta mengubah interaksi sosial dari berkomunitas menjadi individualistis, dosen lebih sering berkreaitivitas dengan menggunakan teknologi digital.

Pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada perubahan perilaku tetapi juga pada anggaran pendidikan. UNESCO (2020) memaparkan anggaran pendidikan sebelum dan semasa Covid-19 (Gambar 5.1). Pada tahun 2015 terjadi gap antara anggaran yang dibutuhkan dan realisasi yakni sebesar 11%. Tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19, gap melonjak demikian tinggi menjadi 29%.



Gambar 5.1 Anggaran Pendidikan Sebelum dan Semasa Covid-19

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 di seluruh dunia, mengharuskan Unesco menargetkan anggaran pendidikan pada tahun 2020 sebesar 5.039 milyar dolar, yang berarti naik 32% dari target anggaran tahun 2015 sebesar 3.400 milyar dolar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemajuan pendidikan yang melambat, meningkatnya jumlah pelajar yang perlu mendapat perhatian, biaya pendidikan serta target pendidikan yang hendak dicapai.



Di Indonesia, sebelum Covid-19 secara makro pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 senilai 5,3%. Tetapi enam bulan sejak Covid-19 dari Februari-Agustus 2020, pertumbuhan ekonomi turun dengan minus 5,32% (Kemenkeu, 2020). Oleh karena itu, pemerintah merevisi APBN Indonesia sebanyak dua kali dalam upaya menyelesaikan kasus Covid-19. Revisi pertama menargetkan kondisi pertumbuhan ekonomi pada posisi 2,3% sampai minus 0,4%. Selanjutnya revisi kedua menargetkan pertumbuhan ekonomi dari 1,0% sampai minus 0,41% (Peraturan Presiden No.52/2020) (Tabel 5.1). Revisi RAPBN ini menandakan upaya pemerintah yang cukup besar dalam penanggulangan Covid-19.

Tabel 5.1 Kondisi Makro Indonesia 2020

Makro Ekonomi	Asumsi RAPBN 2020	PERPRES No.52/2020	PERPRES No.72/2020
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	2,3 sd -0,4	1,0 sd 0,41
NilaiTukar (IDR)	14.400	15.800 sd18.500	14.500 sd 14.800

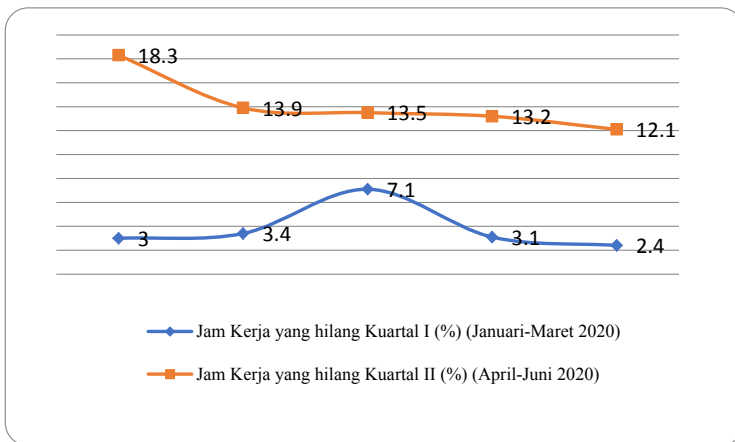
Sumber: Kemenkeu, 2020

Revisi pemerintah yang terjadi dua kali disebabkan semua sektor produksi mengalami pertumbuhan yang menurun, termasuk sektor pendidikan. Kuartal-I tahun 2020, sector pelayanan pendidikan tumbuh menjadi 5,89% kemudian pada kuartal-II turun menjadi 1,21% (BPS, 2020). Turunnya pertumbuhan sektor pendidikan berdampak pada penurunan anggaran pendidikan dan perubahan perilaku jam kerja dosen.

5.4 Perubahan Jam Kerja Akibat Pandemi Covid-19

Pada tanggal 1 Juli 2020, ILO (*International Labor Organization*) merilis penurunan jam kerja di dunia akibat pandemi Covid-19 dengan rata-rata 14% dan paling banyak terjadi pada kuartal II. Di Asia Tenggara kehilangan jumlah jam kerja pada kuartal I sebesar 2,1% dan meningkat tajam pada kuartal II menjadi 12,7% (Gambar 5.2). Kondisi Asia Tenggara diasumsikan terjadi juga di Indonesia, mengingat Indonesia termasuk dalam wilayah Asia

Tenggara. Kehilangan jam kerja merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pencapaian utilitas maksimum, di samping variabel lain yang telah dinyatakan dalam persamaan (1) di atas. Perubahan jam kerja terjadi juga pada para dosen. Sebelum pandemi Covid-19 jadwal belajar-mengajar dilakukan secara tatap muka berkisar 40 jam perminggu. Semasa pandemi Covid-19 perubahan jam kerja terjadi dengan dilakukannya kegiatan belajar mengajar secara daring, yang memerlukan waktu lebih singkat atau lebih lama.



Gambar 5.2 Jumlah Jam Kerja yang Hilang di Beberapa Negara
Sumber: ILO 2020 (modifikasi)

Keterangan: (1) Amerika, (2) Eropa dan Asia, (3) Asia Pasifik, (4) Afrika Tengah, (5) Arab

5.5 Kajian Deskriptif

Analisa pada bagian ini berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dengan *google form*. Kuesioner yang kembali berjumlah 104 dengan rincian 60 responden dosen ilmu sosial dan 44 responden dosen ilmu sains. Dalam kajian ini dibedakan: (a) Lamanya waktu bekerja dosen, (b) Jabatan fungsional, dan (c) Status dosen.

5.5.1 Deskripsi Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Sains

Komposisi dosen untuk ilmu sosial didominasi oleh perempuan, sedangkan untuk ilmu sains memperlihatkan komposisi



yang relatif sama antara perempuan dan laki-laki. Status dosen pada ilmu sosial dan ilmu sains didominasi sebagai dosen Yayasan dengan persentase yang berbeda. Demikian juga sebagian besar dosen dalam dua kelompok ilmu tersebut telah memiliki jabatan fungsional.

Dari sisi pendidikan yang ditamatkan oleh dua kelompok ilmu yang terbanyak adalah pendidikan Strata 2, dan lama bekerja lebih dari 5 tahun (Tabel 5.2).

Tabel 5.2 Deskripsi Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Sains

Variabel	Bidang Ilmu (%)	
	Ilmu Sosial	Ilmu Sains
Dosen		
• Perempuan	70,00	59,10
• Laki-Laki	30,00	40,90
Status Dosen		
• Yayasan	90,00	81,80
• Kopertis	10,00	18,20
Jabatan Fungsional		
• Ada	95,00	84,10
• Tidak Ada	5,00	15,90
Pendidikan		
• S2	83,3	81,8
• S3	16,7	18,2
Lama Bekerja		
• ≤ 5 tahun	25,0	25,00
• > 5 Tahun	75,0	75,00
(N)	(60)	(44)

Sumber: Hasil Penelitian 2020

Asset yang dimiliki dan pendapatan yang diterima termasuk indikator utilitas. Dari hasil penelitian lapangan, diketahui asset yang dimiliki para dosen adalah rumah, emas, deposito, tanah dan kredit. Beberapa asset mengalami perubahan (bertambah atau berkurang) sebelum dan semasa pandemic Covid-19 adalah emas, deposito, tanah dan kredit dengan variasi persentase yang berbeda. Sementara asset kepemilikan rumah tidak ada perubahan (Tabel 5.3).

Tabel 5.3
Aset Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Sains Sebelum dan Semasa Covid-19

Sebelum Covid-19	Ilmu Sosial (%)		Ilmu Sains (%)	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Rumah	90,0	10,0	75,0	25,0
Emas	61,7	38,3	52,3	47,7
Deposito	25,0	75,0	9,1	90,9
Tanah	68,3	31,7	59,1	40,9
Kredit	45,0	55,0	52,3	47,7
Saat Covid-19	Dosen Ilmu Sosial (%)		Dosen Ilmu Sains (%)	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Rumah	90,0	10,0	75,0	25,0
Emas	60,0	40,0	52,3	47,7
Deposito	23,3	76,7	9,1	90,9
Tanah	70,0	30,0	56,8	43,2
Kredit	43,3	56,7	45,5	54,5

Sumber: Hasil Penelitian 2020

5.5.2 Pendapatan Sebelum dan Semasa Covid-19

Pendapatan yang dimiliki dosen terdiri dari gaji, renumerasi, uang makan, uang transportasi, uang insentif mengajar, uang jabatan structural, uang sertifikasi dosen dan tunjangan BPJS tenaga kerja. Adanya perbedaan pendapatan antara dosen disebabkan ada yang bekerja kurang dari 5 tahun dan ada yang lebih dari 5 tahun, dan ada perbedaan jenjang jabatan fungsional dan jabatan structural. Perbedaan ini menyebabkan range pendapatan yang demikian lebar. Pendapatan minimum-maksimum antar dosen sebagai berikut:

- a. Dosen ilmu sosial, sebelum Covid-19: Rp 1.218.000 sd Rp 12.600.000 dan semasa Covid-19: Rp 1.368.000 sd Rp 15.300.000.
- b. Dosen ilmu sains, sebelum Covid-19: Rp 1.810.000 sd Rp 9.446.000 dan semasa Covid 19: Rp 1.810.000 sd Rp 9.246.000.



Dosen yang memperoleh pendapatan minimum merupakan dosen yang bekerja kurang dari 5 tahun dan belum memiliki jabatan fungsional. Sedangkan dosen yang berpendapatan maksimum merupakan dosen yang telah mengajar lebih dari 5 tahun dan memiliki jabatan fungsional (asisten ahli, lektor dan lektor kepala). Dari interval pendapatan yang demikian besar dapat diketahui rata-rata pendapatan per bulan yang diterima:

- a. Dosen ilmu sosial sebelum Covid-19 sebesar Rp 4.735.650 dan saat Covid-19 sebesar Rp 5.394.787
- b. Dosen ilmu sains sebelum Covid-19 Rp 3.827.143 dan saat Covid-19 Rp 4.453.958

Rata-rata pendapatan yang dinyatakan di atas belum mencerminkan tingkat kesejahteraan. Untuk itu, perlu melihat pendapatan responden berdasarkan upah minimum kota Palembang (UMK Palembang). UMK mencerminkan tingkat kesejahteraan karena pembentukan upah minimum telah mempertimbangkan kebutuhan hidup dan inflasi yang terjadi di daerah. UMK Palembang per bulan sebelum dan semasa Covid-19 adalah Rp 2.805.751 dan Rp 3.165.519.

Tabel 5.4 menunjukkan pendapatan dosen Ilmu Sosial sebelum dan semasa Covid-19 persentase terbanyak berada di atas dan di bawah UMK Palembang. Untuk dosen ilmu sains, sebelum dan semasa Covid-19 terbanyak berada di bawah UMK Palembang. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UMK Palembang tingkat kesejahteraan dosen ilmu sosial lebih baik dari dosen ilmu sains sebelum maupun semasa Covid-19.

Tabel 5.4 Pendapatan Perbulan Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Sains

Pendapatan/bulan	Kelompok Dosen (%)		
	Ilmu Sosial (1)	Ilmu Sains (2)	(1) + (2)
Sebelum Covid-19			
• > Rp 2.805.751	63,3	45,5	55,7
• ≤ Rp 2.805.751	36,7	54,5	44,3
(N)	(60)	(40)	(104)
Saat Covid-19			
• > Rp 3.165.519	48,3	29,5	40,4
• ≤ Rp 3.165.519	51,7	70,5	59,6
(N)	(60)	(40)	(104)

Sumber : Hasil Penelitian 2020

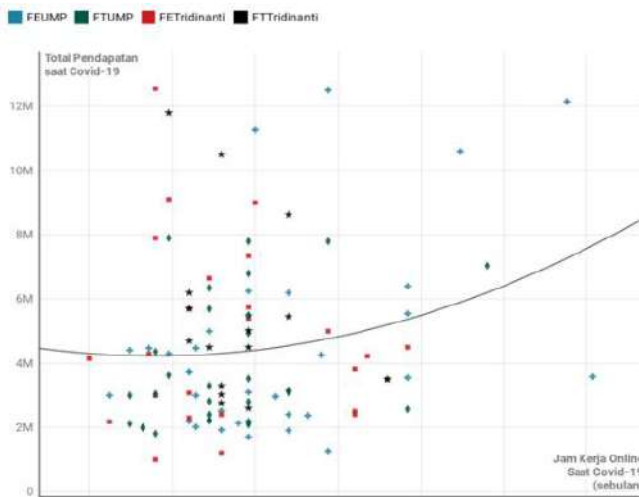
5.5.3 Jam Kerja *Online*, *Offline*, dan Pendapatan Saat Covid-19

Menurut ketentuan UU No.13 Tahun 2003 pasal 77 sd 85 jam kerja normal yang berlaku untuk pekerja (termasuk dosen) adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu atau 160 jam per bulan. Tidak menutup kemungkinan ada yang bekerja lebih dari 160 jam perbulan. Untuk itu, analisa jam kerja dan pendapatan dibedakan antara jam kerja ≤ 160 jam dan > 160 jam.

1. Jam Kerja *Online* dan Pendapatan

Sebelum Covid-19, hampir tidak ada dosen yang menggunakan sistem pembelajaran *online* dan sistem ini secara umum mulai berlaku ketika pandemi Covid-19 terjadi. Dalam upaya mencegah dan mengurangi penyebaran pandemi Covid-19, Pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), untuk kalangan pendidik mulai dari tingkat TK (Taman Kanak-Kanak) sampai PT (Perguruan Tinggi). Akibatnya pola belajar-mengajar beralih dari belajar di ruang kelas menjadi bersekolah dari rumah. Berbagai aplikasi belajar *online* digunakan, mulai dari tatap muka via virtual dengan zoom, google meet, whatsapp video call dan aplikasi lainnya.

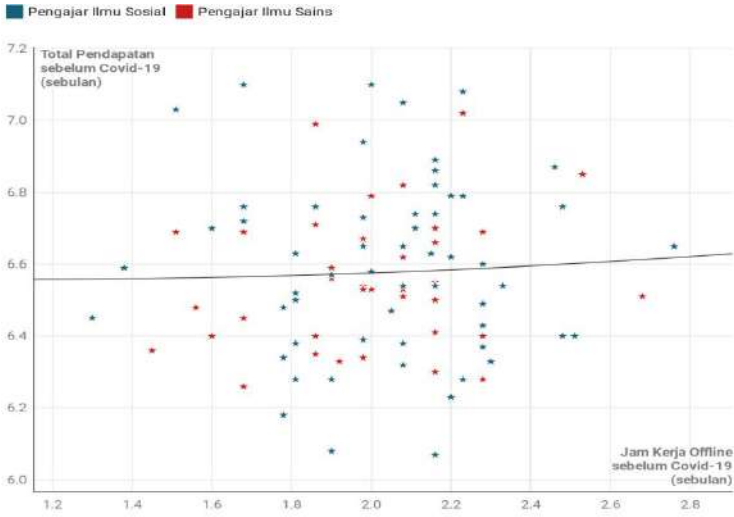
Pada awalnya, kegiatan dengan sistem *online* tidak mempengaruhi pendapatan, hal ini disebabkan sebagian besar dosen sudah terbiasa menggunakan beberapa aplikasi yang disebutkan di atas. Pada fase berikutnya, dengan adanya bantuan kuota dan pulsa, sementara ada penghematan biaya transportasi dan biaya konsumsi bila mengajar di ruang kelas, maka yang terjadi adalah adanya peningkatan pendapatan yang diterima dosen. Gambar 5.3 memperlihatkan sistem pembelajaran *online* membentuk kurva seperti kurva penawaran tenaga kerja, bertambah jam *online* akan menyebabkan bertambahnya pendapatan yang diperoleh.



Gambar 5.3 Jam Kerja *Online* dan Pendapatan Saat Pandemi Covid-19
Sumber : Hasil Penelitian 2020

2. Jam Kerja *Offline* dan Pendapatan

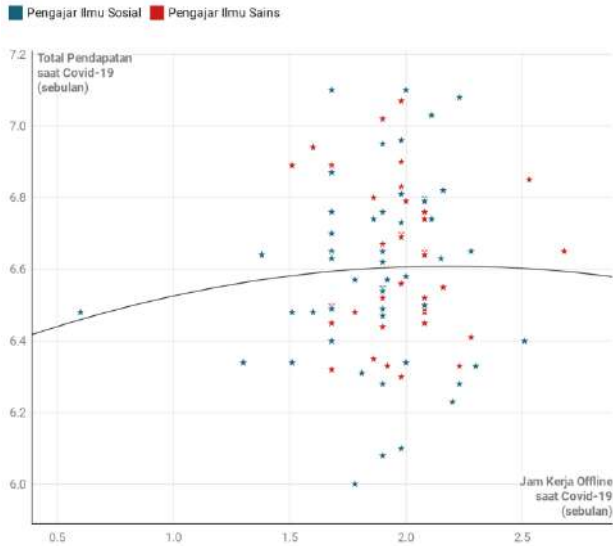
Jam kerja *offline* adalah jam kerja untuk mengajar yang dilakukan di kelas dengan bertatap muka. Sebelum Covid-19, kurva kuadran hubungan jam kerja *offline* dengan pendapatan berbentuk elastis, artinya persentase pertambahan jam kerja *offline* menyebabkan persentase pertambahan penerimaan pendapatan (Gambar 5.4), meskipun pertambahan pendapatan tidak demikian besar. Pertambahan pendapatan ini terkait dengan penerimaan renumerasi.



Gambar 5.4 Jam Kerja *Offline* dan Pendapatan Sebelum Covid-19
Sumber: Hasil Penelitian 2020

Saat Covid-19, hubungan antara jam kerja *offline* dan pendapatan berbentuk kurva “*diminishing return*”. Pada awalnya, tambahan jam kerja akan meningkatkan pendapatan, tetapi jika jam kerja terus ditambah maka pada satu titik tertentu pendapatan akan menurun (Gambar 5.5). Pertambahan jam kerja menandai semakin lama waktu kerja yang tentu akan memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Selain itu, ada pengeluaran untuk transportasi yang tidak mungkin dapat dihindarkan.

Dari sisi lain, ada sebagian dosen khususnya dosen perempuan yang ketika mengajar *offline* tidak dapat melakukan pengawasan dan mengajar anak-anak mereka dalam kegiatan belajar *online*. Akibatnya, para dosen perempuan ini akan ada mengalihkan tugasnya ke guru privat, atau ke teman atau ke saudara. Hal ini tentu berakibat ada tambahan pengeluaran dan berdampak pada penurunan pendapatan.



Gambar 5.5 Jam Kerja *Offline* dan Pendapatan Saat Covid-19
Sumber: Hasil Penelitian 2020

3. Rata-Rata Jam Mengajar dengan Sistem *Online* dan *Offline*

Rata-rata jam mengajar hanya akan dilihat saat terjadi Covid-19, sebab sebelum Covid-19 hampir tidak ada yang mengajar dengan sistem *online*. Tabel 5.5 memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

- Dosen ilmu sosial yang menggunakan sistem *online* lebih tinggi dari yang menggunakan sistem *offline*, 98,7 jam berbanding 87,6 jam.
- Dosen ilmu sains yang menggunakan sistem *offline* lebih tinggi dari sistem *online*, 113,6 jam berbanding 84,8 jam.
- Rata-rata jam mengajar *offline* dosen ilmu sains lebih tinggi dari ilmu sosial. Hal ini disebabkan dosen ilmu sains masih menggunakan tatap muka terutama bila bekerja di laboratorium.
- Ditinjau dari sisi kontribusi terhadap jam kerja, persentase terbanyak dari kedua kelompok dosen ini adalah mengajar dengan jam kerja ≤ 160 jam.
- Khusus untuk Dosen ilmu sosial, tidak ada perbedaan persentase kontribusi saat mengajar *online* maupun *offline*.

Jika dapat mencapai 160 jam bermakna telah memenuhi syarat mengajar yang ditetapkan. Tetapi jika <160 jam, apakah kondisi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan. Namun, kemungkinan lain adalah para dosen memberikan pekerjaan rumah yang tidak terdeteksi jumlah jam kerjanya. Jumlah jam kerja saat Covid-19 baik dengan sistem *online* dan juga *offline* dalam 1 bulan. Dosen ilmu sosial *online* 98,7 jam (5.922 jam/60), *offline* 87,6 jam (5.255 jam/60). Dosen ilmu sains *online* 84,8 jam (3.731/44) dan *offline* 131,2 jam (5773 jam/44)

Tabel 5.5 Rata-Rata Jam Mengajar Sistem *Online* dan *Offline* Saat Pandemi Covid-19

Jam Mengajar Saat Covid-19	Ilmu Sosial	Ilmu Sains
System Online		
• > 160 jam	13,3	9,1
• ≤ 160 jam	86,7	90,9
Rata-Rata Jam Mengajar	98,7 jam	84,8 jam
System Offline		
• > 160 jam	13,3	11,4
• ≤ 160 jam	86,7	88,6
Rata-Rata Jam Mengajar	87,6 jam	113,6 jam

Sumber: Hasil Penelitian 2020

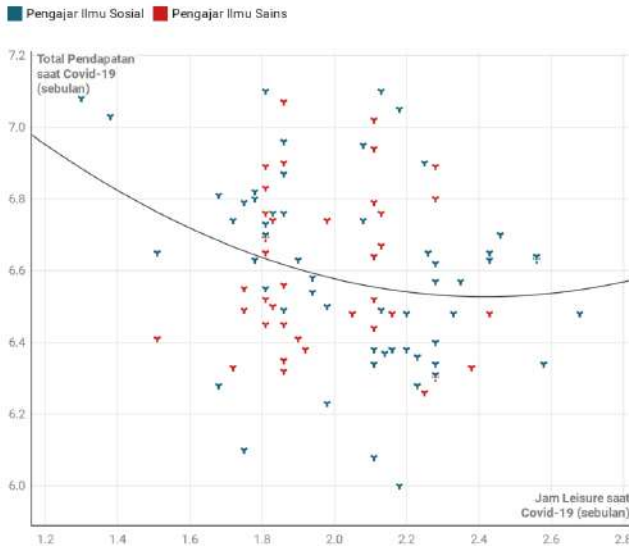
5.5.4 Pendapatan dan Waktu Luang Sebelum dan Saat Covid-19

Waktu luang adalah waktu yang dipergunakan untuk istirahat dan merupakan waktu 24 jam dikurangi dengan waktu kerja baik *online* dan *offline*. Dengan waktu kerja yang ditetapkan 8 jam perhari maka ada waktu luang 16 jam perhari atau 480 jam perbulan. Kaitan antara pendapatan dan waktu luang dapat dilihat pada Gambar 5.6 dan 5.7. Ternyata hubungan antara pendapatan dan waktu luang sebelum dan saat Covid-19 membentuk kurva penawaran tenaga kerja. Artinya, dosen dalam dua kelompok ilmu ini memaksimalkan kepuasannya dengan mengalokasikan waktu mereka dimana pendapatan dikeluarkan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan kepuasan. Sebelum Covid-19, banyak

pekerja dan keluarga menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang menghasilkan kepuasan. Pada saat Covid-19 terlebih saat PSBB diberlakukan, semua aktifitas beralih dari kegiatan tatap muka menjadi menggunakan aplikasi *online*.



Gambar 5.6 Jam Waktu Luang dan Pendapatan Sebelum Covid-19
Sumber: Hasil Penelitian 2020



Gambar 5.7 Jam Waktu Luang dan Pendapatan Saat Covid-19
Sumber: Hasil Penelitian 2020

5.5.5 Konsumsi Pangan dan Non Pangan Sebelum dan Saat Covid-19

1. Konsumsi Pangan

Sebelum Covid-19, konsumsi pangan kelompok ilmu sosial dengan pendapatan di atas atau di bawah UMK Palembang relatif sama, sedangkan untuk kelompok ilmu sains ada perbedaan (Tabel 5.6). Konsumsi pangan melonjak dengan tajam saat Covid-19. Konsumsi pangan pekerja yang memiliki pendapatan lebih besar dari UMK Palembang mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sebab mereka merasa perlu menyiapkan kebutuhan pokok. Perilaku pekerja berpendapatan tinggi tidak bisa diikuti oleh pekerja yang berpendapatan di bawah UMK Palembang. Karena mereka mengalami penurunan pendapatan yang cukup tajam.

Tabel 5.6
Konsumsi Pangan Sebelum dan Saat Covid-19 (%)

Konsumsi Pangan	Ilmu Sosial (1)	Ilmu Sains (2)	(1)+(2)
Sebelum Covid-19 (th 2019)			
• > 2.805.751	50,0	40,9	46,2
• ≤ 2.805.851	50,0	59,1	53,8
(N)	60	44	104
Saat Covid-19 (th 2020)			
• > 3.165.519	91,7	90,9	91,4
• ≤ 3.165.519	8,3	9,1	9,6
(N)	60	44	104

Sumber: Hasil Penelitian 2020

2 Konsumsi Non Pangan

Konsumsi non pangan mencakup antara lain pengeluaran untuk pakaian dan jasa transportasi. Sebelum Covid-19 pengeluaran non pangan untuk kelompok dosen berpendapatan di atas UMK Palembang sangat tinggi, sebaliknya bagi yang berpendapatan di bawah UMK Palembang sangat rendah (Tabel 5.7). Saat terjadi Covid-19 pengeluaran untuk non pangan dari dosen berpendapatan



di atas UMK Palembang menurun dibanding dengan sebelum Covid-19. Hal ini berlaku bagi dosen dari kedua kelompok ilmu. Untuk dosen berpendapatan lebih kecil dari UMK Palembang baik dosen ilmu sosial maupun dosen ilmu sains, terjadi kenaikan pengeluaran non pangan. Diduga kenaikan tersebut digunakan untuk keperluan komunikasi.

Tabel 5.7
Konsumsi Non Pangan Sebelum dan Saat Covid-19 (%)

Konsumsi Non Pangan	Ilmu Sosial (1)	Ilmu Sains (2)	(1)+(2)
Sebelum Covid-19 (th 2019)			
• > 2.805.751	91,67	97,73	94,2
• ≤ 2.805.851	8,33	2,27	5,8
(N)	(60)	(44)	(104)
Saat Covid-19 (th 2020)			
• > 3.165.519	81,67	84,09	82,70
• ≤ 3.165.519	18,33	15,91	17,30
(N)	(60)	(44)	(104)

Sumber: Hasil Penelitian 2020

5.6 Utilitas dan *Tradeoff* Waktu Kerja dan Waktu Luang Saat Covid-19

5.6.1 Utilitas

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa tingkat kepuasan diestimasi dengan menggunakan *Frisch Elasticity* dengan insentive margin dari Kuroda dan Yamamoto (2009) seperti persamaan 1 di atas menjadi persamaan 1a.

$$U = \sum [\beta^t u(c_t, h_t, x_t)] \quad 1a$$

Karena penelitian ini bersifat *cross sectional* maka B_t (*discount rate*) diasumsikan tetap maka persamaan menjadi persamaan 1b. Dalam persamaan ini juga di akomodir variabel Y yang merupakan pendapatan diluar gaji (remunerasi dan bantuan dari pemerintah).

$$U = \sum u(c_t, h_t, x_t, p, Y) \quad 1b$$

Utilitas adalah tingkat kepuasan responden yang dinyatakan dalam bentuk data interval (transformasi dari data ordinal). Persamaan (1b) ditransformasi ke dalam bentuk linear menjadi persamaan (1c) dengan memasukkan jam waktu luang.

$$U_{(t+1)} = U(w_{(t+1)}, Y, x_{(t+1)}, h_t, P_{(t+1)}, L, \lambda_{(t+1)}) \quad 1c$$

- U_{t+1} : utilitas saat Covid-19
- W : upah yang mempresentasikan pengeluaran untuk konsumsi
- Y : sumber pendapatan lain di luar upah perbulan
- $x_{(t+1)}$: variabel atribut dosen dan mewakili atribut adalah lama kerja (Lk)
- h_t : jam kerja yang terbagi atas *online* (JkOn) dan *offline* (JkOff)
- p : persepsi dosen tentang harga
- JL : jam waktu luang
- λ : kesejahteraan dianggap konstan dan tidak dimasukkan ke dalam model

$$\ln U_{(t+1)} = \beta_1 + \alpha \ln w_{(t+1)} + \beta_2 \ln y_{(t+1)} + \beta_3 \ln Lk_{(t+1)} + \beta_4 \ln JkOn_{(t+1)} + \beta_5 \ln JkOff_{(t+1)} + \beta_2 \ln p_{(t+1)} + \beta_5 \ln JL_{(t+1)} + e_{(t+1)}$$

Dari hasil regresi diperoleh F-hitung dosen ilmu sosial dan ilmu sains lebih besar dari F-tabel ($2,323 > 2,172$ dan $2,358 > 2,277$) yang berarti model ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap utilitas. Hasil estimasi secara parsial dengan tingkat kesalahan 5% menunjukkan (estimasi lengkap pada Lampiran 1):

- a) Variabel yang signifikan untuk dosen ilmu sosial adalah jam kerja *online* 0,0124 dan jam waktu luang 0,015. Nilai koefisien elastisitas jam kerja *online* adalah -0,312 bersifat inelastis yang berarti jam kerja *online* tidak sensitif mempengaruhi utilitas. Sementara koefisien elastisitas



waktu luang adalah -1,501 bersifat elastis dan sangat sensitif mempengaruhi utilitas.

- b) Variabel yang signifikan bagi dosen ilmu sains adalah jam *online* $0,012 < 0,05$. Sedangkan koefisien elastisitas 0,252 yang berarti naiknya jam kerja *online* sebesar 1% akan meningkatkan utilitas hanya 0,252%. Hasil ini memperlihatkan bahwa Dosen ilmu sains lebih menyukai kegiatan belajar mengajar secara *offline*.

5.6.2 *Tradeoff Waktu Kerja dan Waktu Luang*

Seperti dikemukakan bahwa *tradeoff* adalah pengorbanan, dan dalam analisa ini pengorbanan waktu kerja untuk memperoleh lebih banyak waktu luang atau sebaliknya. Persamaan 7 digunakan untuk melihat pengaruh perubahan jam kerja *online* dan *offline* terhadap pendapatan pada kelompok dosen ilmu sosial dan ilmu sains saat Covid-19.

$$1 h_t = h(p_t, w_t, x_t, \lambda_t) \quad (7)$$

Persamaan 7 ditransformasi ke persamaan (7a) dan (7b) dengan mengasumsikan λ (kesejahteraan) dan p_t (persepsi tentang harga) adalah konstan. Sedangkan atribut dosen berupa lama kerja tidak dimasukkan ke dalam model karena telah dinyatakan sebagai jam kerja *online* dan jam kerja *offline*.

$$\ln h_t = a + \ln p_t + \ln w_t \quad (7b)$$

$$\ln Jk_{on} + \ln Jk_{off} = a + \ln w_t \quad (7a)$$

Hasil regresi yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 5.8 dengan uraian sebagai berikut:

- a) Jam kerja *online* dan *offline* dosen ilmu sosial saat Covid-19, signifikan. yang berarti perubahan jam kerja *online* maupun *offline* berpengaruh terhadap perubahan pendapatan. Dari estimasi ini dapat disimpulkan terjadi

pengurangan waktu luang, atau dengan kata lain waktu lebih banyak dimanfaatkan untuk bekerja dibandingkan untuk istirahat.

- b) Untuk dosen ilmu sains, mengajar dengan sistem *online* ataupun *offline* tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Beberapa faktor penyebab yang dapat diidentifikasi: (1) sebagian besar dosen ilmu sains adalah dosen muda dan masih dalam posisi dosen luar biasa (kontrak), (2) banyak mata kuliah yang menggunakan laboratorium dan bengkel.

Tabel 5.8
Hasil Estimasi *Tradeoff* Jam Kerja dan Waktu Luang Saat Pandemi Covid-19

Variabel	α	Koef Elastisitas	R ²	DW	t-hit	F-hit	Sig
Dosen Ilmu Sosial							
Jam kerja <i>Online</i>	-1,179	0,372	0,024	2,201	1,717	2,949	0,001
Jam Kerja <i>Offline</i>	2,489	0,128	0,10	2,188	0,687	0,472	0,043
Dosen Ilmu Sains							
Jam kerja <i>Online</i>	1,972	0,154	0,016	1,411	0,804	0,646	0,426
Jam Kerja <i>Offline</i>	6,063	-0,098	0,004	0,691	-0,410	0,161	0,691

Sumber: Hasil Penelitian 2020

5.7 Motivasi Bekerja dan Fasilitas Kampus

Hasil estimasi utilitas dan *tradeoff* di atas terkait juga dengan terpenuhi atau tidaknya fasilitas kampus yang tersedia yang berdampak pada motivasi kerja dosen. Tingkat utilitas terhadap fasilitas kampus sebelum Covid-19 memuaskan karena bisa dimanfaatkan saat pembelajaran *offline* dan saat bekerja di kampus. Saat pandemi Covid-19 terjadi dan sampai saat penelitian dilakukan, motivasi dosen mengalami penurunan meskipun



fasilitas kampus tersedia seperti sediakala (Tabel 5.9). Penerapan kebijakan PSBB mengharuskan dosen bekerja di rumah sehingga berbagai fasilitas kampus yang menunjang proses belajar mengajar tidak bisa digunakan. Fasilitas yang hanya bisa digunakan adalah aplikasi pembelajaran seperti *e-learning* yang sudah disiapkan oleh Universitas. Namun, ada sebagian kecil dosen Ilmu sains menyatakan bahwa mereka tidak terkendala menghadapi pandemi ini. Dalam situasi ini mereka mengambil kesempatan untuk menggunakan beberapa laboratorium/bengkel praktek, yang menyebabkan pekerjaan mereka lebih cepat selesai.

Tabel 5.9
Motivasi Bekerja dengan Adanya Fasilitas Kampus

Motivasi Kerja	Sebelum Covid-19 (%)	Saat Covid-19 (%)
Dosen Ilmu Sosial (N=60)		
• Sangat Termotivasi	50,0	23,3
• Termotivasi	41,6	28,3
• Tidak Termotivasi	6,7	36,7
• Sangat Tidak Termotivasi	1,7	11,7
Dosen Ilmu Sains (N=44)		
• Sangat Termotivasi	43,2	11,4
• Termotivasi	52,3	15,9
• Tidak Termotivasi	4,5	47,7
• Sangat Tidak Termotivasi	0,0	25,0

Sumber: diolah, 2020

5.8 Antisipasi Masa Depan

Banyak pihak memperkirakan pandemic Covid-19 akan segera berakhir pada pertengahan tahun 2021. Ternyata perkiraan tersebut belum memenuhi harapan. Rencana sektor pendidikan yang akan melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka masih belum dapat terlaksana. Hal ini dilakukan demi mencegah semakin banyaknya penularan yang terjadi, terutama dengan adanya jenis baru dari mutasi Covid-19.

Dengan terjadinya hal ini, maka sistem pembelajaran secara *online* akan semakin panjang yang membutuhkan dana dan fasilitas yang berkaitan dengan perlengkapan pembelajaran tersebut. Terhentinya sementara kegiatan belajar mengajar secara *offline* hendaknya digunakan oleh dosen untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi pembelajaran *online*.

Kehadiran pemerintah untuk memfasilitasi agar kegiatan belajar mengajar secara *online* dapat terlaksana sesuai yang diharapkan sangatlah penting. Antara lain meningkatkan besaran dana dan kemampuan *software*. Kondisi ini dapat meningkatkan motivasi para dosen dan tidak terkecuali motivasi mahasiswa.

5.9 Kesimpulan dan Saran

1. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap *tradeoff* waktu kerja dan waktu luang para dosen.
2. Dari sisi *intensive margin*, elastisitas penawaran tenaga kerja kelompok dosen ilmu social bersifat elastis, sedangkan kelompok dosen ilmu sains bersifat inelastis. Berarti bertambahnya jam kerja kelompok dosen ilmu sosial akan meningkatkan pendapatan dalam jumlah relatif besar dibandingkan kelompok ilmu sains.
3. Motivasi bekerja para dosen, baik dosen ilmu sosial maupun ilmu sains mengalami penurunan dikarenakan kurangnya fasilitas yang dimiliki kampus untuk menghadapi pandemi Covid-19. Untuk itu pihak kampus diharuskan melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung semua kegiatan belajar mengajar secara online.
4. Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan ini serta mengantisipasi turunnya motivasi yang diakibatkan semakin panjangnya rentang waktu pandemi Covid-19, perhatian khusus dari Pemerintah sangat diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik; (2016). Statistik Gender Tematik: Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak*, 1–130.
- Blundell, R., Bozio, A., & Laroque, G. (2013). Extensive and intensive margins of labour supply: Work and working hours in the US, the UK and France. *Fiscal Studies*, 34(1), 1–29. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5890.2013.00175.x>
- ILO. (2020). Pemantauan ILO Edisi ke-2 : COVID-19 dan Dunia Kerja. Estimasi dan Analisis Terbaru. *International Labour Organization, April*, 1–12.
- Kemenkeu. (2020). *Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020*. 3291699.
- Kuroda, S., & Yamamoto, I. (2003). Are Japanese Nominal Wages Downwardly Rigid? (Part I): Examinations of Nominal Wage Change Distributions. *Are Japanese Nominal Wages Downwardly Rigid? (Part I): Examinations of Nominal Wage Change Distributions*, 21(2), 1–29.
- Kuroda, S., & Yamamoto, I. (2008). Estimating Frisch labor supply elasticity in Japan. *Journal of the Japanese and International Economies*, 22(4), 566–585. <https://doi.org/10.1016/j.jjie.2008.05.002>
- Otamurodov, S., & Zhong, T. (2016). the Role of Extensive Margin and Intensive Margin in Kazakhstan'S Export Growth. *Ecoforum*, 5(2).
- Reichling, F., & Whalen, C. (2012). Review of Estimates of the Frish Elasticity of Labor Supply. *CBO Working Paper Series, October*, 1–13.
- UNESCO. (2020). UNESCO Covid-19 Education Response. *UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*, 1–6. <https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17506/pdf/75890.pdf>
- Utama, P. (2020). *Pemantauan ILO : COVID-19 dan dunia kerja . Edisi kelima Bagian I . Menengok ke belakang : Gangguan pasar tenaga kerja pada paruh pertama tahun 2020 - skala gangguan global yang belum pernah terjadi sebelumnya.*

Whalen, C., & Reichling, F. (2017). Estimates of the frisch elasticity of labor supply: A review. *Eastern Economic Journal*, 43(1), 37–42. <https://doi.org/10.1057/ej.2015.23>



Lampiran 1

(Dosen Sosial)	Koef. Elastisitas	t-hit	Sig	Ket
Utilitas (U)	11,488	1,483	0,146	Adj R ² = 0,257 F-hit = 2,323 D-W= 1,996
Upah (w)	0,264	0,102	2,584	
Pendapatan di luar upah (Y)	0,011	0,118	0,906	
Persepsi Harga (p)	-0,076	-1,066	-0,209	
Lama Kerja (Lk)	-0,080	-1,471	0,149	
Jam Kerja Online (JkOn)	-0,312	-2,569	0,0124	
Jam Kerja Offline (JkOff)	-0,109	-0,811	0,422	
Jam Leisure (JL)	-1,501	-2,471	0,015	
(Dosen Sains)	Koef. Elastisitas	t-hit	Sig	Ket
Utilitas (U)	-2,948	-0,432	0,670	adjR ² = 0,49 F-Hit= 2,358 DW = 2,002
Upah (w)	-0,030	-0,264	0,794	
Pendapatan di luar upah (Y)	-0,009	-0,256	0,800	
Persepsi harga(p)	0,095	0,853	0,403	
Lama Kerja (Lk)	0,039	0,787	0,440	
Jam Kerja Online (JkOn)	0,252	2,626	0,012	
Jam Kerja Offline (JkOff)	0,156	1,191	0,246	
Jam Leisure (JL)	0,747	0,789	0,438	



Bab 6

KEKUATAN FILANTROPI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASA PANDEMI COVID-19

Lily Rahmawati Harahap

Abstrak

Merebaknya pandemi Covid-19 yang sangat mengejutkan dunia menjadikan semua kegiatan luluh lantak. Virus yang ditularkan melalui tetesan air liur dengan inang manusia, memaksa manusia untuk mengubah kebiasaan hidup yang dilakukan. Adanya jaga jarak secara fisik dan sosial serta kebijakan dilakukannya karantina, berdampak pada lumpuhnya perekonomian. Akibat akhir yang ditimbulkan adalah meningkatnya kemiskinan. Filantropi sosial dan filantropi Islam dengan semua skenarionya, dianggap mampu membantu mengatasi permasalahan akibat pandemi Covid-19 ini. Kegiatan kedermawanan yang tidak membatasi pemberian baik dalam bentuk materi maupun non materi, masyarakat yang berkelebihan maupun yang berkekurangan serta tidak adanya batasan waktu, menjadikan kegiatan ini memiliki potensi sangat besar sebagai salah satu instrumen untuk mengembalikan keadaan khususnya di bidang ekonomi agar menjadi lebih baik.

Kata kunci: ekonomi Covid-19, filantropi sosial, filantropi Islam.



Abstract

The outbreak of the Covid-19 pandemic, which has shocked the world, has destroyed all activities. This virus is transmitted through saliva droplets with human hosts, forcing humans to change their life habits. The existence of physical and social distancing and implementing quarantine has resulted in a paralyzed economy. The final result is increased poverty. With all of their scenarios, social philanthropy and Islamic philanthropy are considered capable of helping to overcome the problems caused by the Covid-19 pandemic. Generosity activities that do not limit giving in both material and non-material forms, people in excess or deficiency and no time limit, make this activity has enormous potential to restore the situation, especially in the economic sector, to be better.

Keywords: *economic Covid-19, social philanthropy, Islamic philanthropy.*

6.1 Pendahuluan

Terjadinya pandemi Covid-19 tidak pernah disangka-sangka oleh manusia selaku khalifah di muka bumi ini. Sedikitnya ilmu manusia tentang apa yang akan terjadi di masa depannya dijelaskan dalam QS Taahaa [20] : 110,

Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.

Istilah pandemi ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena kemampuan virus tersebut menularkan dengan cepat. Sejalan dengan itu, pengertian pandemi menurut KBBI, yaitu wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Awal diketahui munculnya Covid-19 pada permulaan Desember 2019, dimana pemerintah China melaporkan terjadinya suatu penyakit yang menyerang masyarakat di kota Wuhan, provinsi Hubei. Penyakit yang ditimbulkan dari virus yang memperbanyak diri dengan cara menginfeksi makhluk hidup ini ditandai dengan gejala demam di atas 38° C, batuk kering dan sesak napas. Diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus2*

(SARS-CoV-2) dan menyebabkan penyakit yang disebut *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19), penularan antarmanusia terjadi melalui tetesan kecil (*droplet*) yang dikeluarkan dari hidung ataupun mulut ketika yang bersangkutan batuk maupun bersin.

Cepatnya kemampuan virus yang berbentuk bulat bermahkota dan berdiameter 100-120 nanometer ini menularkan, masifnya tingkat kematian manusia yang ditimbulkan serta belum ditemukannya vaksin penangkal pada waktu itu, mengharuskan seluruh negara di dunia melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19 secara cepat dan efektif. Untuk itu diperlukan strategi dan kebijakan dalam rangka memutus rantai penularan. Strategi dan kebijakan yang dilakukan mencakup pembatasan fisik, pemeriksaan *rapid test* dan *swab test*, isolasi, karantina, penelusuran dan identifikasi kontak sampai dengan pencarian pola penyebaran.

Untuk melindungi masyarakatnya dari wabah virus tersebut, setiap negara juga melakukan bentuk antisipasi berupa pembatasan kegiatan bahkan karantina negara (*lockdown*). Ada kalanya kebijakan pembatasan maupun karantina yang dilakukan tersebut tidak direspon baik oleh masyarakat karena dianggap melanggar hak azasi manusia untuk bergerak dan merubah pola hidup yang biasa dilakukan (*normal life*). Tidak patuhnya masyarakat mengakibatkan semakin meningkatnya penularan, mengarah kepada terhentinya kegiatan manusia khususnya kegiatan perekonomian, dan akibat terburuk adalah berujung kepada kematian.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di masa Covid-19 serta mengurangi dampaknya baik secara sosial maupun ekonomi adalah dengan lebih menghidupkan kegiatan filantropi. Secara umum, filantropi merupakan bentuk kedermawanan antara sesama manusia yang tercermin dari kegiatan saling bantu antara masyarakat yang berkelebihan kepada masyarakat yang berkekurangan.

6.2 Gambaran Global di Masa Pandemi Covid-19

Munculnya Covid-19 sebagai suatu pandemi mau tidak mau membuat kebiasaan sehari-hari yang dilakukan manusia menjadi



berubah. Pemerintah di setiap negara dengan otoritas yang dimiliki mengeluarkan peraturan agar masyarakatnya melakukan sebagian besar kegiatan dari rumah. Jika mengharuskan untuk berkegiatan di luar rumah maka harus mengikuti protokol jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) maupun sosial (*social distancing*). Peraturan yang paling ekstrim adalah dengan melakukan penguncian yang biasa disebut dengan karantina wilayah (*lockdown*). Secara umum pengertian *lockdown* adalah suatu peraturan dimana masyarakat yang wilayahnya di *lockdown* tidak dapat keluar rumah dan berkumpul, dinonaktifkannya alat transportasi, kegiatan perkantoran, sekolah dan juga ibadah yang biasanya dilakukan di luar rumah. Walaupun demikian, peraturan *lockdown* tersebut berbeda penerapannya pada masing-masing negara. Ada yang melakukannya dengan sangat ketat dan disiplin, tetapi ada juga yang melakukannya dengan pelonggaran untuk kegiatan tertentu.

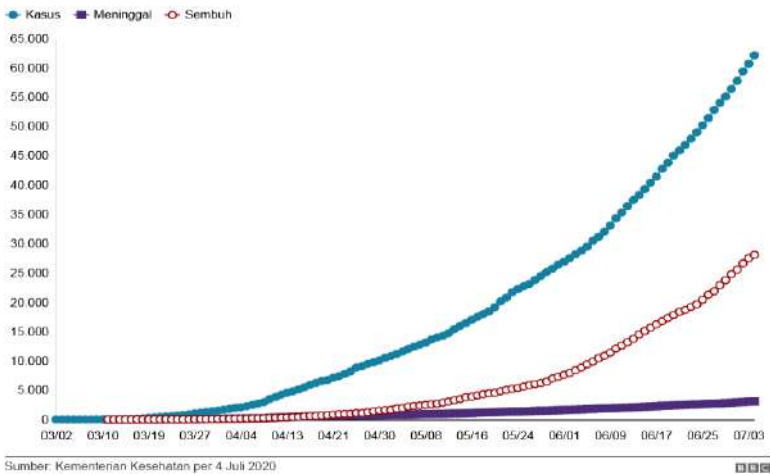
Dengan adanya peraturan tersebut di atas maka ruang gerak dan mobilitas masyarakat menjadi sangat terbatas. Di awal terjadinya pandemi Covid-19 terjadi guncangan secara psikologis dan ekonomi. Guncangan psikologi yang disebabkan oleh pembatasan fisik tersebut menimbulkan ketakutan, kecemasan, stres dan kesepian pada masyarakat karena terasing dari lingkungan sosialnya. Jika hal ini tidak dapat diatasi dan ditangani dengan tepat maka akan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit dan berakhir depresi. Sedangkan pada ekonomi peraturan tersebut menyebabkan penurunan kegiatan produksi, konsumsi dan operasi pada semua aspek dikarenakan banyak masyarakat kesulitan mencari nafkah terutama bagi mereka yang tidak dapat bekerja dari rumah.

Terjadinya pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh sektor kehidupan, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Secara global, dampak negatif yang ditimbulkan adalah: 1) Pembatasan pergerakan lintas batas, 2) Resesi yang berkepanjangan, 3) Disrupsi rantai suplai, 4) Gelombang kebangkrutan, 5) Beberapa industri mengalami kegagalan untuk pulih kembali, 6) Tingkat pengangguran meningkat tajam, 7) Penurunan dan perlambatan

perekonomian. Sedangkan dampak positif yang diperoleh adalah: 1) Masyarakat semakin peduli dengan kesehatan dan kebersihan, 2) Negara-negara di seluruh dunia saling bekerjasama untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini , 3) Manusia bahu-membahu untuk saling bantu, 4) Meningkatnya kreatifitas dan inovasi, 5) Peningkatan produksi dan penggunaan produk lokal.

6.3. Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

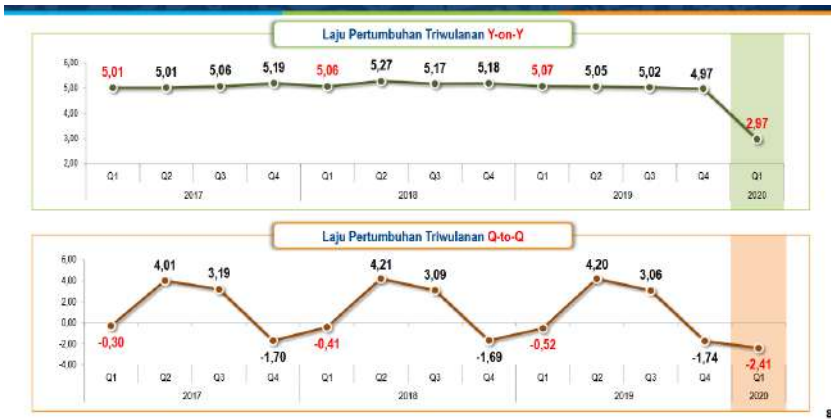
Masuknya Covid-19 di Indonesia diumumkan pada awal Maret 2020 dimana angka kasus terpapar terus mengalami peningkatan. Sejak pertengahan Juni 2020, penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia menembus level angka di atas 1000 orang per hari. Gambar 6.1 menunjukkan jumlah kasus Covid-19 yang terjadi selama rentang waktu 2 Maret - 3 Juli 2020. Positif terpapar mencapai 62.142 orang, sembuh mencapai 28.219 orang dan meninggal mencapai 3.089 orang (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113>, 2020).



Gambar 6.1
Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 2 Maret - 3 Juli 2020
 Sumber: BBC News Indonesia

Secara prosentase perbandingan antara yang terpapar dengan yang sembuh adalah 220%. Dengan kata lain, pada saat 3 orang terpapar, maka pada saat yang sama hanya 1 orang sembuh. Dan perbandingan antara yang terpapar dengan yang meninggal mencapai 2.011%. Dengan kata lain, pada saat 20 orang terpapar, pada saat yang sama 1 orang meninggal. Walaupun perbandingannya sangat kecil, tetapi kehilangan nyawa bukan hal yang bisa dianggap sepele. Kejadian luar biasa ini mengharuskan pemerintah Indonesia bekerja secara luar biasa pula untuk memperkecil dampak yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Perekonomian global pada Triwulan I/2020 diperkirakan mengalami kontraksi setelah Covid-19. Ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia juga mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pembatasan aktifitas dan *lockdown* untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 (<https://www.bps.go.id/>, 2020). Demikian juga dengan perekonomian Indonesia yang tidak dapat menghindar dari kesulitan yang disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19 ini. Sebagai informasi, dapat dilihat laju pertumbuhan PDB Triwulan Indonesia melalui Gambar 6.2.



Gambar 6.2
Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Tahun 2017-2020 (%)
 Sumber : BPS, 2020.

Gambar 6.2 menjelaskan laju pertumbuhan PDB Indonesia dalam triwulanan Y-on-Y maupun Q-to-Q dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Untuk laju pertumbuhan Y-on-Y mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan antara 4,97% sampai dengan 5,27%. Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pertumbuhan PDB Indonesia dalam triwulanan Y-on-Y meluncur drastis menjadi hanya 2,97% setelah sebelumnya sebesar 4,97%. Sedangkan untuk laju pertumbuhan PDB Indonesia dalam triwulanan Q-on-Q mengalami fluktuasi yang signifikan dan pada saat tertentu berada pada persentase minus, dan pada Q1 tahun 2020 terpuruk di -2,41% akibat pandemi Covid-19. Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Seluruh sektor ekonomi mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Salah satunya adalah sektor pariwisata beserta sektor penunjang seperti perhotelan, restoran/ rumah makan dan pengusaha retail. Menurunnya jumlah pelancong dari dalam maupun luar negeri secara drastis mengakibatkan penurunan okupansi hotel dan kunjungan ke restoran/rumah makan, yang mengakibatkan turunnya permintaan produk dari pengusaha retail. Situasi ini secara langsung juga merimbas kepada menurunnya pendapatan pelaku sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi mitra pelaku pariwisata. Terjadi suatu efek domino yang berujung kepada menggelembungnya jumlah pengangguran.

Berdasarkan data yang dilansir BPS pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan dengan periode September 2019. Sehingga pada saat yang sama jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 26,42 juta orang. Peningkatan ini terjadi karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Terjadi perubahan aktifitas perekonomian yang mempengaruhi pendapatan masyarakat.



6.4 Filantropi

Kata kedermawanan yang belakangan ini dikenal dengan kata filantropi (*philanthropy*) sering terdengar seiring dengan semakin banyaknya fenomena sosial, dimana masyarakat saling tolong dan saling bantu satu dengan lainnya. Dalam kegiatannya, filantropi bukan hanya merupakan norma-norma sosial yang menjunjung nilai solidaritas, gotong royong maupun saling bantu, tetapi juga merupakan nilai-nilai religius yang mengajarkan dan menganjurkan untuk melakukan kebajikan (*virtue, benevolence*) (Burlingame, 2006).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemberdayaan kegiatan filantropi semakin luas dan strategis seperti pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan buruh, bidang advokasi, dan lain sebagainya. Filantropi juga merupakan suatu bentuk kesadaran untuk berbagi dengan maksud mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas dalam berbagai bidang kehidupan.

1. Pengertian

Berdasarkan KBBI, kata filantropi digambarkan sebagai cinta kasih (kedermawanan dan sebagainya) kepada sesama. Collins Dictionary in American English (2020) memberikan pengertian *philanthropy*: 1) *altruistic concern for human welfare and advancement, usually manifested by donations of money, property or work to needy persons, by endowment of institutions of learning and hospitals, and by generosity to other socially useful purposes*, 2) *the activity of donating to such persons or purposes in this way to devote one's later years to philanthropy*. Sedangkan kamus ensiklopedia Inggris mengartikan filantropi sebagai kasih sayang untuk umat manusia (*affection for mankind*).

Filantropi merupakan perpaduan dari dua kata Yunani yaitu *philos* yang berarti cinta serta *anthropos* yang berarti manusia. Dengan demikian filantropi dapat diartikan sebagai cinta pada sesama manusia dalam bentuk peduli pada kondisi manusia lainnya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, istilah

filantropi diartikan sebagai kedermawanan dan cinta kasih terhadap sesama. Aksi filantropi ini kemudian diwujudkan dengan perilaku dermawan dan kecintaan kepada sesama. Secara sederhana, filantropi didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang dilakukan untuk kebaikan orang (Payton, 1988), yang mencakup perilaku yang lebih luas daripada hanya suatu kegiatan orang per orang (Schuyt, et.al., 2004). Dengan kata lain, filantropi berarti sumbangan dalam bentuk uang, waktu, barang, dan keahlian; yang diberikan secara sukarela untuk keperluan dan pelayanan umum (Schuyt, 2003). Menurut James O. Midgley (1995), filantropi merupakan salah satu di antara 3 (tiga) pendekatan dalam mempromosikan kesejahteraan selain dari *social service* dan *social work*.

2. Tujuan dan Prinsip

Mengutip dari filantropi Indonesia dalam pelaksanaannya, filantropi memiliki tujuan dan prinsip yang dipegang, yaitu: (<https://filantropi.or.id/kabar/kabar-terdahulu/tujuan-amp-prinsip>, 2020)

a) Tujuan :

- Menjadi wahana komunikasi dan konsultasi para pelaku filantropi dalam menghadapi dan mencari solusi terhadap masalah-masalah sosial-kemanusiaan dan lingkungan di Indonesia
- Menumbuh kembangkan sifat, semangat dan etik filantropi/kedermawanan sosial di berbagai kalangan dan lapisan masyarakat Indonesia melalui berbagai media dan sarana
- Meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi organisasi nirlaba/pelaku filantropi
- Menumbuhkan rasa saling percaya, solidaritas dan kerjasama yang sehat dan membangun di antara para pelaku dan lembaga filantropi di Indonesia
- Menjadi mitra yang dipercaya oleh pemerintah dan sektor usaha dalam menjalankan pembangunan sosial-kemanusiaan dan lingkungan di tanah air.



b) Prinsip

- Filantropi memberikan akses kepada warga masyarakat yang memerlukan sumberdaya agar mereka dapat meningkatkan kemandirian mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Setiap pelaku filantropi menghargai keberagaman yang hidup dalam masyarakat: budaya, agama dan keyakinan, suku bangsa, cara pandang, dan lain-lain.
- Keadilan gender. Filantropi yang dilaksanakan memperhatikan kebutuhan dan kecenderungan gender yang berbeda dan menempatkannya dalam perspektif kesetaraan.
- Universal dan non-partisan. Filantropi tidak membedakan latar belakang penerima maupun pemberi dan dijaga agar tidak menjadi alat politik untuk kepentingan kelompok atau aliran tertentu.
- Kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan individu dan kelompok.

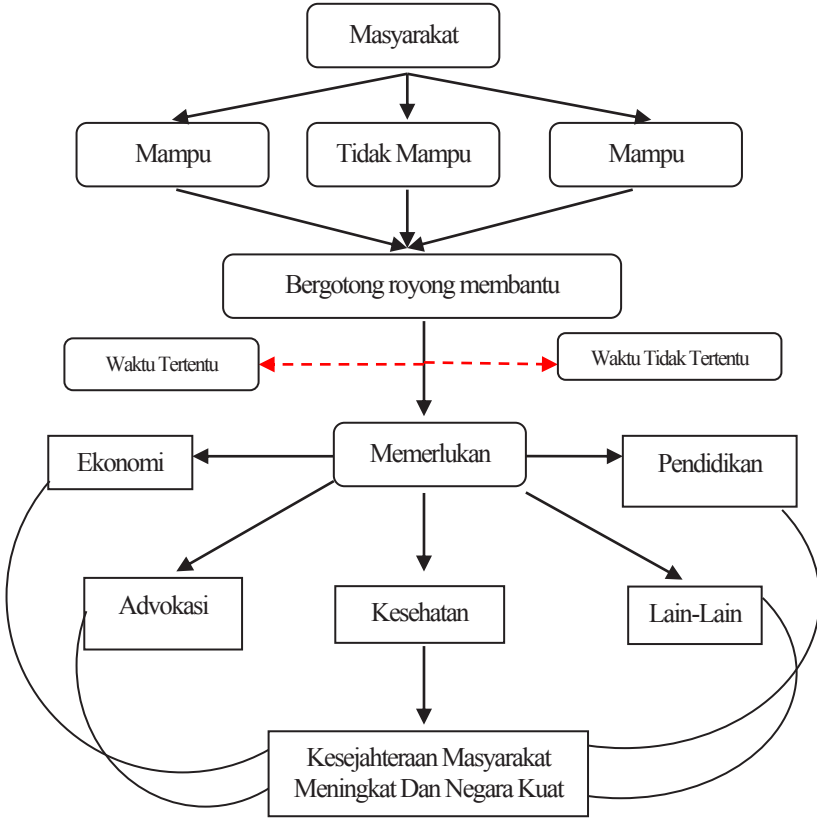
3. Strategi Filantropi

Untuk mengimplementasikan filantropi, 2 strategi yang dapat dilakukan yaitu:

- a) Strategi karitas (*charity*), merupakan strategi pengentasan kemiskinan melalui pemberian bantuan berupa bahan makanan, material maupun uang tunai (Imron Hadi Tamim, 2011). Tujuannya adalah untuk meringankan beban hidup ketika pendapatan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mengalami ketidaklancaran. Strategi karitas menggunakan paradigma pelayanan sosial (*social service*) yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*)
- b) Strategi pemberdayaan, yaitu mengelaborasi potensi sumber daya manusia. Strategi ini dilakukan dengan memberikan advokasi serta pendidikan publik dalam rangka perubahan sosial masyarakat.

6.5 Filantropi Sosial

Secara pengertian, filantropi sosial digambarkan dengan definisi dari filantropi itu sendiri. Kegiatan ini dilakukan oleh semua masyarakat tanpa memandang sisi agama dan kepercayaan, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, baik secara materi maupun non materi. Berikut skema filantropi sosial pada Gambar 6.3.



Gambar 6.3 Skema Filantropi Sosial
Sumber: Diolah (2021)

Gambar 6.3 menjelaskan keberadaan masyarakat yang terdiri dari kelompok mampu maupun tidak mampu, bergotong royong saling bantu kepada yang memerlukan, baik dalam bentuk materi (uang, sandang, pangan, papan) maupun non materi (keahlian,



tenaga). Bantuan diberikan dalam waktu yang telah ditentukan (bentuk program) maupun waktu yang tidak ditentukan. Dengan mengalirnya bantuan serta pengelolaan yang baik, akan terjadi pemberdayaan masyarakat di segala bidang, sehingga kesejahteraan meningkat dan negara menjadi kuat.

6.6 Filantropi dalam Islam

Dalam pandangan ajaran Islam, filantropi merupakan bagian dari kegiatan ketakwaan seorang muslim. Seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Hujurat [49]: 13 sebagai berikut:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Cerminan ketakwaan digambarkan dengan terjadinya hubungan antara sesama dalam bentuk kebaikan jika melakukan filantropi. Lebih lanjutnya akan mendatangkan keberkahan, rahmat dan pertolongan Allah, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Pada akhirnya akan terwujud kebaikan kehidupan yang semakin luas.

Secara umum, perilaku filantropi digambarkan dengan kegiatan gotong royong dan sosial dalam pengumpulan dana. Perilaku filantropi dalam Islam diimplementasikan dalam kegiatan ziswaf (zakat, infak, sedekah dan wakaf). Kegiatan ini tidak pernah putus karena masing-masing memiliki metode dan waktu penyerahan yang berbeda, sehingga satu dengan lainnya saling melengkapi dalam melakukan kegiatan filantropi tersebut. Dengan kata lain, dalam Islam untuk berperilaku filantropi sangat mungkin dilakukan.

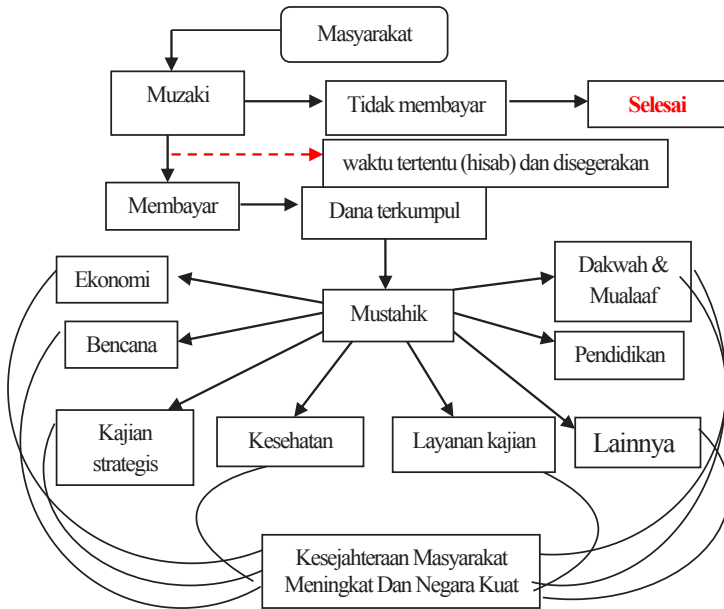
6.6.1 Zakat

Zakat merupakan bentuk filantropi bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat wajib zakat itu sendiri. Berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Harta yang dikenakan zakat adalah yang memiliki potensi bertumbuh, yang dikeluarkan sebesar 2,5% per tahun. Dengan demikian, waktu untuk filantropi zakat ini adalah tertentu. Pada tahun 2019, Indonesia berpotensi memperoleh filantropi zakat sebesar Rp. 232 triliun. Tetapi yang terkumpul hanya mencapai Rp. 8,1triliun.

Dengan perhitungan sederhana dapat digambarkan potensi zakat di Indonesia sebagai berikut. Data tahun 2019 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam sebanyak 207 juta jiwa. Jika diasumsikan: 1) Sebanyak 30% dari jumlah tersebut adalah usia produktif yang telah wajib untuk menunaikan zakat, 2) Zakat maksimal yang dibayar masing-masing adalah $2,5\% \times 85$ gram emas. Maka dalam tahun tersebut perolehan zakat potensial sebesar: $(30\% \times 207 \text{ juta jiwa}) = 62,1 \text{ juta jiwa} \times 2,125 \text{ gram emas} = 131,9625 \text{ juta gram emas} \times \text{Rp. } 924.000/\text{gram} = \text{Rp.}121,933 \text{ triliun}$. Hal ini menggambarkan betapa besarnya perolehan zakat potensial di Indonesia jika perilaku filantropi masyarakat dapat diwujudkan. Berikut skema filantropi zakat pada Gambar 6.4.

Masyarakat yang telah memenuhi syarat berkewajiban membayar zakat (muzaki), menyerahkan sebagian dari hartanya yang telah ditentukan nisabnya kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Dana yang terkumpul dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat yang mencakup bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, kajian strategis, penanggulangan bencana, dakwah dan muallaf, layanan kajian dan lainnya. Dengan pengelolaan manajemen zakat yang baik dari semua pihak, potensi meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah suatu keniscayaan. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak menunaikan zakat padahal sudah memiliki kewajiban, maka runtutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlaksana.



Gambar 6.4 Skema Filantropi Zakat
Sumber : Diolah (2021)

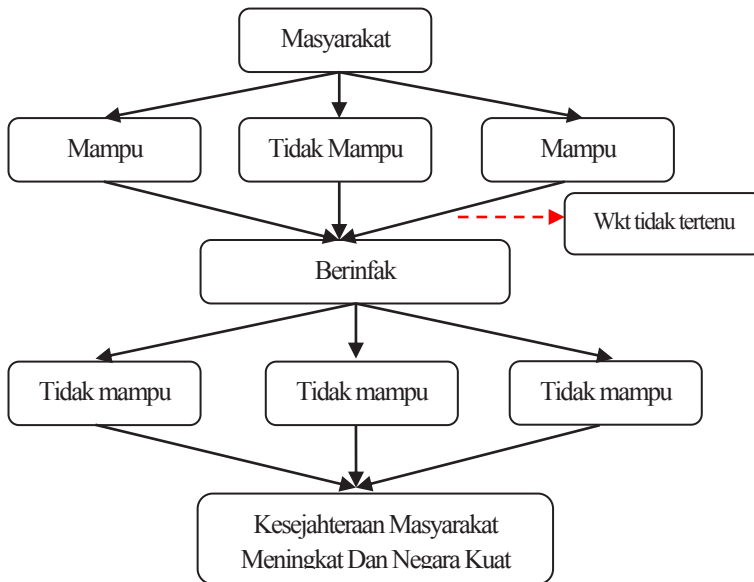
6.6.2 Infak

Secara terminologi infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta maupun penghasilan dalam bentuk materi bagi suatu kepentingan yang diperintahkan. Infaq tidak mengenal nishab sebagaimana zakat, sehingga kegiatan berinfaq dapat dilakukan kapan saja. Infaq merupakan pengeluaran sukarela, baik seseorang dalam keadaan lapang maupun sempit, mempunyai maupun tidak, berpenghasilan tinggi maupun rendah. Peruntukannya tidak ditentukan secara khusus tetapi tetap menekankan fungsi kebaikan. Dari Hadits Riwayat Muslim, Abu Huroirah ra. memberitahukan,

Muhammad Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya Allah SWT berfirman kepadaku, berinfaqlah kamu, maka Aku akan berinfaq kepadamu".

Dengan perhitungan sederhana dapat digambarkan potensi infak di Indonesia sebagai berikut. Dari data pemeluk agama Islam di atas, jika 50% merupakan usia produktif (15 tahun–64 tahun)

dan mengeluarkan infak Rp.12.000 per tahun, maka dalam tahun tersebut perolehan infak potensial adalah: $(50\% \times 207 \text{ juta jiwa}) = 103,5 \text{ juta jiwa} \times \text{Rp.12.000/org/tahun} = \text{Rp.1,242 triliun}$. Berikut skema filantropi infak dalam Gambar 6.5.



Gambar 6.5 Skema Filantropi Infak
Sumber : Diolah (2021)

Masyarakat yang memiliki maupun yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, mempunyai kesempatan yang sama sepanjang waktu untuk berinfak dalam jumlah sekecil apapun. Dana yang terkumpul dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat tidak mampu dengan berbagai bentuk, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

6.6.3 Sedekah

Memiliki kesamaan dengan infak, yaitu bersifat sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkannya, baik dari sisi jumlah, waktu dan kadarnya. Perbedaannya adalah sedekah yang diberikan dapat berupa materi dan juga jasa dalam rangka memberikan manfaat kepada orang lain. Dari Hadist Riwayat



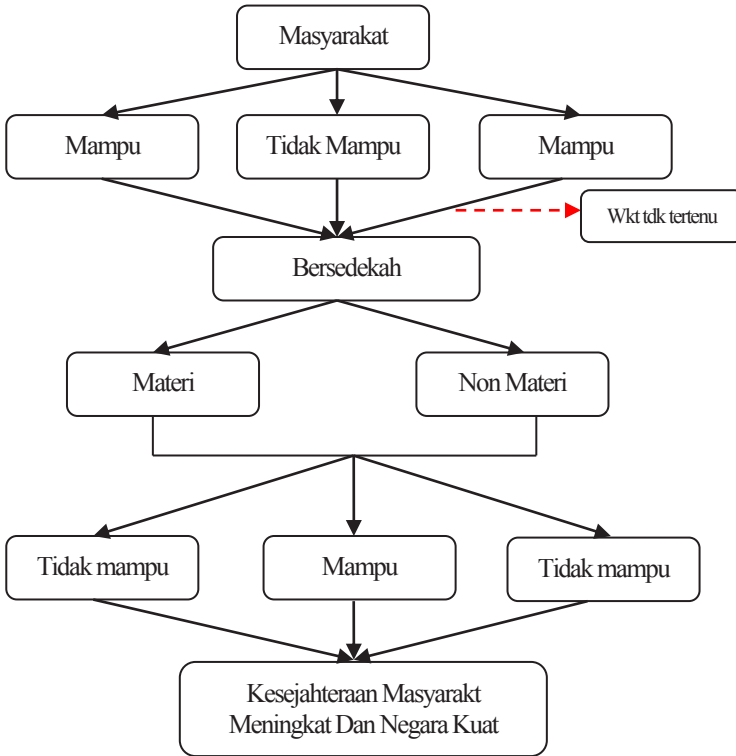
Muslim, Sa'ad bin Abi Burdah ra. mendengar cerita dari ayahnya, dan ayahnya mendengar cerita dari kakeknya,

Rasulullah Saw bersabda.

"Setiap orang muslim wajib bersedekah". Salah seorang sahabat bertanya, "Bagaimana kalau dia tak sanggup?" Rasulullah Saw menjawab, "Dia harus bekerja untuk memberi manfaat kepada dirinya sendiri, dan supaya dia dapat bersedekah". "Bagaimana kalau tidak sanggup?" tanya seorang sahabat yang lain. "Menolong orang yang perlu pertolongan". "Bagaimana kalau itupun tidak sanggup, ya Rasulullah?" "Menahan diri dari berbuat kejahatan, itupun sedekah," sabda Rasulullah saw.

Dengan perhitungan sederhana dapat digambarkan potensi sedekah di Indonesia sebagai berikut. Dari data pemeluk agama Islam di atas, jika 30% mengeluarkan sedekah materi sebesar Rp.12.000 per tahun, maka dalam tahun tersebut perolehan sedekah potensial adalah: $(30\% \times 207 \text{ juta jiwa}) = 62,1 \text{ juta jiwa} \times \text{Rp.12.000/org/tahun} = \text{Rp.7,452 trilyun}$. Selain itu sedekah berupa non materi yang memberikan dampak kebaikan bagi keluarga, lingkungan dan masyarakat luas turut memberikan andil semakin besarnya potensi perolehan sedekah. Berikut filantropi sedekah dalam Gambar 6.6.

Bagi masyarakat yang memiliki maupun yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dapat melakukan sedekah tanpa batasan waktu maupun tanpa batasan nilai yang diberikan. Baik berupa materi maupun non materi. Dengan sedekah materi yang diberikan oleh masyarakat yang berkemampuan, dialokasikan antara lain untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Sedangkan sedekah non materi yang diberikan oleh masyarakat yang kurang mampu antara lain menjadi pendukung terlaksananya kegiatan yang berasal dari alokasi dana sedekah tersebut.



Gambar 6.6 Skema Filantropi Sedekah
Sumber : Diolah (2021)

6.6.4 Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, *waqf* yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Maksud dari menahan adalah untuk tidak diperjualbelikan, dihadiahkan, atau diwariskan. Menurut istilah *syar'i*, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan.

Selain itu, wakaf juga diartikan sebagai menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya, dan penggunaannya adalah untuk kebaikan. Harta yang

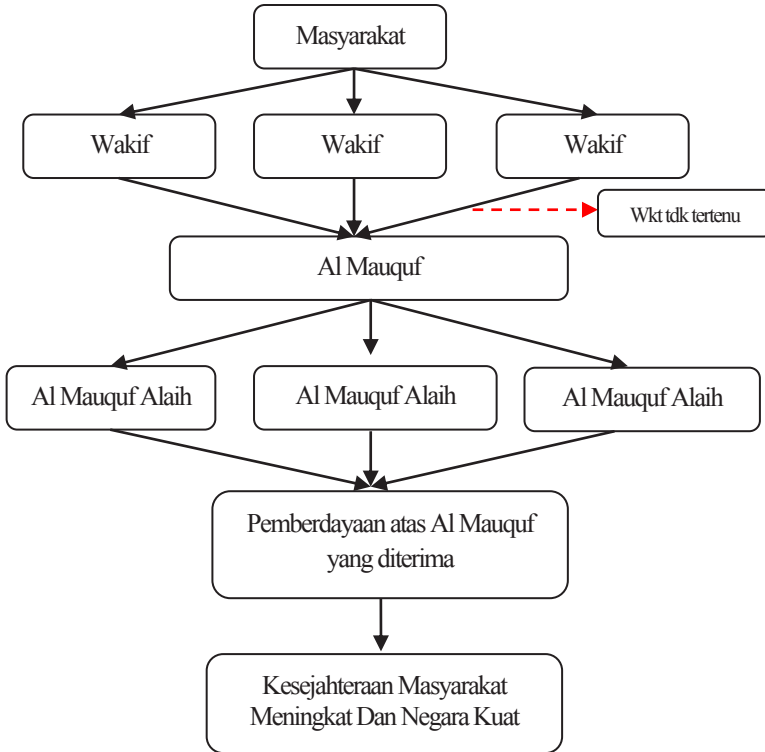


diwakafkan tidak boleh habis dan tidak boleh dijual, serta penggunaannya harus sesuai dengan niat pemberi wakaf, yang disebut dengan wakif. Wakaf yang lazim diberikan adalah dalam bentuk harta tidak bergerak seperti hak tanah dan bangunan. Pada saat ini penerimaan wakaf berkembang dalam bentuk harta bergerak yakni selain uang (surat berharga) serta uang. Peruntukannya dilakukan antara lain membentuk kemitraan usaha, pengembangan pendidikan, mendirikan rumah sakit dan layanan kesehatan, layanan sosial serta pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ibnu Umar ra. berkata: " Umar bin Al-Khattab ra. mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi saw dan bertanya: ' Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah saranmu kepadaku ?' Jawab Nabi saw: ' Jika engkau mau, wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk sedekah '.

Dengan perhitungan sederhana dapat digambarkan potensi wakaf di Indonesia sebagai berikut. Dari data pemeluk agama Islam di atas, jika 10% (20,7 juta jiwa) merupakan wakif yang mewakafkan tanah, bangunan, serta uang tunai, akan memperbesar kesempatan masyarakat untuk memiliki pendapatan, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan modal usaha (bagi *mauquf alaih*), serta reinvestasi aset wakaf yang akan menghasilkan aset baru. Berikut sekma filantropi wakaf dalam Gambar 6.7

Masyarakat yang memiliki harta untuk diwakafkan (*al mauquf*), memberikannya kepada lembaga wakaf untuk dikelola. Selain digunakan untuk para *Al Mauquf Alaih*, manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat luas.



Gambar 6.7 Skema Filantropi Wakaf
Sumber : Diolah (2021)

6.7 Filantropi Dan Pandemi Covid-19

Secara umum, pandangan terhadap terjadinya pandemi Covid-19 merupakan musibah besar dalam perekonomian. Tetapi di sisi lain, banyak kebaikan yang terjadi di luar perkiraan masyarakat. Salah satunya adalah terjadinya peningkatan kedermawanan masyarakat dalam bentuk filantropi, baik secara material maupun non material. Hal ini dibuktikan dengan naiknya penghimpunan dana ZIS di tahun 2020 sebesar 30% (Rp. 385,5 miliar) dibandingkan tahun 2019 (Rp. 296 miliar) . Jumlah ini setara dengan 101,44 % dari target penghimpunan ZIS yang ditetapkan pada awal tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 % penyaluran ZIS dimanfaatkan untuk program-program menangani dampak pandemi, baik



bantuan berupa kegiatan medis, bantuan non medis hingga kegiatan ekonomi.

World Giving Index 2020 mengkonfirmasi zakat merupakan salah satu pendorong kedermawanan masyarakat. Keberhasilan dalam menghimpun ZIS menjadi bukti bahwa ZIS merupakan instrumen yang tepat untuk mengatasi berbagai kondisi sulit tak terkecuali kondisi pandemi Covid-19. Pengelolaan pengumpulan dana ZIS melalui strategi penguatan layanan digital, mampu mengurangi dampak akibat krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 tersebut (Baznas, 2021).

Filantropi sosial dan filantropi dalam Islam selayaknya mampu dalam mengatasi berbagai permasalahan krisis ekonomi termasuk krisis akibat kejadian luar biasa pandemi Covid-19 ini. Karena untuk melakukan kegiatan filantropi tidak ada batasan waktu (dapat dilakukan sepanjang waktu) maupun tidak ada keterbatasan kemampuan ekonomi. Masyarakat yang berkemampuan rendah juga dapat melakukan kegiatan filantropi.

6.8 Penutup

Filantropi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata. Kemampuan mengatasi masalah yang timbul di masyarakat khususnya masalah ekonomi, dampak positifnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan kejadian luar biasa pandemi Covid-19, keterpurukan menerpa semua sisi kehidupan. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam hal pencegahan penularan berimbas kepada turunnya kegiatan perekonomian.

Dengan kegiatan filantropi sosial maupun filantropi Islam, harapan untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul akibat pandemi Covid-19 merupakan keniscayaan. Bantuan materi maupun non materi yang diberikan dan diterima oleh masyarakat, baik masyarakat yang berkelebihan maupun berkekurangan akan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian.

Peran serta seluruh masyarakat sangat diharapkan. Potensi yang ada harus digerakkan agar tidak hanya menjadi wacana. Demikian dasyatnya kegiatan filantropi ini dimana dampaknya tidak hanya pada bidang ekonomi tetapi menyinggung semua sisi kehidupan, baik jasmani maupun rohani.

DAFTAR PUSTAKA

- Baznas. (2021). Masa Pandemi 2020, Penghimpunan Baznas Naik 30% Diakses: 15 Maret 2021. Tersedia: https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Masa_Pandemi_2020,_PENGHIMPUNAN_BAZNAS_Naik_30_Persen/689.
- Burlingame, D., F. 2006. *Philanthropy*. Microsoft Encarta Standard.
- Baqi, M.F.A. 2013. *Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Depok. Fathan Prima Media.
- Collins Dicitonary. 2020. *Philanthropy*. Diakses: 20 Juli 2020. Tersedia:<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/philanthropy>
- Filantropi Indonesia (2020). Tujuan dan Prinsip. Akses 15 Juli 2020. Tersedia: <https://filantropi.or.id/kabar/kabar-terdahulu/tujuan-amp-prinsip>
- Fauzia, I., Y. (2019). *Islamic Entrepreneurship Kewirausahaan Berbasis Pemberdayaan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Harahap, L. R. (2020). *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, Bab V. Malang: Penerbit Peneleh
- Hamid, S., R. (2017). *Buku Pintar Hadits*. Jakarta: Qibla
- KBBI. 2020. Kamus versi online/daring (dalam jaringan). Tersedia: <https://www.kbbi.web.id/pandemi>. Diakses: Juni 2020.
- Kompas. 2020. Memutus Rantai Penularan Covid-19. Tersedia: <https://interaktfi.kompas.id/baca/memutus-covid-19>. Diakses: 3 Juli 2020
- Midgley, James O. 1995. *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication.
- BBC. 2020. News Indonesia. Tersedia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113>. Diakses: 3 Juli 2020.



BPS. 2020. Berita Resmi Statistik. Tersedia:

https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf. Diakses: 3 Juli 2020.

Payton, R. L., 1988. *Philanthropy: Voluntary Action for the Public Good*, New York: Macmillan.

Republika. 2018. Filantropi Dalam Perspektif Islam. Diakses: 19 Juli 2020. Tersedia: <https://republika.co.id/berita/p5qn6r396/filantropi-dalam-perspektif-islam>.

Schuyt, T.N.M. (ed.). (1995, 1997, 1999, 2001, 2003). *Giving in the Netherlands*. Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum.

Schuyt, T., Smit, J., Bekkers, R. 2004. Constructing a Philanthropy-scale: Social Responsibility and Philanthropy. *University of Groningen Research Database*. <https://core.ac.uk/reader/148195754> , 15 Juli 2020.

Tamim, I., H. 2011. Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan di Dalam Komunitas Lokal. *Jurnal Sosiologi Islam*. Vol.1 No.1. April 2011. <file:///C:/Users/SONY/AppData/Local/Temp/8-Article%20Text-7-1-10-20170506.pdf> . Diakses: 15 Juli 2020.

Tanjung, H. 2020. Koperasi dan Wakaf Uang. *Majalah Peluang.com*. No.117, hal.41. Desember 2019. <http://majalahpeluang.com/koperasi-dan-wakaf-uang/>. Diakses: 27 September 2020.



BIODATA PENULIS



Profesor Nurlina T. Muhyiddin, MS., Ph.D, merupakan Guru Besar FEB Universitas Sriwijaya dengan status saat ini sebagai Dosen BLU. Pendidikan: S1 Studi Pembangunan (FE Unsri, 1975), S2 Kependudukan dan Ketenakerjaan (FE Universitas Indonesia, 1990), S3 Ilmu Ekonomi (Universitas Kebangsaan Malaysia, 2003). Pada tahun 2005 memperoleh gelar Guru Besar. Beberapa karya buku yang telah dipublikasi antara lain: 1) Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Teori, Konsep dan Rencana Proposal (2017), 2) Ekonomi Ketenagakerjaan (2018), 3) Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional (2020), 4) SDM dalam Berbagai Perspektif (2020).



Profesor Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si merupakan Guru Besar Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pendidikan: S1 Ilmu Administrasi Negara (Unsri, 1987), S1 Ilmu Hukum (STIH Sumpah Pemuda, 2019), S2 Ilmu Administrasi Publik (Unpad, 1996), S3 Ilmu Administrasi Publik (Unpad, 2006). Gelar Guru Besar diperoleh pada tahun 2010. Beberapa publikasi antara lain: 1) An Examination of Press Freedom Index in Sumatera Selatan From 2016 to 2017 (2019). 2) Influence of School Culture and Classroom Environment in Improving Soft Skills among Secondary Schoolers (International Journal of Intruccion (2019), 3) Improving Soft Skill among the Secondary School Student (2017).



Aning Kesuma Putri, SE., M.Si merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Pendidikan: S1 Ekonomi Studi Pembangunan (Unsri, 2007), S2 Ilmu Ekonomi (Unsri, 2010). Saat ini sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Ekonomi di Unsri. Beberapa publikasi :1) The Effect of Islamic Social Reporting Index On Islamic Banking Financial Performance In Indonesia, *Humanities & Social Sciences Reviews*, (2019), 2) Management of Potential Tourism Attraction in the Kampung Pelangi Pelangi Nelayan in the Village of Kurau, *TEST Engineering and Management* (2020), 3) Poverty Reduction in Regencies/Municipalities in South Sumatra Province, 4) Factors Influencing The Income of Fishermen (2020).



Dr. Dian Novriadhy, ST., M.Si., merupakan Peneliti bidang Demografi Sosial dan Sosiologi Lingkungan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pendidikan: S1 Teknik Kimia (Unsri, 2002), S2 Kependudukan (Unsri, 2015) dan S3 Ilmu Lingkungan (Unsri, 2020). Aktif menulis buku dan artikel ilmiah sejak 2011 dan diterbitkan di berbagai jurnal nasional dengan tema kajian kesehatan reproduksi, pemberdayaan masyarakat dan isu-isu lingkungan. Selain itu, merupakan editor di Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan. Profil google scholar <https://bit.ly/2VnpOK9>, email: dian.novriadhy@gmail.com.



Oktaf Juairiyah, STI merupakan Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pendidikan: S1 Teknik Informatika (IT Telkom)

Wenni Tania Defriyanti merupakan Peneliti bidang Kebijakan Publik pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2015 sampai dengan



sekarang. Sebelumnya beliau merupakan Staf Subbag Perencanaan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2010 hingga 2015. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S2 Administrasi Publik.



Dr. Sari Lestari Zainal Ridho, SE., M.Ec merupakan Dosen Tetap pada Politeknik Negeri Sriwijaya. Pendidikan S1 Manajemen (Unair, 2020), S2 Master of Economics (IIUM, 2005), dan S3 Ilmu Ekonomi (Unsri, 2016). Beberapa publikasi: 1) Human Resource Role and Online Strategi (2019), 2) Secondary School Enrollment Impact on the Economic as An Essential Input of Civilization (2018), Demographic and Financial Dynamics in Prabumulih Region as The Development Expansion Impact (2017).



Dr. DessyAdriani, M.Si merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Pendidikan S1 Sosial Ekonomi Pertanian (Unsri, 1997), S2 Ilmu Ekonomi Pertanian (IPB, 2000), S3 BKU Agribisnis (Unsri, 2012). Aktif sebagai peneliti di CoE.PLACE, BRG, ZSL, dan Belantara Foundation. Beberapa kursus yang pernah diikuti antara lain: ToT. Kelayakan Proyek (Universitas Indonesia), ToT. Ekonomi Hijau (Universitas Padjajaran), ToT.Green Economics (Temple University, Japan), ToT. Perencanaan dan Penganggaran (Universitas Gajah Mada), ToT. Budgeting and Planning (GRIPS, Japan), Circular Economis (Western Finland University).



Dr. Ir. Maryadi, M.Si merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Pendidikan S1 Sosial Ekonomi Pertanian (Unsri, 1990), S2 Ilmu Ekonomi Pertanian (IPB, 1998), S3 Ilmu



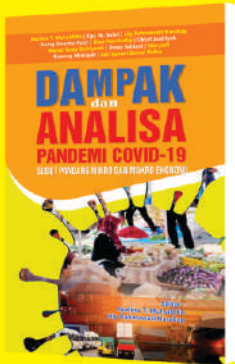
Ekonomi Pertanian (IPN, 2011). Beberapa publikasi antara lain: 1) Isyarat Sosio-Entropy sebagai Strategi Perkuatan Kelembagaan dalam Upaya Meminimalkan Konflik Sosial di Kawasan Hutan Tanaman Industri Provinsi Sumatera Selatan (2018), 2) Mengelola Hutan Bersama Masyarakat dan Peranannya dalam Penyerapan Tenaga Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Industri (2011), 3) Valuasi Ekonomi Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Community Base forest Management di Provinsi Sumatera Selatan (2011).



Dr. Neneng Miskiyah, SE., M.Si merupakan Dosen Tetap pada Politeknik Negeri Sriwijaya. Pendidikan S1 Manajemen (Unsri, 1998), S2 Ilmu Ekonomi (Unsri, 2006), dan S3 Ilmu Ekonomi (Unsri, 2017). Beberapa buku yang dipublikasi: 1) Pasar Tenaga Kerja Oligopsoni dalam Perilaku Pasar Tenaga Kerja (2014), 2) Urbanisasi dalam Perilaku Pasar Tenaga Kerja (2014), 3) Capaian Pembangunan di Desa RUF dan Optimalisasi Sumber Modal dalam Pembangunan Berkelanjutan, Interaksi Desa-Kota, Rural Fringer (2017), 4) SDM dalam Berbagai Perspektif (2020).



Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM adalah Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang. Pendidikan: S1 Manajemen (USU, 1993), S2 Manajemen Keuangan Asuransi (Universitas Gunadarma, 1997), S3 Ekonomi Keuangan Syariah (Universitas Trisakti, 2016). Buku yang telah dipublikasikan: 1) *The Tawhidi Methodological Worldview, A Transdisciplinary Study of Islamic Economics*, Chapter 14: Society's Attitude to Pay Zakah Relating to Employment and Income Variables Seen From Tawhidi Perspective in South Sumatera: A Cross Sectional Study Based on Survey (Springer, Singapore, 2019; 2) *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*, 2020.



Perubahan pola hidup baru yang harus dijalani manusia akibat terjadinya pandemi Covid-19 merupakan suatu hal yang tak terhindari. Kegiatan yang biasa dilakukan secara tatap muka (offline), semasa ini lebih banyak dilakukan secara daring (online). Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari terjadinya pandemi ini. Tetapi di sisi lain munculnya hal-hal positif memberikan pengetahuan baru bagi manusia untuk terus berkegiatan berdampingan dengan keadaan saat ini.

Buku ini berisi tentang dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 serta solusi yang ditawarkan. Topik yang dibahas terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang dikaji dari sudut pandang mikro dan makro ekonomi, yang mencakup: 1) Penilaian Awal Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian di Sumatera Selatan, 2) Potensi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi SDM di Sumatera Selatan, 3) Pandemi Covid-19 dan Pasar Kerja Pertanian, 4) Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat: Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19, 5) Tradeoff Waktu Kerja dan Waktu Luang pada Masa Pandemi Covid-19, serta 6) Kekuatan Filantropi dalam Pemberdayaan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19.

Secercah harapan yang dimiliki tim penulis bahwa dengan membaca buku ini akan bertambah wawasan pengetahuan dan selalu semangat untuk tetap produktif menjalani pola hidup baru berdampingan dengan keadaan pandemi Covid-19. Allah Swt tidaklah menciptakan semua ini sia-sia (QS 3: 191) dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS 94: 6).



Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55185
telp/fax. (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com

